



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017 *AUDITED*





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Kesehatan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Kesehatan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2018

Menteri Kesehatan,



Prof. Dr. Nita Farid Moeloek, Sp.M (K)

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	vii
Daftar Gambar	viii
Pernyataan Tanggung Jawab	ix
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	10
II. Neraca	11
III. Laporan Operasional	13
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	14
V. Catatan atas Laporan Keuangan	15
A. Penjelasan Umum	15
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	47
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	60
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	87
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	100
F. Pengungkapan – Pengungkapan Lainnya	106
Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Hal	
Tabel 1	Realisasi Anggaran TA 2017 dan 2016	1
Tabel 2	Ringkasan Neraca per 31 Desember 2017 dan 2016	1
Tabel 3	Anggaran dan Jumlah Satker Kemenkes 2017	2
Tabel 4	Rekonsiliasi Internal antara SAIBA dan SIMAK BMN	5
Tabel 5	Koreksi atas Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP TA 2017 Menurut Unit Eselon 1	6
Tabel 6	Koreksi atas Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2017 Menurut Unit Eselon 1	6
Tabel 7	Koreksi atas Neraca per 31 Desember 2017	7
Tabel 8	Koreksi Neraca per 31 Desember 2017 Menurut Unit Eselon 1	7
Tabel 9	Koreksi atas Laporan Operasional TA 2017 Menurut Unit Eselon 1	8
Tabel 10	Koreksi atas Laporan Operasional per 31 Desember 2017	8
Tabel 11	Koreksi atas Laporan Perubahan Ekuitas TA 2017 Menurut Unit Eselon 1	8
Tabel 12	Koreksi atas Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2017	9
Tabel 13	Sasaran Pembangunan Kesehatan pada RPJMN 2015-2019	22
Tabel 14	Rekapitulasi Satker Menurut Eselon 1	29
Tabel 15	Kualitas Penyisihan Piutang	42
Tabel 16	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	44
Tabel 17	Penggolongan Masa Manfaat ATB	45
Tabel 18	Perubahan Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Setelah Revisi	47
Tabel 19	Perubahan Pagu Anggaran Menurut Program Setelah Revisi	48
Tabel 20	Rincian Estimasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan	48
Tabel 21	Rincian Estimasi Pendapatan PNBP TA 2017 dan 2016	49
Tabel 22	Realisasi Pendapatan TA 2017 dan 2016	49
Tabel 23	Rincian Realisasi PNBP TA 2017 dan 2016	49
Tabel 24	Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2017	50
Tabel 25	Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA 2017	50
Tabel 26	Anggaran menurut Program TA 2017 dan 2016	51
Tabel 27	Realisasi Belanja menurut Program TA 2017 dan 2016	51
Tabel 28	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja TA 2017	52
Tabel 29	Alokasi Anggaran menurut Jenis Belanja TA 2017 dan 2016	53
Tabel 30	Realisasi Belanja (<i>Netto</i>) TA 2017 dan 2016	53
Tabel 31	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2017	54
Tabel 32	Realisasi Belanja Pegawai (<i>Netto</i>) TA 2017 dan 2016	55
Tabel 33	Realisasi Belanja Barang (<i>Netto</i>) TA 2017 dan 2016	56
Tabel 34	Realisasi Belanja Modal (<i>Netto</i>) TA 2017 dan 2016	56
Tabel 35	Realisasi Belanja Modal Tanah (<i>Netto</i>) TA 2017 dan 2016	56
Tabel 36	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (<i>Netto</i>) TA 2017 dan 2016	57
Tabel 37	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (<i>Netto</i>) TA 2017 dan 2016	57
Tabel 38	Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan (<i>Netto</i>) TA 2017 dan 2016	58
Tabel 39	Realisasi Belanja Modal Lainnya (<i>Netto</i>) TA 2017 dan 2016	58
Tabel 40	Realisasi Belanja Modal BLU (<i>Netto</i>) TA 2017 dan 2016	58
Tabel 41	Daftar Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016	60
Tabel 42	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016	61
Tabel 43	Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Unit Eselon 1	61
Tabel 44	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 dan 2016	61

Tabel 45	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2017 dan 2016	62
Tabel 46	Kas lainnya dan Setara Kas Menurut Unit Eselon 1	62
Tabel 47	Rincian Kas pada BLU Per 31 Desember 2017 dan 2016	63
Tabel 48	Rincian Kas pada BLU Menurut Unit Eselon 1	63
Tabel 49	Rincian Investasi Jangka Pendek BLU Per 31 Desember 2017 dan 2016	63
Tabel 50	Investasi Jangka Pendek BLU per Eselon 1	64
Tabel 51	Rincian Belanja Dibayar di Muka Per 31 Desember 2017 dan 2016	64
Tabel 52	Belanja dibayar di Muka Menurut Unit Eselon 1	64
Tabel 53	Rincian Uang Muka Belanja per 31 Desember 2017 dan 2016	65
Tabel 54	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Menurut Unit Eselon 1	65
Tabel 55	Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 dan 2016	65
Tabel 56	Piutang Bukan Pajak Menurut Unit Eselon 1	66
Tabel 57	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2017 dan 2016	66
Tabel 58	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Bukan Pajak per Eselon 1	66
Tabel 59	Rincian Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2017 dan 2016	67
Tabel 60	Rincian Bagian Lancar TP/TGR per Eselon 1	67
Tabel 61	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2017 dan 2016	67
Tabel 62	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR Menurut Unit Eselon 1	68
Tabel 63	Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2017 dan 2016	68
Tabel 64	Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Eselon 1	68
Tabel 65	Rincian Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2017 dan 2016	69
Tabel 66	Rincian Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Menurut Unit Eselon 1	69
Tabel 67	Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2017 dan 2016	70
Tabel 68	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2017 dan 2016	70
Tabel 69	Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016	71
Tabel 70	Persediaan Menurut Unit Eselon 1	71
Tabel 71	Persediaan BLU Menurut Unit Eselon 1	72
Tabel 72	Rincian Aset Tetap (BMN) 31 Desember 2017 dan 2016	73
Tabel 73	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Nilai Tanah	74
Tabel 74	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin	75
Tabel 75	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Gedung dan Bangunan	76
Tabel 76	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan	77
Tabel 77	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya	78
Tabel 78	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	78
Tabel 79	Daftar Piutang Jangka Panjang Tahun 2017 dan 2016	79
Tabel 80	Tagihan TP/TGR Tahun 2017 dan 2016 Menurut Unit Eselon 1	79
Tabel 81	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan TP/TGR Tahun 2017 dan 2016 Menurut Unit Eselon 1	80
Tabel 82	Tagihan TP/TGR Tahun 2017 dan 2016 Menurut Unit Eselon 1	80
Tabel 83	Daftar Aset Lainnya Tahun 2017 dan 2016	81
Tabel 84	Rincian ATB Tahun 2017 dan 2016	81
Tabel 85	Rincian Mutasi ATB TA 2017	82

Tabel 86	Rincian Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya TA 2017	82
Tabel 87	Daftar Aset Lain-Lain TA 2017	83
Tabel 88	Mutasi Aset Lain-Lain TA 2017	83
Tabel 89	Rincian Kewajiban Jangka Pendek TA 2017 dan 2016	84
Tabel 90	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2017	85
Tabel 91	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2017 Per Eselon 1	85
Tabel 92	Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2017	86
Tabel 93	Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2017 dan 2016 Per Eselon 1	86
Tabel 94	Utang Jangka Pendek Lainnya TA 2017 dan 2016	86
Tabel 95	Pendapatan 31 Desember 2017 dan 2016	87
Tabel 96	Beban Pegawai per 31 Desember 2017 dan 2016	87
Tabel 97	Beban Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016	88
Tabel 98	Beban Persediaan Menurut Unit Eselon 1	88
Tabel 99	Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2017 dan 2016	89
Tabel 100	Beban Barang dan Jasa Menurut Unit Eselon 1	89
Tabel 101	Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2017 dan 2016	90
Tabel 102	Beban Pemeliharaan Menurut Unit Eselon 1	90
Tabel 103	Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2017 dan 2016	91
Tabel 104	Beban Perjalanan Dinas Menurut Unit Eselon 1	91
Tabel 105	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2017 dan 2016	92
Tabel 106	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Menurut Unit Eselon 1	92
Tabel 107	Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2017 dan 2016	93
Tabel 108	Beban Penyusutan dan Amortisasi Menurut Unit Eselon 1	94
Tabel 109	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2017 dan 2016	94
Tabel 110	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Menurut Unit Eselon 1	95
Tabel 111	Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Operasional per 31 Desember 2017 dan 2016	95
Tabel 112	Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Menurut Unit Eselon 1	95
Tabel 113	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Menurut Unit Eselon 1	96
Tabel 114	Beban Pelepasan Aset Non Lancar Menurut Unit Eselon 1	96
Tabel 115	Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Menurut Unit Eselon 1	97
Tabel 116	Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Menurut Unit Eselon 1	97
Tabel 117	Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2017 dan 2016	98
Tabel 118	Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Menurut Unit Eselon 1	98
Tabel 119	Surplus/Defisit Laporan Operasional 31 Desember 2017 dan 2016	98
Tabel 120	Rincian Surplus/Defisit Laporan Operasional Menurut Unit Eselon 1	99
Tabel 121	Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2017 dan 2016 Menurut Unit Eselon 1	100
Tabel 122	Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 Menurut Unit Eselon 1	100
Tabel 123	Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 Menurut Unit Eselon 1	101
Tabel 124	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2017 dan 2016 Menurut Unit Eselon 1	102
Tabel 125	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2017 dan 2016 Menurut Unit Eselon 1	102

Tabel 126	Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2017 dan 2016 Menurut Unit Eselon 1	103
Tabel 127	Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2017 dan 2016	103
Tabel 128	Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2017 dan 2016 Menurut Unit Eselon 1	104
Tabel 129	Rincian Kementerian Negara/Lembaga Penerima Aset dari Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2017	104
Tabel 130	Koreksi Nilai (Revaluasi) atas Tanah	108
Tabel 131	Koreksi Nilai (Revaluasi) atas Gedung dan Bangunan	108
Tabel 132	Koreksi Nilai (Revaluasi) atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	109
Tabel 133	Koreksi Nilai (Revaluasi) atas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	109
Tabel 134	Koreksi Nilai (Revaluasi) atas Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	109
Tabel 135	Koreksi Nilai (Revaluasi) atas Gedung dan Bangunan pada Aset Lain-lain	110

DAFTAR GRAFIK

		Hal
Grafik 1	Komposisi Anggaran Menurut Jenis Belanja TA 2017	52
Grafik 2	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2017	52
Grafik 3	Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Flu Burung s.d. TA 2017	113

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 Program Indonesia Sehat	18
Gambar 2 3 Pilar Program Indonesia Sehat	18
Gambar 3 Peta Strategi Kementerian Kesehatan 2015-2019	23
Gambar 4 Menkes Nila F. Moeloek pada Acara Temu Media 2 Tahun Kerja Nyata Jokowi JK, di Bina Graha, Jakarta	29

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran (TA) 2017 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Disamping itu dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual ini Kementerian Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Secara ringkas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan TA 2017 *Audited* diuraikan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 *Audited* adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp11.705.809.385.676,00 atau mencapai 104,79% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp11.171.149.626.898,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp54.912.281.505.907,00 atau mencapai 92,89% dari alokasi anggaran sebesar Rp59.114.103.837.000,00. Ringkasan realisasi anggaran TA 2017 dan 2016 sebagai berikut:

Tabel 1
Realisasi Anggaran TA 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2017			TA 2016
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Negara	11.171.149.626.898	11.705.809.385.676	104,79	10.650.421.987.370
Belanja Negara	59.114.103.837.000	54.912.281.505.907	92,89	57.011.202.253.509

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017. Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp47.921.731.508.870,00 terdiri dari : Aset Lancar (*netto*) sebesar Rp8.746.078.521.705,00; Aset Tetap (*netto*) sebesar Rp38.797.668.708.393,00; Piutang Jangka Panjang (*netto*) sebesar Rp7.390.847.640,00 dan Aset Lainnya (*netto*) sebesar Rp370.593.431.132,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.627.731.242.426,00 dan Rp46.294.000.266.444,00.

Tabel 2
Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan (Penurunan)	
	31/12/2017	31/12/2016	(Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	8.746.078.521.705	7.811.531.902.898	934.546.618.807	11,96
Aset Tetap	38.797.668.708.393	39.769.461.961.778	(971.793.253.385)	(2,44)
Piutang Jangka Panjang	7.390.847.640	2.254.230.316	5.136.617.324	227,87
Aset Lainnya	370.593.431.132	444.005.592.740	(73.412.161.608)	(16,53)
Jumlah Aset	47.921.731.508.870	48.027.253.687.732	(105.522.178.862)	(0,22)
Kewajiban				

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan (Penurunan)	
	31/12/2017	31/12/2016	(Rp)	%
Kewajiban Jangka Pendek	1.627.731.242.426	1.316.606.028.013	311.125.214.413	23,63
Ekuitas				
Ekuitas	46.294.000.266.444	46.710.647.659.719	(416.647.393.275)	(0,89)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	47.921.731.508.870	48.027.253.687.732	(105.522.178.862)	(0,22)

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

LO menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian secara wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp11.855.069.212.514,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp56.554.133.616.171,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp44.699.064.403.657,00. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp35.895.502.780,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp44.663.168.900.877,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp46.710.647.659.719,00 dikurangi penurunan Ekuitas selama tahun 2017 sebesar Rp416.647.393.275,00 sehingga Ekuitas entitas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp46.294.000.266.444,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

CaLK menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE. Termasuk dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian LRA untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, LO, dan LPE untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

5.1. Informasi penting Pelaksanaan anggaran

- Jumlah Satker Kemenkes TA 2017 sesuai DIPA yang terbit sebanyak 418 Satker dengan pagu anggaran sebesar Rp59.114.103.837.000,00 Selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kemenkes TA 2017.

Tabel 3
Anggaran dan Jumlah Satker Kemenkes 2017

No	Jenis Kewenangan	Jumlah Satker	Anggaran
1	Kantor Pusat (KP)	48	37.056.242.279.000
2	Kantor Daerah (KD)	166	20.991.160.182.000
3	Dekonsentrasi (DK)	204	1.066.701.376.000
Total		418	59.114.103.837.000

Selain itu Kementerian Kesehatan juga memiliki Satker yang sudah tidak aktif/tidak memperoleh DIPA pada tahun 2017 tetapi masih memiliki saldo yaitu Satker Tugas Pembantuan (TP) sebanyak 1.000 satker. Sehingga jumlah

keseluruhan Satker Kementerian Kesehatan baik aktif maupun inaktif berdasarkan e-Rekon & LK adalah 1.418 satker.

- b. Dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah, telah dilakukan proses registrasi, persetujuan rekening, dan usulan dana hibah untuk masuk DIPA dan telah diterbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) atas realisasi belanja hibah.

5.2. Informasi penting terkait Penyusunan Laporan Keuangan TA 2017 Audited

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja (Satker) seluruhnya telah dilakukan pelaporan secara berjenjang dengan uraian sebagai berikut :
 - Kantor Daerah (KD)
 - Satker Kantor Daerah → Wilayah → Eselon I → Kementerian Kesehatan
 - Kantor Pusat (KP)
 - Satker Kantor Pusat → Eselon I → Kementerian Kesehatan
 - Dekonsentrasi (DK)
 - Satker Dekonsentrasi → Eselon I → Kementerian Kesehatan
- b. Unit Akuntansi Wilayah Vertikal dibentuk dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/78/2016 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA/B-W) Vertikal Kemenkes.
- c. Unit Akuntansi tingkat Eselon I, pembentukannya menjadi tanggungjawab yang melekat bagi Pejabat Eselon I terkait untuk setiap tahun anggaran menetapkan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Eselon I (UAPPA/B-E1) dengan Keputusan Direktur Jenderal/Kepala Badan didasarkan pada Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
- d. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan tahun 2017 telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal yang mencakup seluruh jenjang pelaporan.
- e. Penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan, telah dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Perbendaharaan dan Pelayanan Negara (KPPN), Kanwil Perbendaharaan dan Ditjen Perbendaharaan melalui aplikasi e-Rekon-LK.
- f. Dalam proses pemutakhiran dan penatausahaan BMN di tingkat satker, telah dilakukan rekonsiliasi data BMN dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tata cara dan prosedur mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

5.3. Beberapa Peraturan yang Mendukung Penyusunan Laporan Keuangan Kemenkes TA 2017

- a. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- b. PMK Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- c. PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- d. PMK Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
- e. PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- f. PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
- g. PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- h. PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- i. PMK Nomor 14/PMK.09/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- j. Surat Direktur Barang Milik Negara Nomor S-504/KN/2017 tentang Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Barang Pengguna (LPB) Tahun 2016 (*Audited*);
- k. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Nomor S-5445/PB/2016 tentang Prosedur Pencatatan Pengembalian/Penyetoran Sisa Kas Hibah Langsung Uang (HLU) yang telah disahkan ke Kas Negara;
- l. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8533/PB/2017 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Triwulan III Komprehensif Tahun 2017;
- m. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-10590/PB/2017 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
- n. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-11819/PB/2017 tentang Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2017 *Unaudited* serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2017;
- o. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-64/PB/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Jadwal Pemeriksaan LKPP, LKBUN, dan LKKL Tahun 2017;
- p. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3383/PB/2018 tentang Petunjuk Koreksi Data Revaluasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2017;
- q. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-350/7PB/2018 tentang Penyampaian Nilai Koreksi atas Hasil Revaluasi BMN Tahun 2017.

5.4. Kemenkes telah Menerbitkan Peraturan dan Kebijakan untuk mendukung Penyusunan Laporan Keuangan Kemenkes TA 2017

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/558/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Menteri Kesehatan selaku pengguna barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/42/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.03.03/II/345/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 tentang Pelaksanaan Likuidasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- d. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.03.03/II/2037/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- e. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.03.03/III/2235/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- f. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor PS.02.01/II/4252/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Langkah-langkah Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN TA 2017.

5.5. Rekonsiliasi Internal

Telah dilakukan Rekonsiliasi Internal UAPB dengan UAPA Kementerian Kesehatan dengan cara membandingkan data Unit Akuntansi Barang dengan data yang disusun oleh Unit Akuntansi Keuangan untuk periode 31 Desember 2017, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4
Rekonsiliasi Internal antara SAIBA dan SIMAK BMN

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian	SAIBA	SIMAK-BMN	Selisih
117	Persediaan	3.443.123.902.754	3.519.757.698.550	(76.633.795.796)
131	Tanah	15.781.343.836.355	60.706.090.122.775	(44.924.746.286.420)
132	Peralatan Dan Mesin	30.298.593.008.907	30.298.593.008.907	-
133	Gedung Dan Bangunan	14.264.231.925.068	14.841.215.178.411	(576.983.253.343)
134	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	675.062.859.576	583.984.154.196	91.078.705.380
135	Aset Tetap Lainnya	253.351.060.234	253.351.060.234	-
136	KDP	3.379.500.085.896	3.379.500.085.896	-
162	ATB	230.678.798.039	230.678.798.039	-
166	Aset Lain-Lain	1.861.374.860.857	10.683.041.428.914	(8.821.666.568.057)
Total Selisih SAIBA-SIMAK BMN		70.187.260.337.686	124.496.211.535.922	(54.308.951.198.236)

Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui terdapat perbedaan total aset sebelum penyusutan yaitu SAIBA lebih rendah dari SIMAK-BMN sebesar Rp54.308.951.198.236,00 yang merupakan:

1. *Dropping* barang persediaan pengadaan satker pusat yang sudah diusulkan pemindahtanganan sehingga dikeluarkan dari Neraca SAIBA;
2. Aset Satker DK/TP Pengadaan sebelum tahun 2011 yang sudah dikeluarkan dari Neraca SAIBA dan direklas kedalam Aset Lain-Lain dalam Aplikasi SIMAK-BMN;

3. Aset Finansial yang tidak dicatat dalam Aplikasi SIMAK-BMN;
4. Hasil Revaluasi atas BMN pada tahun 2017 tidak disajikan dalam Neraca SAIBA LKKL Tahun 2017 Audited.

5.6. Koreksi dan Tindak lanjut Laporan Keuangan Kemenkes TA 2017

Terdapat beberapa perubahan/koreksi, baik oleh internal maupun Tim Pemeriksa BPK yang berdampak pada adanya penambahan dan pengurangan pada LRA, Neraca, LO, LPE dan CaLK Kemenkes per 31 Desember 2017.

a. Langkah-langkah koreksi:

Koreksi Laporan Keuangan dilakukan setelah penelusuran/konfirmasi/klarifikasi kepada satker terkait dan sudah dilakukan koreksi/penyesuaian pada tingkat satker serta disampaikan secara berjenjang sampai dengan tingkat kementerian.

b. Beberapa koreksi/penyesuaian yang dilakukan antara lain:

- 1) Realisasi PNPB mengalami koreksi penambahan pada Unit Eselon 1 Sekretariat Jenderal dan Ditjen P2P serta koreksi pengurangan pada Ditjen Yankes, seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 5
Koreksi atas Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNPB TA 2017
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Unit Eselon 1	Unaudited		Koreksi		Audited	
	Estimasi	Realisasi	Estimasi	Realisasi	Estimasi	Realisasi
SETJEN	11.347.525.000	74.164.216.025	0	25.857.600	11.347.525.000	74.190.073.625
ITJEN	0	158.159.089	0	0	0	158.159.089
DITJEN KESMAS	769.912.000	3.614.474.532	0	0	769.912.000	3.614.474.532
DITJEN YANKES	10.283.946.786.000	10.431.349.371.292	815.318.000	(18.599.653.618)	10.284.762.104.000	10.412.749.717.674
DITJEN P2P	182.865.437.580	342.632.405.618	0	365.000	182.865.437.580	342.632.770.618
DITJEN FARMALKES	27.622.000.000	46.784.426.815	0	0	27.622.000.000	46.784.426.815
BALITBANGKES	3.319.282.550	3.994.429.868	0	0	3.319.282.550	3.994.429.868
BADAN PPSDM KES	660.463.365.768	821.685.333.455	0	0	660.463.365.768	821.685.333.455
Jumlah	11.170.334.308.898	11.724.382.816.694	815.318.000	(18.573.431.018)	11.171.149.626.898	11.705.809.385.676

- 2) Alokasi/anggaran dan Belanja mengalami koreksi penambahan pada Unit Eselon 1 Ditjen Yankes dan Ditjen P2P, seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 6
Koreksi atas Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2017
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Unit Eselon 1	Unaudited		Koreksi		Audited	
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi
SETJEN	28.401.301.696.000	27.101.093.635.064	0	0	28.401.301.696.000	27.101.093.635.064
ITJEN	96.356.716.000	91.260.793.981	0	0	96.356.716.000	91.260.793.981
DITJEN KESMAS	1.683.826.592.000	1.583.592.382.628	0	0	1.683.826.592.000	1.583.592.382.628
DITJEN YANKES	17.085.800.054.000	15.251.618.256.029	770.645.000	(18.578.853.107)	17.086.570.699.000	15.233.039.402.922
DITJEN P2P	3.111.917.286.000	2.893.774.645.742	3.586.662.000	3.586.662.000	3.115.503.948.000	2.897.361.307.742
DITJEN FARMALKES	3.367.598.652.000	3.337.118.449.598	0	0	3.367.598.652.000	3.337.118.449.598
BALITBANGKES	740.867.129.000	637.518.138.839	0	0	740.867.129.000	637.518.138.839
BADAN PPSDM KES	4.622.078.405.000	4.031.297.395.133	0	0	4.622.078.405.000	4.031.297.395.133
Jumlah	59.109.746.530.000	54.927.273.697.014	4.357.307.000	(14.992.191.107)	59.114.103.837.000	54.912.281.505.907

- 3) Neraca, mengalami koreksi antara lain: Aset Lancar bertambah, Aset Tetap berkurang, Piutang Jangka Panjang berkurang, Aset Lainnya berkurang, Kewajiban Jangka Pendek bertambah dan Ekuitas berkurang, seperti yang terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 7
Koreksi atas Neraca per 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

Akun	31-Des-17		
	Unaudited	Koreksi	Audited
Aset			
Aset Lancar	8.211.551.766.226	534.526.755.479	8.746.078.521.705
Aset Tetap	86.052.892.289.552	(47.255.223.581.159)	38.797.668.708.393
Piutang Jangka Panjang	7.422.223.688	(31.376.048)	7.390.847.640
Aset Lainnya	415.677.650.647	(45.084.219.515)	370.593.431.132
Jumlah Aset	94.687.543.930.113	(46.765.812.421.243)	47.921.731.508.870
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek	1.519.301.454.361	108.429.788.065	1.627.731.242.426
Ekuitas	93.168.242.475.752	(46.874.242.209.308)	46.294.000.266.444
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	94.687.543.930.113	(46.765.812.421.243)	47.921.731.508.870

Koreksi Neraca per 31 Desember 2017 menurut Eselon 1, seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 8
Koreksi Neraca per 31 Desember 2017 Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Unit Eselon 1	Unaudited	Koreksi		Audited
		Debet	Kredit	
SETJEN	5.092.174.612.150	157.644.844.044	158.298.664.955	5.091.520.791.239
ITJEN	7.359.583.201	0	0	7.359.583.201
DITJEN KESMAS	349.102.663.759	165.484.812	200.303.952	349.067.844.619
DITJEN YANKES	62.867.285.262.778	538.596.865.887	45.784.071.875	63.360.098.056.790
DITJEN P2P	5.352.223.294.154	63.596.513.933	3.935.251.441	5.411.884.556.646
DITJEN FARMALKES	170.295.192.909	4.029.086.414	4.027.629.721	170.296.649.602
BALITBANG KES	914.251.170.331	0	54.618	914.251.115.713
BADAN PPSDM KES	19.934.852.150.831	99.322.485.286	6.372.292.429	20.027.802.343.688
KONSOLIDASI	0	253.294.542.174	47.663.843.974.802	(47.410.549.432.628)
Jumlah	94.687.543.930.113	1.116.649.822.550	47.882.462.243.793	47.921.731.508.870

- 4) LO mengalami koreksi/penyesuaian hasil audit berupa penambahan dan pengurangan terjadi pada semua Eselon 1 kecuali pada Inspektorat Jenderal, seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 9
Koreksi atas Laporan Operasional TA 2017 Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Unit Eselon 1	Unaudited	Koreksi		Audited
		Debet	Kredit	
SETJEN	(27.073.128.333.980)	9.290.346.921	7.580.532.334	(27.074.838.148.567)
ITJEN	(91.991.495.111)	-	-	(91.991.495.111)
DITJEN KESMAS	(1.740.871.729.696)	119.860.861	88.975.721	(1.740.902.614.836)
DITJEN YANKES	(6.826.672.194.033)	593.029.013.409	958.529.802.028	(6.461.171.405.414)
DITJEN P2P	(3.386.230.984.751)	3.708.385.048	155.828.565.854	(3.234.110.803.945)
DITJEN FARMALKES	(2.589.394.059.111)	229.346.325	14.769.193.263	(2.574.854.212.173)
BALITBANG KES	(638.100.573.871)	54.618	-	(638.100.628.489)
BADAN PPSDM KES	(2.962.636.708.765)	1.411.625.067	2.137.775.174	(2.961.910.558.658)
KONSOLIDASI	-	781.097.000	115.492.063.316	114.710.966.316
Jumlah	(45.309.026.079.318)	608.569.729.249	1.254.426.907.690	(44.663.168.900.877)

Ringkasan LO Kemenkes per 31 Desember 2017 hasil koreksi/penyesuaian audit seperti pada tabel berikut:

Tabel 10
Koreksi atas Laporan Operasional per 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

URAIAN	Unaudited	KOREKSI		Audited
		D	K	
KEGIATAN OPERASIONAL				
Jumlah Pendapatan Operasional	11.512.677.586.037	126.697.789.559	469.089.416.036	11.855.069.212.514
Jumlah Beban Operasional	56.866.492.196.537	384.694.377.120	697.052.957.486	56.554.133.616.171
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(45.353.814.610.500)	511.392.166.679	1.166.142.373.522	(44.699.064.403.657)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(237.677.523.764)	8.078.097.000	20.225.575.479	(225.530.045.285)
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	282.466.054.946	89.099.465.570	68.058.958.689	261.425.548.065
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	44.788.531.182	97.177.562.570	88.284.534.168	35.895.502.780
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(45.309.026.079.318)	608.569.729.249	1.254.426.907.690	(44.663.168.900.877)

Hasil koreksi LPE per 31 Desember 2017 menurut Unit Eselon 1, seperti pada tabel berikut:

Tabel 11
Koreksi atas Laporan Perubahan Ekuitas TA 2017 Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Unit Eselon 1	Unaudited	Koreksi		Audited
		Debet	Kredit	
SETJEN	5.088.647.554.718	11.515.483.861	9.683.159.710	5.086.815.230.567
ITJEN	7.359.583.201	-	-	7.359.583.201
DITJEN KESMAS	349.071.028.867	123.794.861	88.975.721	349.036.209.727
DITJEN YANKES	61.488.520.436.281	599.206.412.665	983.009.271.568	61.872.323.295.184
DITJEN P2P	5.332.912.750.850	113.812.429.793	173.473.412.569	5.392.573.733.626
DITJEN FARMALKES	168.290.098.562	14.773.362.913	14.774.819.606	168.291.555.255
BALITBANG KES	913.491.807.269	54.618	-	913.491.752.651
BADAN PPSDM KES	19.819.949.216.004	3.258.245.256	97.967.368.113	19.914.658.338.861
KONSOLIDASI	-	47.617.143.865.324	206.594.432.696	(47.410.549.432.628)
Jumlah	93.168.242.475.752	48.359.833.649.291	1.485.591.439.983	46.294.000.266.444

Ringkasan LPE per 31 Desember 2017 hasil koreksi/penyesuaian audit seperti pada tabel berikut:

Tabel 12
Koreksi atas Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

URAIAN	Unaudited	KOREKSI		Audited
		D	K	
EKUITAS AWAL (A)	46.710.647.659.719			46.710.647.659.719
SURPLUS/(DEFISIT) - LO (B)	(45.309.026.079.318)	608.569.729.249	1.254.426.907.690	(44.663.168.900.877)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI (C)	-	-	-	-
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	47.850.216.316.041	47.748.594.105.956	206.053.957.906	307.676.167.991
Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	95.072.163.374	-	17.797.658.414	112.869.821.788
Selisih Revaluasi Aset Tetap	47.432.305.840.042	47.616.458.650.124	184.152.810.082	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	131.882.261.968	24.578.470.498	4.099.613.170	111.403.404.640
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(15.795.630.283)	-	3.876.240	(15.791.754.043)
Koreksi Lain – lain	206.751.680.940	107.556.985.334	-	99.194.695.606
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (D)	43.916.404.579.310	2.669.814.086	25.110.574.387	43.938.845.339.611
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS (E = B + C + D)	46.457.594.816.033	48.359.833.649.291	1.485.591.439.983	(416.647.393.275)
EKUITAS AKHIR (F = A + E)	93.168.242.475.752	48.359.833.649.291	1.485.591.439.983	46.294.000.266.444

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN KESEHATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam rupiah)

URAIAN	REF.	TA 2017		%	TA 2016
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		11.171.149.626.898	11.705.809.385.676	104,79	10.650.421.987.370
JUMLAH PENDAPATAN		11.171.149.626.898	11.705.809.385.676	104,79	10.650.421.987.370
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1	6.436.175.130.000	4.801.082.279.310	74,60	6.632.108.148.885
Belanja Barang	B.2.2	23.604.695.236.000	21.711.803.822.374	91,98	20.795.758.286.293
Belanja Modal	B.2.3	3.570.833.471.000	2.981.598.351.223	83,50	4.768.351.966.206
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	25.502.400.000.000	25.417.797.053.000	99,67	24.814.983.852.125
JUMLAH BELANJA		59.114.103.837.000	54.912.281.505.907	92,89	57.011.202.253.509

II. NERACA

KEMENTERIAN KESEHATAN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam rupiah)

URAIAN	REF.	31 Desember 2017	31 Desember 2016	%
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	1.320.666.799	1.399.069.596	(5,60)
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	218.677.700	616.914.118	(64,55)
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	574.442.183.969	484.358.461.194	18,60
Kas pada BLU	C.4	2.243.446.441.759	2.350.139.199.167	(4,54)
Investasi Jangka Pendek-BLU	C.5	371.467.208.204	283.078.842.932	31,22
Belanja Dibayar Dimuka	C.6	90.593.929.623	114.879.203.713	(21,14)
Uang Muka Belanja	C.7	9.566.508.000	949.749.028	907,27
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.8	627.111.298	1.723.122.231	(63,61)
Piutang Bukan Pajak	C.9	41.694.452.251	28.597.016.130	45,80
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	(5.475.319.552)	(1.712.825.512)	219,67
Piutang Bukan Pajak (<i>Netto</i>)		36.219.132.699	26.884.190.618	34,72
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	C.11	1.394.732.983	629.935.089	121,41
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.12	(18.834.387)	(50.412.175)	(62,64)
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (<i>Netto</i>)		1.375.898.596	579.522.914	137,42
Piutang dari kegiatan Operasional BLU	C.13	2.366.739.177.023	2.009.415.810.944	17,78
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.14	(400.120.822.790)	(359.456.896.438)	11,31
Piutang dari kegiatan Operasional BLU (<i>Netto</i>)		1.966.618.354.233	1.649.958.914.506	19,19
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.15	13.165.815.819	4.092.738.621	221,69
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.16	(6.107.309.748)	(694.128.343)	779,85
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (<i>Netto</i>)		7.058.506.071	3.398.610.278	107,69
Persediaan	C.17	3.443.123.902.754	2.081.621.562.988	65,41
Persediaan BLU	C.18	-	811.944.539.615	(100,00)
JUMLAH ASET LANCAR		8.746.078.521.705	7.811.531.902.898	11,96
ASET TETAP				
Tanah	C.19	15.781.343.836.355	3.815.223.275.869	313,64
Tanah BLU	C.20	-	11.854.080.738.081	(100,00)
Peralatan dan Mesin	C.21	30.298.593.008.907	17.307.412.435.510	75,06
Peralatan dan Mesin BLU	C.22	-	11.878.424.542.927	(100,00)
Gedung dan Bangunan	C.23	14.264.231.925.068	5.253.077.149.711	171,54
Gedung dan Bangunan BLU	C.24	-	7.802.461.537.570	(100,00)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.25	675.062.859.576	177.359.729.434	280,62
Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU	C.26	-	438.244.547.193	(100,00)
Aset Tetap Lainnya	C.27	253.351.060.234	164.392.448.316	54,11
Aset Tetap Lainnya BLU	C.28	-	80.909.518.463	(100,00)
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	C.29	3.379.500.085.896	1.802.252.509.888	87,52
KDP BLU	C.30	-	1.685.746.111.723	(100,00)

URAIAN	REF.	31 Desember 2017	31 Desember 2016	%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.31	(25.854.414.067.643)	(22.490.122.582.907)	14,96
JUMLAH ASET TETAP		38.797.668.708.393	39.769.461.961.778	(2,44)
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan TP/TGR	C.32	7.228.460.378	1.813.179.303	298,66
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C.33	(172.208.207)	(62.008.956)	177,72
Piutang Tagihan TP/TGR (<i>Netto</i>)		7.056.252.171	1.751.170.347	302,94
Piutang Tagihan TP/TGR BLU	C.34	1.677.890.220	248.013.500	576,53
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR BLU	C.35	(1.444.347.918)	(5.206.698)	27.640,19
Piutang Tagihan TP/TGR BLU (<i>Netto</i>)		233.542.302	242.806.802	(3,82)
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.36	101.560.972	261.560.972	(61,17)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang lainnya	C.37	(507.805)	(1.307.805)	(61,17)
Piutang Jangka Panjang Lainnya (<i>Netto</i>)		101.053.167	260.253.167	(61,17)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		7.390.847.640	2.254.230.316	227,87
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud (ATB)	C.38	230.678.798.039	133.553.232.107	72,72
ATB-BLU	C.39	-	79.614.025.902	(100,00)
ATB Dalam Pengerjaan-BLU	C.40	-	776.543.200	(100,00)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.41	6.680.396.861	7.878.117.509	(15,20)
Aset Lain-lain	C.42	1.861.374.860.857	1.482.723.182.783	25,54
Aset Lain-lain-BLU	C.43	-	234.035.417.779	(100,00)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.44	(1.728.140.624.625)	(1.494.574.926.540)	15,63
JUMLAH ASET LAINNYA		370.593.431.132	444.005.592.740	(16,53)
JUMLAH ASET		47.921.731.508.870	48.027.253.687.732	(0,22)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	1.492.156.224.516	1.189.124.596.465	25,48
Hibah Yang Belum Disahkan	C.46	17.982.585.660	18.094.784.043	(0,62)
Pendapatan Diterima Dimuka	C.47	116.097.544.526	107.974.260.223	7,52
Uang Muka dari KPPN	C.48	1.320.666.799	1.399.069.596	(5,60)
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.49	174.220.925	13.317.686	1.208,19
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		1.627.731.242.426	1.316.606.028.013	23,63
JUMLAH KEWAJIBAN		1.627.731.242.426	1.316.606.028.013	23,63
EKUITAS				
Ekuitas	C.50	46.294.000.266.444	46.710.647.659.719	(0,89)
JUMLAH EKUITAS		46.294.000.266.444	46.710.647.659.719	(0,89)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		47.921.731.508.870	48.027.253.687.732	(0,22)

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN KESEHATAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam rupiah)

URAIAN	REF.	31 Desember 2017	31 Desember 2016	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN	D.1			
Pendapatan PNBP Lainnya		11.855.069.212.514	11.330.339.747.254	4,63
JUMLAH PENDAPATAN		11.855.069.212.514	11.330.339.747.254	4,63
BEBAN	D.2			
Beban Pegawai	D.2.1	9.106.857.216.579	10.356.791.122.766	(12,07)
Beban Persediaan	D.2.2	4.149.399.232.164	4.265.156.978.310	(2,71)
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	5.533.431.492.495	5.649.890.539.577	(2,06)
Beban Pemeliharaan	D.2.4	1.304.455.423.423	1.036.014.871.240	25,91
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	2.631.640.957.184	2.839.797.760.514	(7,33)
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.2.6	4.377.754.001.316	2.964.106.922.061	47,69
Beban Bantuan Sosial	D.2.7	25.418.433.302.000	24.814.347.603.125	2,43
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.8	3.979.505.775.907	4.275.703.136.645	(6,93)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.9	52.656.215.103	76.163.523.342	(30,86)
JUMLAH PENDAPATAN		56.554.133.616.171	56.277.972.457.580	0,49
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.3	(44.699.064.403.657)	(44.947.632.710.326)	(0,55)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR	D.4	(225.530.045.285)	(256.093.851.879)	(11,93)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.4.1	5.920.820.287	4.075.760.361	45,27
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.4.2	231.450.865.572	260.169.612.240	(11,04)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	D.5	261.425.548.065	206.697.694.279	26,48
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5.1	992.527.143.000	534.722.242.871	85,62
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5.2	731.101.594.935	328.024.548.592	122,88
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.6	35.895.502.780	(49.396.157.600)	(172,67)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(44.663.168.900.877)	(44.997.028.867.926)	(0,74)
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa		-	-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	D.7	(44.663.168.900.877)	(44.997.028.867.926)	(0,74)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN KESEHATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam rupiah)

URAIAN	REF.	31 Desember 2017	31 Desember 2016	%
EKUITAS AWAL	E.1	46.710.647.659.719	44.161.709.887.849	5,77
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(44.663.168.900.877)	(44.997.028.867.926)	(0,74)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi		-	-	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	307.676.167.991	796.698.134.526	(61,38)
Penyesuaian Nilai Aset		-	-	
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	112.869.821.788	192.970.413.971	(41,51)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.2	-	588.643.559.999	(100,00)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.3	111.403.404.640	(10.483.933.859)	(1.162,61)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	E.3.4	(15.791.754.043)	(91.813.839.928)	(82,80)
Koreksi Lain-lain	E.3.5	99.194.695.606	117.381.934.343	(15,49)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	43.938.845.339.611	46.749.268.505.270	(6,01)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(416.647.393.275)	2.548.937.771.870	(116,35)
EKUITAS AKHIR	E.5	46.294.000.266.444	46.710.647.659.719	(0,89)

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**A. PENJELASAN UMUM***Dasar Hukum***A.1. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2016;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
7. PMK Nomor 213/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat,
8. PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
9. PMK Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Standar;
10. PMK Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua;
11. PMK Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah pusat;
12. PMK Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat;
13. PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. PMK Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
15. PMK Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
16. PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat;
17. PMK Nomor 218/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK

- Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat;
18. PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 19. PMK Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat;
 20. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Operasi;
 21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/489/2014 tentang Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Kementerian Kesehatan;
 22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/42/2018 Tahun 2018 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 23. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
 24. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-369/KN/2017 tanggal 16 Februari 2017 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK Terkait Aset Tak Berwujud, Penyajian Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan, Persediaan dan Normalisasi Data BMN pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun 2016.

Rencana Strategis

A.2. Kebijakan Teknis Kementerian Kesehatan

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2015-2019

Dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, Kementerian Kesehatan menetapkan Rencana Strategis yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015.

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 - 2019 didasarkan pada visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong".

VISI MISI

Visi misi Kementerian Kesehatan mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong. Visi tersebut diwujudkan dengan 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

- a. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam pembangunan nasional 2015-2019, pemerintah akan mewujudkan TRISAKTI yang ditetapkan dalam 9 agenda prioritas (NAWACITA). Kementerian Kesehatan juga berperan serta dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui agenda prioritas kabinet kerja atau yang dikenal dengan Nawa Cita, sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pada agenda ke-5 NAWACITA akan dicapai melalui Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat dan Program Indonesia Kerja serta Program Indonesia Sejahtera.

Gambar 1
Program Indonesia Sehat



Program Indonesia Sehat adalah upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Program Indonesia Sehat terdiri atas 3 (tiga) pilar yaitu:

1. Paradigma Sehat;
2. Penguatan Yankes melalui Peningkatan AKSES dan MUTU Pelayanan kesehatan pada masyarakat dan Penguatan Sistem Rujukan; dan
3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Gambar 2
3 Pilar Program Indonesia Sehat



Pilar 1. Paradigma Sehat

Paradigma sehat merupakan upaya Kementerian Kesehatan untuk merubah pola pikir *stakeholder* dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, dengan peningkatan upaya promotif – preventif, pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga, peningkatan keterlibatan lintas sektor dan gerakan masyarakat

hidup sehat.

Pilar 2. Penguatan Pelayanan Kesehatan

Penguatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menjamin keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengacu pada 3 (tiga) hal penting sebagai berikut:

1. Peningkatan akses terutama pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Optimalisasi Sistem Rujukan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
2. Penerapan pendekatan *continuum of care*;
3. Intervensi berbasis resiko kesehatan (*health risk*).

Pilar 3. Jaminan Kesehatan Nasional

Program JKN ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik Penerima Bantuan Iuran (PBI) ataupun Non-PBI. Dalam pengembangan JKN ini Kementerian Kesehatan fokus pada pengembangan *benefit package*, menggunakan sistem pembiayaan asuransi dengan azas gotong royong, serta melakukan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan 2015-2019, secara keseluruhan maka diperlukan integrasi program dan kegiatan, dimana program prioritas difokuskan kepada 4 (empat) program, yakni:

1. Penurunan AKI dan AKB (Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Imunisasi);
2. Perbaikan Gizi khususnya *stunting*;
3. Pengendalian Penyakit Menular (AIDS, Tuberkulosis dan Malaria);
4. Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Obesitas dan Kanker).

Adapun program lainnya:

1. Prioritas kegiatan diutamakan ke promotif & preventif, termasuk kegiatan pro-aktif menjangkau sasaran ke luar gedung Puskesmas;
2. Fokus utama pada pelayanan kesehatan dasar (*Primary Care*);
3. Menjangkau sasaran utamanya dengan pendekatan keluarga.

Ketiga program ini akan berintegrasi dan sinergis dalam mendukung pelaksanaan program prioritas tersebut.

TUGAS DAN FUNGSI

Kementerian Kesehatan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- e. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

TUJUAN

Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu:

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat, dan
2. Meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (*impact* atau *outcome*). Dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.000 kelahiran hidup (SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012);
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup;
3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%;
4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif; dan
5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan, maka ukuran yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%;
2. Meningkatnya indeks *responsiveness* terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00.

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi pembangunan kesehatan 2005-2025 adalah:

- a. Pembangunan nasional berwawasan kesehatan;
- b. Pemberdayaan masyarakat dan daerah;
- c. Pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan;
- d. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; dan
- e. Penanggulangan keadaan darurat kesehatan.

Dalam RPJMN 2015-2019, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 13
Sasaran Pembangunan Kesehatan pada RPJMN 2015-2019

No.	Indikator	Status Awal	Target 2019
1 Meningkatkan Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat			
a	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	346 (SP2010)	306
b	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	32 (2012/2013)	24
c	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)	19,6 (2013)	17
d	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)	32,9 (2013)	28
2 Meningkatkan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular			
a	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	297 (2013)	245
b	Prevalensi HIV (persen)	0,46 (2014)	<0,50
c	Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria	212 (2013)	300
d	Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	25,8 (2013)	23,4
e	Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	15,4 (2013)	15,4
f	Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun	7,2 (2013)	5,4
3 Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan			
a	Jumlah kecamatan Yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	0 (2014)	5.600
b	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	10 (2014)	481
c	Presentase kabupaten/ kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	71,2 (2013)	95
4 Meningkatkan Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat Serta Sumber Daya Kesehatan			
a	Persentase kepesertaan SJSN Kes (%) ((persenn	51,8 (Oktober 2014)	Min 95
b	Jumlah Puskes masyang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	1.015 (2013)	5.600
c	Persentase RSU kabupaten/ kota kelas C yang memiliki tujuh dokter spesialis	25 (2013)	60
d	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	75,5 (2014)	90
e	Persentase obat yang memenuhi syarat	92 (2014)	94

Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (*Primary Health Care*) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Kartu Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor kesehatan dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif.

Strategi pembangunan kesehatan 2015-2019 meliputi:

- a. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas;
- b. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat;
- c. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- d. Meningkatkan akses yankes dasar yang berkualitas;
- e. Meningkatkan akses yankes rujukan yang berkualitas;
- f. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan;

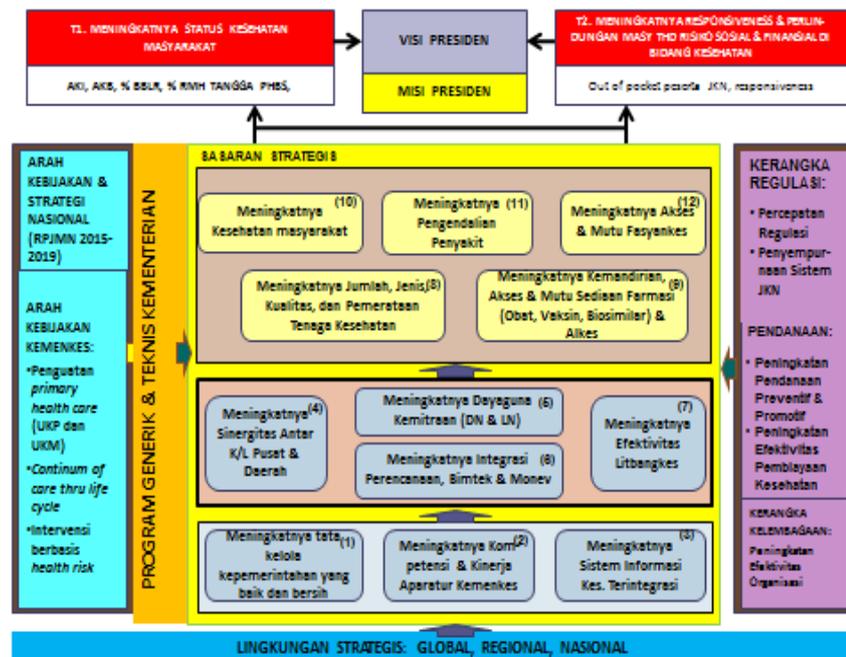
- g. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan;
- h. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan;
- i. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Menguatkan manajemen, litbang dan sistem informasi;
- k. Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan;
- l. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan.
- m. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan.

2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam RPJMN 2015-2019. Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang efektif dan efisien maka yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus dan fokus kegiatan, kesehatan, pembangunan kesehatan.

Untuk mencapai tujuan Kementerian Kesehatan maka ditetapkan strategi Kementerian Kesehatan yang disusun seperti pada Peta Strategi Kementerian Kesehatan 2015-2019.

Gambar 3
Peta Strategi Kementerian Kesehatan 2015-2019



Arah kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada tiga hal penting yakni:

1) Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (*Primary Health Care*)

Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis upaya yaitu:

- a. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat;
- b. Melaksanakan upaya kesehatan masyarakat;
- c. Melaksanakan upaya kesehatan perorangan;
- d. Memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan.

Untuk penguatan fungsi tersebut, perlu dilakukan Revitalisasi Puskesmas, dengan fokus pada 5 hal, yaitu:

- a. Peningkatan SDM;
- b. Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen Puskesmas;
- c. Peningkatan pembiayaan;
- d. Peningkatan Sistem Informasi Puskesmas (SIP); dan
- e. Pelaksanaan akreditasi Puskesmas.

Peningkatan sumber daya manusia di puskesmas diutamakan untuk ketersediaan 5 jenis tenaga kesehatan yaitu: tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kefarmasian dan analis kesehatan. Upaya untuk mendorong tercapainya target pembangunan kesehatan nasional, terutama melalui penguatan layanan kesehatan primer, Kementerian Kesehatan mengembangkan program Nusantara Sehat. Program ini menempatkan tenaga kesehatan di tingkat layanan kesehatan primer dengan metode *team-based*.

Kemampuan manajemen puskesmas diarahkan untuk meningkatkan mutu sistem informasi kesehatan, mutu perencanaan di tingkat Puskesmas dan kemampuan teknis untuk pelaksanaan deteksi dini masalah kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pemantauan kualitas kesehatan lingkungan.

Pengembangan sistem informasi kesehatan di puskesmas diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi masalah kesehatan dan capaian pembangunan kesehatan yang dilakukan secara tepat waktu dan akurat.

Pelaksanaan akreditasi puskesmas dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan difokuskan pada daerah yang menjadi prioritas pembangunan kesehatan.

Dalam penguatan puskesmas, yang dimaksud dengan penguatan puskesmas adalah penyiapan tenaga kesehatan dan sistem kesehatan untuk memastikan *health service readiness*.

2) Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (*Continuum Of Care*)

Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu,

dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.

3) Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan

Program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan. Strategi Kemenkes disusun sebagai jalinan strategi dan tahapan-tahapan pencapaian tujuan Kementerian Kesehatan baik yang tertuang dalam tujuan 1 (T1) maupun tujuan 2 (T2). **Tujuan Kementerian Kesehatan diarahkan dalam rangka pencapaian visi misi Presiden.** Untuk mewujudkan kedua tujuan tersebut Kementerian Kesehatan perlu memastikan bahwa terdapat dua belas sasaran strategis yang harus diwujudkan sebagai arah dan prioritas strategis dalam lima tahun mendatang. Ke dua belas sasaran strategis tersebut membentuk suatu hipotesis jalinan sebab-akibat untuk mewujudkan tercapainya T1 dan T2.

3. KERANGKA REGULASI

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Perubahan dan penyusunan regulasi disesuaikan dengan tantangan global, regional dan nasional. Kerangka regulasi diarahkan untuk:

- a. Penyediaan regulasi dari turunan undang-undang yang terkait dengan kesehatan;
- b. Meningkatkan pemerataan sumber daya manusia kesehatan;
- c. Pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan;
- d. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan;
- e. Penguatan kemandirian obat dan alkes;
- f. Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional yang lebih bermutu;
- g. Penguatan peran pemerintah di era desentralisasi; dan
- h. Peningkatan pembiayaan kesehatan.

Kerangka regulasi yang akan disusun antara lain adalah perumusan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri yang terkait, termasuk dalam rangka menciptakan sinkronisasi, integrasi penyelenggaraan pembangunan kesehatan antara pusat dan daerah.

4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Desain organisasi yang dibentuk memperhatikan mandat konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, perkembangan dan tantangan lingkungan strategis di bidang pembangunan kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, pergeseran dalam wacana pengelolaan pemerintahan (*governance issues*), kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, dan prinsip reformasi birokrasi (penataan kelembagaan yang efektif dan efisien). Fungsi pemerintahan yang paling mendasar adalah melayani

kepentingan rakyat.

Kementerian Kesehatan akan membentuk pemerintahan yang efektif melalui desain organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*), menghilangkan tumpang tindih tugas dan fungsi dengan adanya kejelasan peran, tanggung jawab dan mekanisme koordinasi (secara horisontal dan vertikal) dalam menjalankan program-program Renstra 2015-2019.

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Memperhatikan rancangan awal RPJMN 2015-2019, visi dan misi, tujuan, strategi dan sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah target kinerja dan kerangka pendanaan program-program 2015-2019. Program Kemenkes ada dua yaitu program generik dan program teknis.

Program generik meliputi:

- a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
- b. Program penguatan pelaksanaan JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS);
- c. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan; dan
- d. Program penelitian dan pengembangan kesehatan.

Program teknis meliputi:

- a. Program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak;
- b. Program pengendalian penyakit dan penyehatan dan lingkungan;
- c. Program pembinaan upaya kesehatan;
- d. Program kefarmasian dan alat kesehatan; dan
- e. Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2019. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2019.

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran program dukungan manajemen dan program teknis lainnya adalah dukungan dan program teknis kementerian kesehatan. Indikator pencapaian sasaran adalah harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebanyak 92.

2. Program Penguatan Pelaksanaan JKN

Sasaran Program adalah menguatnya pelaksanaan JKN/KIS.

Indikator tercapainya sasaran adalah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui JKN/KIS sebanyak 99,6 juta jiwa.

Sasaran kegiatan ini adalah dihasilkannya bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah pengembangan pembiayaan kesehatan JKN/KIS.

3. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

Sasaran program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur adalah meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi. Indikator tercapainya sasaran adalah persentase satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara $\leq 1\%$ sebesar 91%.

4. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Sasaran Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat.

5. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta meningkatnya kesehatan jiwa.

6. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Sasaran program pembinaan pelayanan kesehatan adalah meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

7. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan mutu dan alat kesehatan.

8. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sasaran program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan adalah kegiatan ini adalah meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

9. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Sasaran program penelitian dan pengembangan kesehatan adalah meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang kesehatan.

KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan meliputi peningkatan pendanaan dan efektifitas pendanaan. Peningkatan pendanaan kesehatan dilakukan melalui peningkatan proporsi anggaran kesehatan secara signifikan sehingga mencapai 5% dari APBN pada tahun 2019. Peningkatan pendanaan kesehatan juga melalui dukungan dana dari pemerintah daerah, swasta dan masyarakat serta sumber dari tarif/pajak maupun cukai. Guna meningkatkan efektifitas pendanaan pembangunan kesehatan maka perlu mengaktifkan peran dan kewenangan pusat-daerah, sinergitas

pelaksanaan pembangunan kesehatan pusat-daerah dan pengelolaan DAK yang lebih tepat sasaran.

Capaian Dua Tahun Kerja Nyata untuk Mewujudkan Indonesia Sehat

Pembangunan kesehatan harus dilakukan dengan pendekatan komprehensif, dengan mengacu pada visi misi Presiden. Visi Presiden adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. upaya untuk mewujudkan visi ini dilakukan melalui 7 misi pembangunan, dimana pada misi ke-4 adalah mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

Dalam pembangunan nasional 2015-2019 juga dibangun kemandirian di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian dalam budaya yang dikenal dengan Trisakti. Untuk mewujudkannya, ditetapkan 9 agenda prioritas (Nawacita), dimana pada agenda ke-5 dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan dicapai melalui Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat dan Program Indonesia Sejahtera.

Program Indonesia sehat memiliki 3 komponen yaitu:

- a. Revolusi mental masyarakat agar memiliki paradigma sehat;
- b. Penguatan Pelayanan Kesehatan; dan
- c. Mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia antara lain:
 - 1) Paradigma sehat meliputi:
 - 2) pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan,
 - 3) promotif - preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan
 - 4) pemberdayaan masyarakat
 - 5) Penguatan Pelayanan Kesehatan
 - 6) Peningkatan Akses terutama pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
 - 7) Optimalisasi Sistem Rujukan
 - 8) Peningkatan Mutu
 - 9) JKN
 - 10) Benefit
 - 11) Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong
 - 12) Kendali Mutu & Kendali Biaya
 - 13) Sasaran: PBI & Non PBI

Semangat membangun dari pinggiran tercermin dalam upaya penguatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK), Kemenkes memiliki terobosan untuk menempatkan tenaga kesehatan secara tim yang kita namakan program Nusantara Sehat (NS). Sedangkan penguatan upaya kesehatan berbasis masyarakat melalui pendekatan keluarga juga terus diupayakan, ini yang disebut dengan Program Keluarga Sehat.

Gambar 4
Menkes Nila F. Moeloek pada Acara Temu Media 2 Tahun Kerja Nyata Jokowi JK, di Bina Graha, Jakarta



*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Kesehatan. Berdasarkan kebijakan Kementerian Kesehatan tahun 2016, satker Tugas Pembantuan (TP), secara penganggaran dialihkan ke Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan TA 2017 tidak lagi menyajikan anggaran yang berasal dari satker TP.

Kementerian Kesehatan tahun 2017 memperoleh APBN sebesar Rp59.114.103.837.000,00 didistribusikan kepada 418 Satker meliputi:

- Kantor Pusat (KP) 48 Satker: Rp37.056.242.279.000,00
- Kantor Daerah (KD) 166 Satker: Rp20.991.160.182.000,00
- Dekonsentrasi (DK) 204 Satker: Rp1.066.701.376.000,00

Rincian Satuan kerja Kementerian Kesehatan tahun 2017 yang memperoleh APBN menurut jenis kewenangan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 14
Rekapitulasi Satker Menurut Eselon 1

Kode Esln I	Uraian	Jeni-Jenis Kewenangan						Jumlah Satker
		KP		KD		DK		
		M	BM	M	BM	M	BM	
01	Sekretariat Jenderal	13		0		34		47
02	Inspektorat Jenderal	1		0		0		1
03	Ditjen Kesmas	6		3		34		43
04	Ditjen Yankes	6		49		34		89
05	Ditjen P2P	6		59		34		99
07	Ditjen Farmalkes	6		0		34		40
11	Badan Litbang Kes.	5		11		0		16
12	Badan PPSDM Kes.	5		44		34		83
TOTAL		48	0	166	0	204	0	418

Keterangan: M = Melapor, BM = Belum Melapor

*Basis Akuntansi***A.4. Basis Akuntansi**

Kementerian Kesehatan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, LO, dan LPE serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian LRA. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar***A.5. Dasar Pengukuran***Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Kesehatan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan Akuntansi***A.6. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2017 telah mengacu pada SAP, dengan menggunakan aplikasi e-Rekon-LK. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas, seluruh unit akuntansi instansi Kementerian Kesehatan agar melakukan pencatatan, pembukuan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan barang dengan berpedoman:

1. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
3. PMK Nomor 213/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
4. PMK Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU;
5. PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan

- Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 7. PMK Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. PMK Nomor 218/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat;
 9. PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
 10. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8533/PB/2017 tentang Penyusunan LKKL Triwulan III Komprehensif Tahun 2017;
 11. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-11819/PB/2017 tentang Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2017 *Unaudited* serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2017;
 12. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-10590/PB/2017 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
 13. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3383/PB/2018 tentang Petunjuk Koreksi Data Revaluasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2017;
 14. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-350/7PB/2018 tentang Penyampaian Nilai Koreksi atas Hasil Revaluasi BMN Tahun 2017.

Selain berpedoman pada ketentuan di atas, untuk beberapa transaksi keuangan dan barang pada Kementerian Kesehatan telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang bersifat khusus antara lain:

1. Dana Jamkesmas

Untuk sisa dana Jamkesmas TA 2013 yang belum disetor ke Kas Negara telah disajikan dalam Laporan Keuangan **Satker Setditjen Pelayanan Kesehatan** selaku pengelola DIPA.

Informasi sisa dana Jamkesmas TA 2013 yang belum disetor ke Kas Negara berupa (nama Institusi pemberi pelayanan kesehatan dan nilainya) diperoleh dari data rincian saldo pada Laporan Keuangan TA 2016 (*Audited*) yang pada tahun 2017 belum disetorkan ke Kas Negara atau dokumen sumber SSBP (sebagai bahan input) belum diterima pada Satker Setditjen Yankes.

Satker penyalur dana Jamkesmas pada Satker Setditjen Yankes dengan Kode Satker 466080, dan menyampaikan bukti setor SSBP atau kode biling dari aplikasi Sistem Informasi PNB *Online* (SIMPONI), atas bukti setor tersebut diserahkan kepada unit eselon 1 untuk dilakukan rekonsiliasi dengan data SPAN pada Direktorat Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan (DAPK) Kementerian Keuangan. Terhadap perbedaan antara data SPAN dan SAI maka unit eselon 1 dapat menggunakan data hasil rekonsiliasi sebagai bahan penelusuran dokumen sumber kepada pihak penyeter atau KPPN setempat. Hasilnya agar *di-entry* oleh Satker terkait.

Pengembalian Dana Jamkesmas Tahun 2013 dicatat sebagai setoran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL) yang akan disajikan dalam LRA dan LO sebagai pendapatan non operasional.

2. Dana Gaji dan Insentif Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Dengan memperhatikan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-29/PB/2007 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Insentif Pegawai Tidak Tetap, maka terhadap Gaji dan Insentif PTT untuk bulan desember tahun berjalan yang telah dicairkan dari KPPN tetapi per 31 desember belum dibayarkan pada tahun berjalan, harus dicatat dan disajikan pada neraca.

Dalam hal terdapat gaji dan Insentif PTT tahun berjalan yang belum dibayarkan per 31 desember karena belum diterbitkan SPM/SP2Dnya sehingga belum ada realisasi dari kas negara, maka **Satker Biro Umum** harus mencatat sebagai Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada neraca. Belanja Pegawai YMH dibayar tersebut dicatat sebesar nilai terutang yang besarnya ditetapkan dan ditandatangani oleh KPA (Kepala Biro Umum).

3. Tunjangan Kinerja Pegawai

Dengan memperhatikan Peraturan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan, maka terhadap Tunjangan Kinerja Pegawai untuk bulan desember tahun berjalan, yang dananya telah dicairkan dari KPPN tetapi per 31 desember belum dibayarkan pada tahun berjalan, harus dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada neraca.

Dalam hal terdapat Tunjangan Kinerja Pegawai tahun berjalan yang belum dibayarkan per 31 Desember, maka **Satker Biro Umum Setjen, dan/atau Satker Unit Eselon 1 terkait** harus mencatat sebagai Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar pada neraca.

Belanja Pegawai YMH dibayar tersebut dicatat sebesar nilai terutang yang besarnya ditetapkan dan ditandatangani oleh KPA.

4. Setoran PNBPN yang dilakukan oleh Satker dan Pihak ketiga

Setoran PNBPN yang dilakukan oleh Satker dan Pihak ketiga merupakan pendapatan yang masih menjadi hak Kementerian Kesehatan. PNBPN tersebut didasarkan pada bukti setor SSBPN yang telah mendapat nomor validasi dari Bank Persepsi dengan penerbitan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2015, sedangkan mulai 1 Januari 2016 setoran menggunakan kode *billing* dari aplikasi SIMPONI.

5. Setoran Jasa Giro dan Pengembalian Dana Jamkesmas

Seluruh PNBPN atas Setoran Jasa Giro dan Pengembalian Dana Jamkesmas Tahun 2013, termasuk setoran pengembalian belanja TAYL dan setoran-setoran lainnya harus dicatat dan disajikan dalam

LRA dan LO sebagai pendapatan non operasional. Satker penyalur dana Jamkesmas pada Satker Setditjen Yankes dengan Kode Satker 466080, dan menyampaikan bukti setor SSBP atau kode *billing* dari aplikasi SIMPONI, atas bukti setor tersebut diserahkan kepada Unit Eselon 1 untuk dilakukan rekonsiliasi dengan data SAU pada DAPK Kementerian Keuangan. Terhadap perbedaan antara data SAU dan SAI maka Unit Eselon 1 dapat menggunakan data hasil rekonsiliasi sebagai bahan penelusuran dokumen sumber kepada pihak penyeter atau KPPN setempat. Hasilnya agar *di-entry* oleh satker terkait.

6. Pengembalian Gaji PTT

Setoran pengembalian dana gaji Dokter/Bidan PTT, yang berasal dari pengembalian belanja TAYL maupun pengembalian belanja tahun berjalan yang disetorkan oleh Dinas Kab/Kota/Dokter/Bidan PTT terkait, disetorkan dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan menggunakan Kode Satker Biro Umum (465930). Untuk pengembalian belanja atas Dokter/Bidan PTT tahun berjalan yang disetorkan oleh Dinas Kab/Kota/Dokter/Bidan disetorkan dengan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dengan menggunakan Kode Satker Biro Umum (465930).

Dokumen SSBP maupun SSPB dan menyampaikan bukti setor SSBP atau kode biling dari aplikasi SIMPONI dan disampaikan ke Satker Biro Umum untuk dibukukan sebagai “**Pendapatan Lain-lain**” atau “**Pengembalian Belanja**” pada LRA dan “**Pendapatan Non Operasional**” atau “Beban Non Operasional” pada LO pada Laporan Keuangan Satker Biro Umum.

7. Satker Vertikal Pemungut PNBP dan penggunaan akun PNBP

Melakukan langkah-langkah penyelesaian antara lain:

- a. Satker Vertikal pemungut dan pengguna PNBP agar mencantumkan Estimasi Pendapatannya dalam DIPA. Apabila masih terdapat Satker yang belum mencantumkan Estimasi PNBP, segera melakukan revisi DIPA sesuai ketentuan melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat;
- b. Memperhatikan Perdirjen Nomor PER-80/PB/2011, pendapatan BLU hasil pemanfaatan dana seperti bunga/jasa giro atas dana PNBP BLU, agar dicatat sebagai “Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Lainnya” pada akun “424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU”;
- c. Estimasi dan realisasi PNBP Satker Non BLU menggunakan akun “423 Pendapatan PNBP Lainnya”. Akun PNBP secara rinci (6 digit) dapat dilihat pada Lampiran tentang BAS “LRA”. Apabila masih terdapat transaksi PNBP yang belum tertampung pada BAS sesuai pedoman ini, agar dilihat pada tabel referensi dalam aplikasi SAIBA. Jika belum ada pada tabel referensi agar berkonsultasi dengan KPPN/Dit. APK/Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan.

8. Penyajian Saldo Piutang dalam Neraca

Berdasarkan jenisnya, Piutang dibedakan menjadi :

- a. Piutang PNBP berdasarkan pungutan pendapatan negara yang didukung adanya **Surat Penagihan**, meliputi:
 - 1) Piutang hasil pendapatan jasa pelayanan rumah sakit dan kesehatan lainnya;
 - 2) Piutang hasil pelayanan pendidikan;
 - 3) Piutang pendapatan Lainnya.
- b. Piutang PNBP berdasarkan perikatan, dalam bentuk pemanfaatan fasilitas/jasa milik Kementerian Kesehatan yang didukung **naskah perjanjian sewa-menyewa**, berupa:
 - 1) Penyewaan Gedung Kantor;
 - 2) Penyewaan Rumah Dinas.
- c. Piutang PNBP karena TP/TGR, yang didukung dengan bukti, berupa:
 - 1) **Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)**, untuk TP/TGR yang penyelesaiannya dilakukan secara damai;
 - 2) **Surat Ketetapan** yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, untuk TP/TGR yang penyelesaiannya dilakukan melalui jalur pengadilan.

Terhadap TP-TGR yang belum didukung SKTJM atau Surat Ketetapan, tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

9. Penyajian Saldo Utang dalam Neraca

- a. **Utang kepada pihak ketiga** adalah utang yang timbul dari kegiatan operasional (pelayanan rumah sakit dan kesehatan lainnya, dan pelayanan pendidikan) terdiri dari: belanja yang masih harus dibayar, honor, dll. Utang kepada pihak ketiga dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diterima dari pihak ketiga tetapi belum dilakukan pembayaran. Pencatatan di neraca dilakukan secara periodik pada akhir periode pelaporan.
- b. **Pendapatan diterima dimuka** adalah merupakan penerimaan dari pihak lain (mahasiswa, pasien, vendor, STR dokter/dokter gigi/apoteker/bidan dll) sebagai pembayaran jasa tetapi Satker belum memberikan pelayanan. Pendapatan diterima dimuka dicatat sebesar nilai kas yang diterima tetapi belum memberikan barang/jasa kepada pihak lain. Pencatatan di neraca dilakukan secara periodik pada akhir periode pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku (sampai sekarang masih pada akhir tahun saja).

Pada akhir periode pelaporan untuk mencatat pendapatan yang telah menjadi hak selama periode pelaporan dan untuk menyesuaikan jumlah Pendapatan Diterima di Muka yang masih ada sampai dengan akhir periode pelaporan.

10. Penatausahaan dan Penyisihan Piutang PNBP

- a. Penatausahaan Piutang PNBP agar mengacu pada:

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;

- b. Penyisihan Piutang PNBP dilakukan terhadap nilai piutang yang disajikan dalam Neraca. Penyisihan Piutang PNBP mengacu pada PMK Nomor 201/PMK.06/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
- c. Penagihan, penyisihan dan penghapusan piutang Kementerian Kesehatan mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/X/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Kementerian Kesehatan.

11. Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa yang diperoleh dari Pihak Ketiga

Untuk kebutuhan penyusunan laporan keuangan, Satker penerima hibah langsung agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Hibah Langsung Uang/Barang/Jasa Satker Non BLU mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah

Hibah Uang:

- 1) Penggunaan hibah langsung bentuk Uang/Barang/Jasa yang diterima dari pihak ketiga pengesahannya agar mengikuti ketentuan dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga;
- 2) Berdasarkan BAST maka satker melakukan penginputan secara manual dalam aplikasi SAIBA;
- 3) Setelah Disahkan, berdasarkan dokumen SP2HL dan SPHL yang sudah dientry maka akan terbentuk jurnal secara otomatis pada aplikasi SAIBA;
- 4) Dalam hal sampai dengan akhir tahun masih terdapat saldo hibah yang telah disahkan namun belum dipakai seluruhnya untuk membiayai pengeluaran maka di Buku Besar Akrual/Neraca akan muncul dalam aplikasi SAIBA;

Untuk sisa dana hibah berupa mata uang selain rupiah agar dikonversi dengan nilai rupiah menggunakan kurs tengah BI per tanggal pelaporan.

Hibah Barang:

- 1) Berdasarkan BAST dan register dari DJPU maka pada SAIBA di input dalam aplikasi SAIBA.
- 2) Berdasarkan BAST dan register dari DJPU maka diinput dalam aplikasi Persediaan/SIMAK BMN;

- 3) Berdasarkan Persetujuan MPHL BJS maka diinput dalam aplikasi SAIBA.

Hibah Jasa:

- 1) Berdasarkan BAST dan register dari DJPU maka pada SAIBA diinput dalam aplikasi SAIBA;
- 2) Berdasarkan Persetujuan MPHL BJS maka pada diinput dalam aplikasi SAIBA.

b. Hibah Uang/Barang/Jasa Satker BLU mengikuti ketentuan dalam pengelolaan BLU

1) Hibah berbentuk uang

Satker BLU yang menerima hibah berbentuk uang mencatat hibah tersebut sebagai pendapatan Satker BLU bukan sebagai pendapatan BA 999.02 (Pengelola Hibah) sehingga tidak perlu melakukan registrasi hibah kepada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Dalam hal BLU menggunakan pendapatan hibah tersebut untuk mendanai pengeluaran belanja, Satker BLU melakukan revisi DIPA (jika pagu atas belanja terkait sudah terlampaui, tidak ada atau kurang). Selanjutnya pendapatan dan realisasi belanja yang di danai dari hibah di cantumkan dalam surat SP3B dan disampaikan kepada KPPN untuk mendapat pengesahan menjadi SP2B.

2) Hibah berbentuk barang

Satker BLU yang menerima hibah berbentuk Barang mencatat hibah tersebut sebagai pendapatan Satker BLU dan tidak perlu melakukan revisi DIPA sesuai Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-6332/PB/2015 tanggal 28 Juli 2015 dan tidak dilaporkan dalam LRA melainkan hanya dilaporkan dalam LO.

3) Hibah berbentuk Jasa

Satker BLU yang menerima hibah berbentuk Jasa mencatat hibah tersebut sebagai pendapatan Satker BLU dan tidak perlu melakukan revisi DIPA sesuai Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-6332/PB/2015 tanggal 28 Juli 2015 dan tidak dilaporkan dalam LRA melainkan hanya dilaporkan dalam LO.

12. Pengakuan, Pencatatan dan Pelaporan Barang Persediaan

- a. Pembukuan Persediaan yang diperoleh dari APBN dilakukan pada Aplikasi Persediaan-sub sistem SIMAK-BMN oleh Satker yang mengadakan persediaan;
- b. Pengalihan/Hibah BMN (Aset tetap dan Persediaan) Kemenkes kepada SKPD/pihak lain tanpa memperoleh penggantian mengacu pada PMK Nomor 111/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN;
- c. Penyerahan Pengalihan/hibah BMN tersebut dibuktikan dengan penandatanganan BAST sementara antara kedua belah pihak.

BMN tersebut masih dicatat dan dilaporkan oleh Satker yang mengadakan/mengirimkan sampai dengan diterbitkannya persetujuan hibah dari pengelola barang dan surat keputusan penghapusan dari pengguna barang;

- d. Setiap perubahan/mutasi BMN dan koreksi nilai BMN harus didasarkan BAST, dokumen kepemilikan, memo penyesuaian dan dokumen lainnya yang sah;
- e. Satker RS BLU dapat membukukan barang Persediaan Farmasi menggunakan Aplikasi Persediaan Farmasi selain Aplikasi Persediaan-SIMAK-BMN yang dikeluarkan oleh Kemenkeu;
- f. Pelaporan barang persediaan Satker RS BLU pada setiap periode pelaporan wajib disajikan melalui Aplikasi Persediaan, Aplikasi Penghubung (*Bridging*) dan SIMAK-BMN sesuai dengan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Nomor S-6575/PB/2017 tentang Tanggapan atas Permohonan Rekomendasi Penggunaan Aplikasi Penghubung (*Bridging*);
- g. Dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual, ditetapkan terhadap semua satker untuk menggunakan metode harga perolehan terakhir dalam penilaian semua jenis persediaan. Metode harga perolehan terakhir ini telah diakomodasi oleh aplikasi persediaan yang digunakan dalam menyusun Laporan Keuangan sesuai surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-1311/PB.06/2016 tentang Metode Penilaian dalam Rangka Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

13. Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Jika Satker mempunyai KDP berbentuk fisik, penghapusan KDP tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang. Dalam hal KDP yang tidak berbentuk fisik seperti: dokumen perencanaan, honor, dll, penghapusan KDP tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari Pengelola Barang, cukup dengan surat pernyataan KPA yang menginformasikan bahwa pembangunan fisik tidak dilanjutkan lagi.

14. BMN pada Satuan Kerja yang tidak menerima DIPA pada TA berjalan (Satker Non Aktif)

Satker Sekretariat Ditjen/Sekretariat Badan dan Biro Keuangan dan BMN selaku penanggungjawab Unit Eselon 1 bertanggungjawab untuk melaporkan BMN yang berada pada Satker Non Aktif di lingkungan Unit Eselon 1 masing-masing.

15. BMN (Aset Tetap) BLU yang masih harus dibayar

Sesuai dengan karakteristik BLU, Satker BLU dapat memperoleh aset tetap melalui utang. Jika Satker BLU memperoleh aset definitif melalui utang, aset tersebut dicatat sebagai aset BLU dan mengakui adanya utang.

Aset tetap BLU yang diperoleh dari utang disusutkan sejak aset tetap tersebut dimiliki/dikuasai oleh Satker BLU. Untuk itu Satker BLU ketika memperoleh aset tetap dimaksud memasukkan ke dalam aplikasi SIMAK BMN melalui menu transaksi BMN “pembelian”

dengan menggunakan tanggal dan nomor BAST. Pencatatan aset tetap tersebut menyebabkan terjadinya selisih antara penambahan aset tetap dengan realisasi belanja modal pada periode pencatatan aset tetap maupun pada periode pembayaran utang. Perbedaan tersebut dijelaskan dalam CaLK.

Pada saat pembayaran hutang, SP3B/SP2B yang diterbitkan oleh Satker BLU tidak perlu dimasukkan lagi ke SIMAK BMN.

16. Kerjasama Operasi/Kemitraan Satker BLU dengan Pihak Ketiga

Kerjasama Operasi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut. Kerjasama operasi tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Operasi.

17. Pencatatan BMN yang berasal dari DK/TP

- a. Jika Satker DK/TP merealisasikan belanja untuk penunjang kegiatan menggunakan Belanja Barang (52....) maka aset dicatat dalam Aplikasi Persediaan dan penghibahan mengacu PMK Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dengan batas waktu enam bulan. Jika dalam jangka waktu tersebut belum dihibahkan, maka **direklasifikasi** menjadi aset tetap dan proses penghibahannya mengacu PMK Nomor 111/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN.
- b. BMN dibawah penguasaan Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diperoleh sebelum tahun 2011 dan BMN yang telah diserahkan kepada pihak ketiga tidak disajikan sebagai aset pada Neraca Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja, Wilayah, Eselon I, dan Kemenkes tetapi tetap dicatat di Aplikasi SIMAK-BMN untuk penatausahaan dengan menggunakan menu **"Penghentian BMN dari Penggunaan"**.
- c. Mencatat BMN penunjang kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran berjalan dalam aplikasi persediaan termasuk barang penunjang kegiatan Dekonsentrasi yang menggunakan akun 52xx.
- d. Melakukan proses reklasifikasi BMN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diperoleh sebelum tahun anggaran 2011 menjadi "Aset yang diberhentikan dari operasional pemerintah/Aset lain-lain" sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 98/PMK.06/2013.
- e. Dalam hal aset berbentuk KDP, sesuai dengan paragraf 15 PSAP 08 menyatakan bahwa "Suatu KDP akan dipindahkan ke pos Aset

tetap jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan dengan dokumen sumber Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)”.

18. Kebijakan Akuntansi Penyusutan Aset tetap dalam Neraca Kementerian Kesehatan

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- Tanah
- KDP
- Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. **Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus** yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

Untuk aset yang dibeli dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni disusutkan selama satu semester pada Laporan Keuangan Semesteran, sedangkan untuk aset yang dibeli dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember disusutkan selama satu semester pada Laporan Keuangan Tahunan.

Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

19. Klaim Biaya Pelayanan

Selisih klaim biaya pelayanan kepada BPJS, Jamkesda, Asuransi, dan selisih klaim pasien Non PBI yang berpotensi tidak terbayar menimbulkan beban yang harus ditanggung rumah sakit sehingga tidak disajikan sebagai pendapatan, namun dicatat sebagai beban operasional rumah sakit (beban biasa) yang akan dilaporkan dalam LO.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan laporan Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- a. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan jasa pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan sewa gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- b. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan;
- d. Dalam rangka penggabungan Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, sesuai dengan lampiran IV Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8533/PB/2017 tanggal 29 September 2017 bahwa eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) dilakukan terhadap:
 - Pendapatan dari Alokasi APBN yang tersaji di LO;
 - Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara yang tersaji di LO;
 - Pendapatan dari Pelayanan BLU yang berasal dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga yang secara organisatoris membawahinya.

Belanja

(3) Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN.
- c. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi

- akan diungkapkan dalam CaLK.
- Beban* (4) **Beban**
- a. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - b. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam CaLK.
- Aset* (5) **Aset**
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.
- Aset Lancar* a. **Aset Lancar**
- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
 - 2) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
 - 3) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - 4) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Untuk piutang yang berasal dari pelayanan atas pasien BPJS pada Satker BLU dicatat sebesar nilai yang belum dibayar atas tagihan yang telah selesai diverifikasi oleh BPJS. Adapun tagihan yang belum selesai diverifikasi informasinya disajikan dalam CaLK. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Kualitas Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 5) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan TP/TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- 6) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- 7) Persediaan BLU Rumah Sakit

Dengan terbitnya surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S261/PB/2016 tanggal 12 Januari 2016 hal Penyampaian Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2015, maka Satker BLU di lingkup Kementerian Kesehatan dalam menilai persediaan BLU dapat diukur dengan menggunakan metode FIFO, Rata-Rata atau Harga Pembelian Terakhir.

Pengukuran Saldo Persediaan dan Beban Persediaan dapat menggunakan Aplikasi Persediaan maupun sistem yang dibangun sendiri oleh BLU yang dapat mendukung pengukuran nilai dan beban persediaan BLU secara andal.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- 1) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih

- dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 3) Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- 4) Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- 5) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- 6) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,

dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

- 7) Mengidentifikasi BMN untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan, selanjutnya agar tidak disajikan dalam neraca setelah pengguna barang/kuasa pengguna barang mengajukan permohonan persetujuan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) KDP; dan
 - c) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- 5) Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang

diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- 2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan TP/TGR dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, TPA yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- 4) Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa ATB pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat ATB adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Penggolongan Masa Manfaat ATB

Kelompok ATB	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- 5) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban***(6) Kewajiban**

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban pada Kementerian Kesehatan berupa kewajiban jangka pendek yaitu kewajiban yang diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas***(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam LPE.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kementerian Kesehatan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebagai berikut:

1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017;
2. Surat Menteri Keuangan Nomor. S-584/MK.02/2017 tanggal 21 Juli 2017 Hal perubahan Pagu Belanja K/L dalam APBN-P Tahun 2017;
3. Revisi terkait pengesahan hibah langsung;
4. Revisi penambahan pagu satker BLU;
5. *Refocusing* karena yang disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Perubahan Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Setelah Revisi
(dalam rupiah)

Uraian	2017	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan BLU (424)	10.583.263.491.000	10.583.263.491.000
PNBP Lainnya (423)	587.886.135.898	587.886.135.898
Jumlah Pendapatan	11.171.149.626.898	11.171.149.626.898
Belanja		
Belanja Pegawai	6.999.168.268.000	6.436.175.130.000
Belanja Barang	22.786.244.545.000	23.604.695.236.000
Belanja Modal	2.820.484.361.000	3.570.833.471.000
Belanja Bantuan Sosial	25.502.400.000.000	25.502.400.000.000
Jumlah Belanja	58.108.297.174.000	59.114.103.837.000

Sedangkan apabila dilihat dari program Kementerian Kesehatan maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Perubahan Pagu Anggaran Menurut Program Setelah Revisi
(dalam rupiah)

URAIAN	2017	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes	29.124.018.254.000	28.401.301.696.000
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kemenkes	114.153.583.000	96.356.716.000
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	829.510.330.000	740.867.129.000
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2.274.465.212.000	1.683.826.592.000
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	14.634.324.366.000	17.086.570.699.000
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3.140.204.267.000	3.115.503.948.000
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	2.978.429.542.000	3.367.598.652.000
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.013.191.620.000	4.622.078.405.000
Total Belanja	58.108.297.174.000	59.114.103.837.000

Pendapatan

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp11.705.809.385.676,00 atau mencapai 104,79% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp11.171.149.626.898,00. Pendapatan Negara dan Hibah (*netto*) bersumber dari PNBPN berupa :

PNBP Lainnya (akun 423) sebesar Rp930.196.917.754,00 atau mencapai 158,23% dari estimasi PNBPN Lainnya yang ditetapkan sebesar Rp587.886.135.898,00.

Pendapatan BLU (akun 424) sebesar Rp10.775.612.467.922,00 atau mencapai 101,82% dari estimasi pendapatan BLU yang ditetapkan sebesar Rp10.583.263.491.000,00.

Rincian Perbandingan Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Rincian Estimasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan
(dalam rupiah)

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan BLU	10.583.263.491.000	10.775.612.467.922	101,82
PNBP Lainnya	587.886.135.898	930.196.917.754	158,23
Jumlah	11.171.149.626.898	11.705.809.385.676	104,79

Perbandingan Estimasi Pendapatan PNBPN TA 2017 dan 2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 21
Rincian Estimasi Pendapatan PNBP TA 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

No.	Jenis Pendapatan	2017	2016	%
Akun 423 - PNBP Lainnya				
1	Pendapatan dari Pengelolaan BMN	151.094.344	-	-
2	Pendapatan Penjualan dan Sewa	-	130.175.488	(100,00)
3	Pendapatan Jasa	279.786.573.554	251.580.556.891	11,21
4	Pendapatan Pendidikan	307.919.652.000	267.692.491.201	15,03
5	Pendapatan Iuran dan Denda	6.000.000	6.000.000	-
6	Pendapatan Lain-lain	22.816.000	20.000.000	14,08
Sub total PNBP Lainnya		587.886.135.898	519.429.223.580	13,18
Akun 424 - Pendapatan BLU				
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum	10.428.617.912.000	9.644.306.218.455	8,13
2	Pendapatan Hibah BLU	12.512.709.000	6.055.676.000	106,63
3	Pendapatan Hasil Kerja sama BLU	66.567.737.000	59.846.833.500	11,23
4	Pendapatan BLU Lainnya	75.565.133.000	53.723.906.990	40,65
Sub total Pendapatan BLU		10.583.263.491.000	9.763.932.634.945	8,39
TOTAL		11.171.149.626.898	10.283.361.858.525	8,63

Estimasi pendapatan PNBP TA 2017 sebesar Rp11.171.149.626.898,00 mengalami peningkatan sebesar Rp887.787.768.373,00 atau meningkat sebesar 8,63% dari estimasi pendapatan tahun yang lalu, dengan peningkatan Pendapatan BLU sebesar Rp819.330.856.055,00 dan PNBP Lainnya sebesar Rp68.456.912.318,00.

Realisasi Pendapatan untuk periode TA 2017 dibandingkan dengan TA 2016 terdapat kenaikan sebesar 9,91%.

Tabel 22
Realisasi Pendapatan TA 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

URAIAN	2017	2016	%
Pendapatan BLU	10.775.612.467.922	9.762.923.196.567	10,37
PNBP Lainnya	930.196.917.754	887.498.790.803	4,81
Jumlah	11.705.809.385.676	10.650.421.987.370	9,91

Rincian Perbandingan realisasi Pendapatan PNBP (*Netto*) TA 2017 dan 2016 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 23
Rincian Realisasi PNBP TA 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

No.	Jenis Pendapatan	31-Des-17	31-Des-16	%
Akun 423 - PNBP Lainnya				
1	Pendapatan Penjualan dan Sewa		6.010.741.445	(100,00)
2	Pendapatan dari Pengelolaan BMN	12.223.316.576	-	
3	Pendapatan Jasa	474.383.572.374	404.994.494.184	17,13
4	Pendapatan Bunga	-	-	
5	Pendapatan Kejaksaaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	-	525.830.955	(100,00)
6	Pendapatan Pendidikan	297.446.758.800	266.666.574.196	11,54
7	Pendapatan Iuran dan Denda	14.676.757.783	32.053.029.474	(54,21)
8	Pendapatan Lain-lain	131.466.512.221	177.248.120.549	(25,83)
Sub Total PNBP Lainnya		930.196.917.754	887.498.790.803	4,81

Akun 424 - Pendapatan BLU				
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum	10.549.892.280.307	9.545.145.246.718	10,53
2	Pendapatan Hibah BLU	12.082.803.430	6.557.600.605	84,26
3	Pendapatan Hasil Kerja sama BLU	81.536.316.953	87.935.095.606	(7,28)
4	Pendapatan BLU Lainnya	132.101.067.232	123.285.253.638	7,15
Sub total Pendapatan BLU		10.775.612.467.922	9.762.923.196.567	10,37
Sub Total Pendapatan Hibah		-	-	-
TOTAL		11.705.809.385.676	10.650.421.987.370	9,91

Realisasi Pendapatan PNBP TA 2017 sebesar Rp11.705.809.385.676,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.055.387.398.306,00 atau naik 9,91% dari realisasi pendapatan PNBP tahun lalu. Kenaikan tersebut terjadi pada beberapa PNBP Lainnya (Akun 423) dan Pendapatan BLU (Akun 424).

B.2. BELANJA

Belanja

Realisasi Belanja Kementerian Kesehatan pada TA 2017 adalah sebesar Rp54.912.281.505.907,00 atau 92,89% dari anggaran belanja sebesar Rp59.114.103.837.000,00. Anggaran dan Realisasi belanja TA 2017 tersaji sebagai berikut:

Tabel 24
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2017

(dalam rupiah)

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	6.436.175.130.000	4.801.082.279.310	74,60
Belanja Barang	23.604.695.236.000	21.711.803.822.374	91,98
Belanja Modal	3.570.833.471.000	2.981.598.351.223	83,50
Belanja Bantuan Sosial	25.502.400.000.000	25.417.797.053.000	99,67
Total Belanja	59.114.103.837.000	54.912.281.505.907	92,89

Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2017 menurut Program tersaji pada tabel berikut:

Tabel 25
Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA 2017

(dalam rupiah)

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes	28.401.301.696.000	27.101.093.635.064	95,42
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kemenkes	96.356.716.000	91.260.793.981	94,71
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	740.867.129.000	637.518.138.839	86,05
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	1.683.826.592.000	1.583.592.382.628	94,05
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	17.086.570.699.000	15.233.039.402.922	89,15
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3.115.503.948.000	2.897.361.307.742	93,00
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	3.367.598.652.000	3.337.118.449.598	99,09
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.622.078.405.000	4.031.297.395.133	87,22
TOTAL	59.114.103.837.000	54.912.281.505.907	92,89

Perbandingan Anggaran TA 2017 dan 2016 menurut Program masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 26
Anggaran menurut Program TA 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

No.	Program	2017	2016	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes	28.401.301.696.000	29.614.669.816.000	(4,10)
2	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kemenkes	96.356.716.000	105.000.000.000	(8,23)
3	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	740.867.129.000	1.048.691.657.000	(29,35)
4	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	1.683.826.592.000	2.638.851.122.000	(36,19)
5	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	17.086.570.699.000	18.511.935.411.000	(7,70)
6	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3.115.503.948.000	4.580.562.750.000	(31,98)
7	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	3.367.598.652.000	3.251.823.220.000	3,56
8	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.622.078.405.000	5.911.059.021.000	(21,81)
TOTAL		59.114.103.837.000	65.662.592.997.000	(9,97)

Anggaran Tahun 2017 sebesar Rp59.114.103.837.000,00 dibandingkan dengan Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp6.548.489.160.000,00 atau 9,97%. Penurunan terbesar yaitu program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdapat juga kenaikan anggaran yaitu pada program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Perbandingan Realisasi Belanja (*Netto*) TA 2017 dan 2016 menurut program masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 27
Realisasi Belanja menurut Program TA 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

No.	Program	2017	2016	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes	27.101.093.635.064	28.477.468.532.772	(4,83)
2	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kemenkes	91.260.793.981	95.147.660.137	(4,09)
3	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	637.518.138.839	733.493.190.525	(13,08)
4	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	1.583.592.382.628	1.644.560.585.637	(3,71)
5	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	15.233.039.402.922	15.819.776.577.212	(3,71)
6	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.897.361.307.742	3.476.545.322.041	(16,66)
7	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	3.337.118.449.598	2.723.129.974.694	22,55
8	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.031.297.395.133	4.041.080.410.491	(0,24)
TOTAL		54.912.281.505.907	57.011.202.253.509	(3,68)

Realisasi Belanja Tahun 2017 sebesar Rp54.912.281.505.907,00 dibandingkan realisasi belanja Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp2.098.920.747.602,00 atau turun 3,68%.

Menurut Jenis Belanja, rincian anggaran dan realisasi belanja masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 28

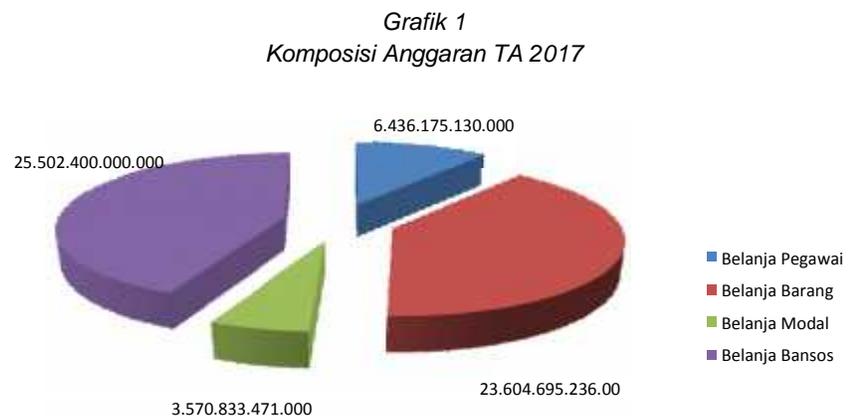
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja TA 2017

(dalam rupiah)

Kode	Jenis Belanja	2017		%
		Alokasi	Realisasi	
51	Belanja Pegawai	6,436,175,130,000.00	4,801,082,279,310.00	74.60
52	Belanja Barang	23,604,695,236,000.00	21,711,803,822,374.00	91.98
53	Belanja Modal	3,570,833,471,000.00	2,981,598,351,223.00	83.50
57	Belanja Bantuan Sosial	25,502,400,000,000.00	25,417,797,053,000.00	99.67
	Jumlah	59,114,103,837,000.00	54,912,281,505,907.00	92.89

Realisasi Belanja TA 2017 sebesar Rp54.912.281.505.907,00 atau 92,89% dari Anggaran sebesar Rp59.114.103.837.000,00. Secara prosentase, realisasi belanja dengan penyerapan tertinggi yaitu Belanja Bantuan Sosial mencapai 99,67% digunakan untuk program jaminan kesehatan nasional (JKN) dalam bentuk program bantuan iuran (PBI).

Komposisi anggaran menurut Jenis Belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Perbandingan Anggaran TA 2017 dan 2016 menurut Jenis Belanja masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 29
Alokasi Anggaran menurut Jenis Belanja TA 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Kode	Jenis Belanja	Alokasi		
		2017	2016	Kenaikan (Penurunan)
51	Belanja Pegawai	6.436.175.130.000	7.237.181.088.000	(801.005.958.000)
52	Belanja Barang	23.604.695.236.000	26.701.830.766.000	(3.097.135.530.000)
53	Belanja Modal	3.570.833.471.000	6.221.181.143.000	(2.650.347.672.000)
57	Belanja Bantuan Sosial	25.502.400.000.000	25.502.400.000.000	-
Jumlah		59.114.103.837.000	65.662.592.997.000	(6.548.489.160.000)

Anggaran tahun 2017 sebesar Rp59.114.103.837.000,00 dibandingkan tahun 2016, mengalami penurunan sebesar 9,97%, penurunan terbesar yaitu Belanja Barang sebesar Rp3.097.135.530.000,00.

Perbandingan Realisasi Belanja (*Netto*) TA 2017 dan 2016 menurut Jenis Belanja masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 30
Realisasi Belanja (*Netto*) TA 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

URAIAN	2017	2016	%
Belanja Pegawai	4.801.082.279.310	6.632.108.148.885	(27,61)
Belanja Barang	21.711.803.822.374	20.795.758.286.293	4,40
Belanja Modal	2.981.598.351.223	4.768.351.966.206	(37,47)
Belanja Bantuan Sosial	25.417.797.053.000	24.814.983.852.125	2,43
Jumlah	54.912.281.505.907	57.011.202.253.509	(3,68)

Realisasi Belanja tahun 2017 sebesar Rp54.912.281.505.907,00 dibandingkan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3,68%.

Rincian anggaran dan realisasi belanja masing-masing menurut Eselon 1 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 31
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2017

(dalam rupiah)

BA - ES 1	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja				
			Bruto	%	Pengembalian	Netto	
02401 Setjen	51 Bel. Pegawai	2.140.744.264.000,00	971.835.072.072,00	45,40	2.677.424.176,00	969.157.647.896,00	45,27
	52 Bel. Barang	706.997.030.000,00	671.885.210.562,00	95,03	4.334.146.900,00	667.551.063.662,00	94,42
	53 Bel. Modal	51.160.402.000,00	46.587.870.506,00	91,06	0,00	46.587.870.506,00	91,06
	57 Ban. Sosial	25.502.400.000.000,00	25.419.613.041.000,00	99,68	1.815.988.000,00	25.417.797.053.000,00	99,67
02401 Total		28.401.301.696.000,00	27.109.921.194.140,00	95,45	8.827.559.076,00	27.101.093.635.064,00	95,42
02402 Itjen	51 Bel. Pegawai	36.675.982.000,00	34.355.668.762,00	93,67	74.002.350,00	34.281.666.412,00	93,47
	52 Bel. Barang	57.295.735.000,00	56.371.869.262,00	98,39	1.564.705.969,00	54.807.163.293,00	95,66
	53 Bel. Modal	2.384.999.000,00	2.171.964.276,00	91,07	0,00	2.171.964.276,00	91,07
02402 Total		96.356.716.000,00	92.899.502.300,00	96,41	1.638.708.319,00	91.260.793.981,00	94,71
02403 Kesmas	51 Bel. Pegawai	65.750.252.000,00	59.807.267.248,00	90,96	20.049.695,00	59.787.217.553,00	90,93
	52 Bel. Barang	1.603.890.635.000,00	1.516.523.877.844,00	94,55	5.114.186.201,00	1.511.409.691.643,00	94,23
	53 Bel. Modal	14.185.705.000,00	12.395.473.432,00	87,38	0,00	12.395.473.432,00	87,38
02403 Total		1.683.826.592.000,00	1.588.726.618.524,00	94,35	5.134.235.896,00	1.583.592.382.628,00	94,05
02404 Yankes	51 Bel. Pegawai	2.414.425.163.000,00	2.197.967.370.192,00	91,03	1.374.714.148,00	2.196.592.656.044,00	90,98
	52 Bel. Barang	12.271.569.650.000,00	11.445.566.469.847,00	93,27	352.885.372.207,00	11.092.681.097.640,00	90,39
	53 Bel. Modal	2.400.575.886.000,00	1.944.950.484.921,00	81,02	1.184.835.683,00	1.943.765.649.238,00	80,97
02404 Total		17.086.570.699.000,00	15.588.484.324.960,00	91,23	355.444.922.038,00	15.233.039.402.922,00	89,15
02405 Ditjen P2P	51 Bel. Pegawai	496.103.646.000,00	442.255.867.894,00	89,15	1.131.838.650,00	441.124.029.244,00	88,92
	52 Bel. Barang	2.319.319.906.000,00	2.206.726.987.186,00	95,15	15.627.797.518,00	2.191.099.189.668,00	94,47
	53 Bel. Modal	300.080.396.000,00	265.149.707.730,00	88,36	11.618.900,00	265.138.088.830,00	88,36
02405 Total		3.115.503.948.000,00	2.914.132.562.810,00	93,54	16.771.255.068,00	2.897.361.307.742,00	93,00
02407 Farmalkes	51 Bel. Pegawai	34.775.094.000,00	29.160.450.918,00	83,85	3.943.625,00	29.156.507.293,00	83,84
	52 Bel. Barang	3.327.245.392.000,00	3.306.939.800.396,00	99,39	4.330.608.079,00	3.302.609.192.317,00	99,26
	53 Bel. Modal	5.578.166.000,00	5.357.659.079,00	96,05	4.909.091,00	5.352.749.988,00	95,96
02407 Total		3.367.598.652.000,00	3.341.457.910.393,00	99,22	4.339.460.795,00	3.337.118.449.598,00	99,09
02411 Balitbang	51 Bel. Pegawai	158.414.668.000,00	145.480.858.213,00	91,84	1.093.493.434,00	144.387.364.779,00	91,15
	52 Bel. Barang	510.295.629.000,00	455.423.537.068,00	89,25	17.402.165.793,00	438.021.371.275,00	85,84
	53 Bel. Modal	72.156.832.000,00	55.115.251.785,00	76,38	5.849.000,00	55.109.402.785,00	76,37
02411 Total		740.867.129.000,00	656.019.647.066,00	88,55	18.501.508.227,00	637.518.138.839,00	86,05
02412 PPSDM	51 Bel. Pegawai	1.089.286.061.000,00	927.809.208.770,00	85,18	1.214.018.681,00	926.595.190.089,00	85,06
	52 Bel. Barang	2.808.081.259.000,00	2.490.077.820.764,00	88,68	36.452.767.888,00	2.453.625.052.876,00	87,38
	53 Bel. Modal	724.711.085.000,00	651.132.135.830,00	89,85	54.983.662,00	651.077.152.168,00	89,84
02412 Total		4.622.078.405.000,00	4.069.019.165.364,00	88,03	37.721.770.231,00	4.031.297.395.133,00	87,22
Grand Total		59.114.103.837.000,00	55.360.660.925.557,00	93,65	448.379.419.650,00	54.912.281.505.907,00	92,89

Berdasarkan tabel tersebut diatas realisasi terendah adalah belanja pegawai. Hal-hal yang mempengaruhi serapan realisasi anggaran pada belanja pegawai yaitu:

1. Pembayaran gaji dan Insentif PTT : Pada periode triwulan I per bulan Maret 2017 realisasi belanja pegawai tinggi dikarenakan masih membayarkan gaji dan insentif PTT sejumlah 43.814 tenaga kesehatan. Sedangkan mulai bulan April 2017 untuk pembayaran gaji dan insentif PTT hanya membayarkan PTT yang diatas umur 35 Tahun (4.220) dan yang tidak mengikuti seleksi CPNSD (1.349).
2. Pembayaran gaji dan tunjangan PNS-CPNS:
 - a. Dialihkannya penggajian ke Satker masing-masing bagi CPNS yang telah terbit SK Pindah dari Biro Kepegawaian.
 - b. Semakin berkurangnya jumlah PNS DPK karena pindah/alih status.
 - c. Semakin berkurangnya pegawai Setjen karena pensiun.
3. Pembayaran tunjangan penghasilan atau insentif Nusantara Sehat (NS) Individual berpengaruh pada proses perekrutannya dengan berubahnya target RKP semula 6.000 orang menjadi 3.000 orang. Dari target revisi pengangkatan tenaga kesehatan penugasan khusus NS Individual sejumlah 3.000 orang tersebut, alokasi yang telah disediakan selama 12 (dua belas) bulan untuk 3.000 NS Individual, namun realisasi pembayaran hanya beberapa bulan sesuai waktu pengangkatan yang dilaksanakan secara bertahap hanya untuk 1.315 NS Individual atau 43,83% saja.
4. Penerbitan dan pengiriman SK Penugasan khusus residen/residen senior

melewati masa penugasan, pengangkatan/penugasan tidak serentak/bertahap, sedangkan alokasi anggaran disediakan untuk 12 bulan, mengakibatkan variabel orang dan bulan pembayaran menjadi berkurang.

5. Rendahnya realisasi program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) dengan alokasi Rp467.715.000.000,00 yang disebabkan oleh alokasi anggaran dihitung mulai bulan Januari 2017 sedangkan pengangkatan dimulai pada bulan April 2017, adanya penundaan pemberangkatan WKDS ke daerah bertugas dan tidak tercapainya target pengangkatan sebanyak 1.250 orang dan terealisasi sebanyak 488 orang.
6. Rendahnya penyerapan anggaran NS berbasis team dengan target pengangkatan Tahun 2017 sebanyak 1.120 orang dan terealisasi sebanyak 1.063 orang.
7. Tidak terealisasinya dana transito untuk pengangkatan CPNS tahun 2017 sebanyak 1000 orang yang terealisasi sebanyak 849 orang.

Belanja Pegawai

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4.801.082.279.310,00 dan Rp6.632.108.148.885,00 atau terjadi penurunan sebesar 27,61% dari TA yang lalu.

Tabel 32
Realisasi Belanja Pegawai (Netto) TA 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	2017	2016	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	3.421.198.630.724	3.460.599.585.938	(1,14)
Belanja Gaji Dokter PTT	349.048.423.545	1.480.716.666.342	(76,43)
Belanja Gaji Dan Tunjangan Non PNS	50.714.450	1.262.781.055	(95,98)
Belanja Honorarium	463.109.443.254	1.047.387.310.102	(55,78)
Belanja Lembur	38.234.231.590	31.806.889.850	20,21
Biaya Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	529.440.835.747	610.334.915.598	(13,25)
Jumlah Belanja	4.801.082.279.310	6.632.108.148.885	(27,61)

Belanja Barang

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp21.711.803.822.374,00 dan Rp20.795.758.286.293,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 4,40% dari Realisasi Belanja Barang TA 2016.

Tabel 33
Realisasi Belanja Barang (Netto) TA 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	2017	2016	%
Belanja Barang Operasional	611.733.523.625	707.756.371.985	(13,57)
Belanja Barang Non Operasional	1.607.481.842.258	1.538.264.697.164	4,50
Belanja Barang Persediaan	978.510.845.224	860.687.605.662	13,69
Belanja Jasa	1.143.977.272.378	1.137.029.615.571	0,61
Belanja Pemeliharaan	300.453.229.328	428.132.113.216	(29,82)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.362.971.031.287	2.626.086.943.007	(10,02)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	191.170.270.346	149.869.489.058	27,56
Belanja Barang BLU	9.850.912.498.997	8.841.118.659.097	11,42
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	1.154.231.054.944	1.279.442.534.211	(9,79)
Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	1.132.732.465	6.288.337.696	(81,99)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	3.509.229.521.522	3.221.081.919.626	8,95
Jumlah Belanja	21.711.803.822.374	20.795.758.286.293	4,40

Belanja
Modal

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.981.598.351.223,00 dan Rp4.768.351.966.206,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2017 mengalami penurunan sebesar 37,47% dibandingkan TA 2016.

Tabel 34
Realisasi Belanja Modal (Netto) TA 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	2017	2016	%
Belanja Modal Tanah	22.285.300.251	82.409.959.758	(72,96)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.213.849.194.394	2.308.690.877.929	(47,42)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	759.036.241.813	1.343.975.118.430	(43,52)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.492.425.970	19.405.925.400	(30,47)
Belanja Modal Lainnya	30.043.968.734	22.723.641.460	32,21
Belanja Modal BLU	942.891.220.061	991.146.443.229	(4,87)
Jumlah Belanja	2.981.598.351.223	4.768.351.966.206	(37,47)

B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp22.285.300.251,00 dan Rp82.409.959.758,00. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Realisasi Belanja Modal Tanah (Netto) TA 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	2017	2016	%
Belanja Modal Tanah	17.627.805.981	80.370.721.599	(78,07)
Belanja Modal pembebasan Tanah	27.975.500	107.985.600	(74,09)
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	68.150.000	533.672.000	(87,23)
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	69.483.000	134.535.300	(48,35)
Belanja Modal Pengurusan dan Pematangan Tanah	4.135.544.000	671.691.175	515,69
Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	114.745.100	13.964.000	721,72
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	241.596.670	577.390.084	(58,16)
Jumlah Belanja Netto	22.285.300.251	82.409.959.758	(72,96)

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.213.849.194.394,00 dan Rp2.308.690.877.929,00. Realisasi Belanja Modal TA 2017 mengalami penurunan sebesar 47,42% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Tabel 36
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Netto) TA 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	2017	2016	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.213.194.898.696	2.307.502.774.199	(47,42)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	153.378.445	189.763.500	(19,17)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	90.910.000	(100,00)
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	130.907.500	660.170.000	(80,17)
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	109.268.253	60.960.230	79,25
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	260.741.500	186.300.000	39,96
Jumlah Belanja Netto	1.213.849.194.394	2.308.690.877.929	(47,42)

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp759.036.241.813,00 dan Rp1.343.975.118.430,00. Realisasi Belanja Modal TA 2017 mengalami penurunan sebesar 43,52% dibandingkan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2016.

Tabel 37
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Netto) TA 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	2017	2016	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	650.487.831.546	1.256.327.133.958	(48,22)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	2.042.878.167	2.436.229.057	(16,15)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	22.651.644.305	16.864.607.330	34,31
Belanja Modal Perijinan Gedung dan Bangunan	195.000.000	21.965.036	787,77
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	891.841.460	380.493.967	134,39
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	82.767.046.335	67.944.689.082	21,82
Jumlah Belanja Netto	759.036.241.813	1.343.975.118.430	(43,52)

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp13.492.425.970,00 dan Rp19.405.925.400,00. Realisasi Belanja Modal TA 2017 mengalami penurunan sebesar 30,47% dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2016.

Tabel 38
Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan (Netto) TA 2017 dan 2016
(dalam rupiah)

Uraian	2017	2016	%
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.061.299.000	5.032.335.000	(78,91)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan	-	3.150.000	(100,00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	19.388.000	161.896.752	(88,02)
Belanja Modal Irigasi	74.016.470	1.016.354.000	(92,72)
Belanja Modal Jaringan	12.165.559.600	6.877.854.288	76,88
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	73.807.400	23.657.000	211,99
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan	98.355.500	219.508.000	(55,19)
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	-	6.071.170.360	(100,00)
Jumlah Belanja Netto	13.492.425.970	19.405.925.400	(30,47)

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp30.043.968.734,00 dan Rp22.723.641.460,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 32,21% dibandingkan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016.

Tabel 39
Realisasi Belanja Modal Lainnya (Netto) TA 2017 dan 2016
(dalam rupiah)

Uraian	2017	2016	%
Belanja Modal Lainnya	29.043.638.206	22.502.466.460	29,07
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya	1.000.330.528	221.175.000	352,28
Jumlah Belanja Netto	30.043.968.734	22.723.641.460	32,21

B.2.3.6 Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU untuk TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp942.891.220.061,00 dan Rp991.146.443.229,00. Realisasi Belanja Modal BLU TA 2017 mengalami penurunan sebesar 4,87% dibandingkan Realisasi Belanja Modal BLU TA 2016.

Tabel 40
Realisasi Belanja Modal BLU (Netto) TA 2017 dan 2016
(dalam rupiah)

Uraian	2017	2016	%
Belanja Modal Tanah BLU	555.407.050	2.484.517.500	(77,65)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	489.367.027.239	609.586.721.431	(19,72)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU	420.875.951.522	344.369.548.846	22,22
Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan BLU	9.383.307.839	13.381.659.720	(29,88)
Belanja Modal Lainnya BLU	22.709.526.411	21.323.995.732	6,50
Jumlah Belanja Netto	942.891.220.061	991.146.443.229	(4,87)

*Belanja
Bantuan
Sosial*

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp25.417.797.053.000,00 dan Rp24.814.983.852.125,00. Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Kesehatan diperuntukkan untuk PBI. Belanja Bantuan Sosial hanya terdapat di unit Eselon 1 Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET LANCAR

Saldo aset lancar per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp8.746.078.521.705,00 dan Rp7.811.531.902.898,00. Rincian aset lancar per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, sebagai berikut:

Tabel 41
Daftar Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Akun	Nama Akun	31 Des 2017	31 Des 2016	Kenaikan (Penurunan)
1116	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.320.666.799	1.399.069.596	(78.402.797)
1117	Kas di Bendahara Penerimaan	218.677.700	616.914.118	(398.236.418)
1118	Kas Lainnya dan Setara Kas	574.442.183.969	484.358.461.194	90.083.722.775
1119	Kas pada BLU	2.243.446.441.759	2.350.139.199.167	(106.692.757.408)
1133	Investasi Jangka Pendek-BLU	371.467.208.204	283.078.842.932	88.388.365.272
1141	Belanja Dibayar Dimuka	90.593.929.623	114.879.203.713	(24.285.274.090)
1142	Uang Muka Belanja	9.566.508.000	949.749.028	8.616.758.972
1143	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	627.111.298	1.723.122.231	(1.096.010.933)
1152	Piutang Bukan Pajak	41.694.452.251	28.597.016.130	13.097.436.121
1162	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(5.475.319.552)	(1.712.825.512)	(3.762.494.040)
	Piutang Bukan Pajak (<i>Netto</i>)	36.219.132.699	26.884.190.618	9.334.942.081
1154	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	1.394.732.983	629.935.089	764.797.894
1164	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	(18.834.387)	(50.412.175)	31.577.788
	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (<i>Netto</i>)	1.375.898.596	579.522.914	796.375.682
1157	Piutang dari kegiatan Operasional BLU	2.366.739.177.023	2.009.415.810.944	357.323.366.079
1166	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(400.120.822.790)	(359.456.896.438)	(40.663.926.352)
	Piutang dari kegiatan Operasional BLU (<i>Netto</i>)	1.966.618.354.233	1.649.958.914.506	316.659.439.727
1158	Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	13.165.815.819	4.092.738.621	9.073.077.198
1167	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(6.107.309.748)	(694.128.343)	(5.413.181.405)
	Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (<i>Netto</i>)	7.058.506.071	3.398.610.278	3.659.895.793
1171	Persediaan	3.443.123.902.754	2.081.621.562.988	1.361.502.339.766
1172	Persediaan BLU	-	811.944.539.615	(811.944.539.615)
	JUMLAH ASET LANCAR	8.746.078.521.705	7.811.531.902.898	934.546.618.807

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp934.546.618.807,00 atau naik sebesar 11,96% dengan kenaikan terbesar pada akun:

- Persediaan, naik sebesar Rp1.361.502.339.766,00;
- Piutang dari Kegiatan Operasional BLU, naik sebesar Rp357.323.366.079,00;
- Kas Lainnya dan Setara Kas, naik sebesar Rp90.083.722.775,00.

Secara rinci saldo masing-masing akun Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran*

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau

belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp1.320.666.799,00 dan Rp1.399.069.596,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 2017	31 Des 2016	Kenaikan (Penurunan)
Kas di Bendahara Pengeluaran	363.057.600	608.233.596	(245.175.996)
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	957.609.199	790.836.000	166.773.199
Jumlah	1.320.666.799	1.399.069.596	(78.402.797)

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing eselon 1 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 43
Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

NAMA UNIT	31-Des-17	31-Des-16	Kenaikan (Penurunan)
SETJEN	82.894.000	23.012.000	59.882.000
DITJEN KESMAS	136.000	143.017.935	(142.881.935)
DITJEN YANKES	878.827.600	642.310.322	236.517.278
DITJEN P2P	102.742.199	1.674.586	101.067.613
DITJEN FARMALKES	-	71.335.000	(71.335.000)
BADAN PPSDM KES	256.067.000	517.719.753	(261.652.753)
JUMLAH	1.320.666.799	1.399.069.596	(78.402.797)

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per satker pada lampiran 1.

Kas di Bendahara Penerimaan

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar masing-masing Rp218.677.700,00 dan Rp616.914.118,00 yang meliputi saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada masing-masing eselon 1, sebagai berikut:

Tabel 44
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

NAMA UNIT	31 Des 17	31 Des 16	Kenaikan (Penurunan)
SETJEN	-	10.000.000	(10.000.000)
DITJEN YANKES	177.717.700	358.904.239	(181.186.539)
DITJEN P2P	-	112.850.000	(112.850.000)
BALITBANGKES	140.000	121.500	18.500
BADAN PPSDM KES	40.820.000	135.038.379	(94.218.379)
JUMLAH	218.677.700	616.914.118	(398.236.418)

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per satker pada lampiran 2.

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp574.442.183.969,00 dan Rp484.358.461.194,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut

Tabel 45
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 17	31 Des 16	Kenaikan (Penurunan)
Setara Kas lainnya	-	75.638.612	(75.638.612)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	120.806.011	5.210.934.818	(5.090.128.807)
Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	555.855.395.252	462.419.293.196	93.436.102.056
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	92.532.815	(92.532.815)
Kas Lainnya di BLU	18.465.982.706	16.901.556.378	1.564.426.328
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	-	(341.494.625)	341.494.625
Jumlah	574.442.183.969	484.358.461.194	90.083.722.775

Rincian Kas Lainnya dan setara kas pada masing-masing eselon 1, sebagai berikut:

Tabel 46
Kas lainnya dan Setara Kas Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

NAMA UNIT	31 Des 17	31 Des 16	Kenaikan (Penurunan)
SETJEN	33.456.183.398	31.036.440.872	2.419.742.526
DITJEN KESMAS	4.785.759.066	15.895.774.052	(11.110.014.986)
DITJEN YANKES	18.573.219.371	17.170.067.881	1.403.151.490
DITJEN P2P	467.487.340.729	409.843.076.117	57.644.264.612
DITJEN FARMALKES	44.543.100.673	8.625.706.300	35.917.394.373
BALITBANGKES	5.595.476.427	1.293.261.742	4.302.214.685
BADAN PPSDM KES	1.104.305	494.134.230	(493.029.925)
JUMLAH	574.442.183.969	484.358.461.194	90.083.722.775

*Kas pada
BLU*

C.4 Kas pada BLU

Kas pada BLU per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.243.446.441.759,00 dan Rp2.350.139.199.167,00. Kas pada BLU merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat Kas & Setara Kas yang dikelola oleh BLU. Kas pada BLU meliputi: Kas dan Bank BLU, Kas dan Bank BLU belum disahkan, Surat Berharga BLU dan Setara kas Lainnya BLU dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47
Rincian Kas pada BLU Per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 17	31 Des 16	Kenaikan (Penurunan)
Kas dan Bank - BLU	1.645.339.317.533	1.851.916.451.619	(206.577.134.086)
Kas dan Bank BLU belum disahkan	-	44.637.592	(44.637.592)
Surat Berharga - BLU	-	10.000.000.000	(10.000.000.000)
Setara kas Lainnya - BLU	598.107.124.226	488.178.109.956	109.929.014.270
Jumlah	2.243.446.441.759	2.350.139.199.167	(106.692.757.408)

Rincian Kas pada BLU pada eselon 1 disajikan sebagai berikut:

Tabel 48
Rincian Kas pada BLU Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

NAMA UNIT	31 Des 17	31 Des 16	Kenaikan (Penurunan)
DITJEN YANKES	1.980.633.333.436	2.105.535.168.973	(124.901.835.537)
BADAN PPSDM KES	262.813.108.323	244.604.030.194	18.209.078.129
JUMLAH	2.243.446.441.759	2.350.139.199.167	(106.692.757.408)

Rincian Kas pada BLU per satker pada lampiran 3.

Investasi
 Jangka
 Pendek
 BLU

C.5 Investasi Jangka Pendek BLU

Investasi Jangka Pendek BLU per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp371.467.208.204,00 dan Rp283.078.842.932,00. merupakan Investasi Jangka Pendek yang dimaksudkan dalam rangka pengelolaan kelebihan kas yang belum digunakan dalam kegiatan Operasional BLU dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi berupa bunga maupun bagi hasil. Rincian Investasi Jangka Pendek BLU, disajikan sebagai berikut:

Tabel 49
Rincian Investasi Jangka Pendek BLU Per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 17	31 Des 16	Kenaikan (Penurunan)
Deposito dan Investasi jangka pendek lainnya dari Kas dan Bank – BLU	323.552.208.204	248.663.842.932	74.888.365.272
Deposito dan Investasi jangka pendek lainnya dari Dana Kelolaan – BLU	47.915.000.000	34.415.000.000	13.500.000.000
Jumlah	371.467.208.204	283.078.842.932	88.388.365.272

Rincian Investasi Jangka Pendek BLU pada eselon 1 disajikan sebagai berikut:

Tabel 50
Investasi Jangka Pendek BLU per Eselon 1

(dalam rupiah)

NAMA UNIT	31 Des 17	31 Des 16	Kenaikan (Penurunan)
DITJEN YANKES	324.915.000.000	218.715.000.000	106.200.000.000
BADAN PPSDM KES	46.552.208.204	64.363.842.932	(17.811.634.728)
JUMLAH	371.467.208.204	283.078.842.932	88.388.365.272

Rincian Investasi Jangka Pendek per satker pada lampiran 4.

*Belanja
Dibayar
Dimuka*

C.6 Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp90.593.929.623,00 dan Rp114.879.203.713,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51
Rincian Belanja Dibayar di Muka Per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 17	31 Des 16	Kenaikan (Penurunan)
Belanja Pegawai dibayar dimuka	-	103.477.563	(103.477.563)
Belanja Barang dibayar dimuka	85.832.396.943	113.169.477.150	(27.337.080.207)
Belanja Modal dibayar dimuka	4.761.532.680	970.000.000	3.791.532.680
Belanja Bansos dibayar dimuka	-	636.249.000	(636.249.000)
Jumlah	90.593.929.623	114.879.203.713	(24.285.274.090)

Rincian Belanja Dibayar di Muka berdasarkan Eselon 1 disajikan sebagai berikut:

Tabel 52
Belanja dibayar di Muka Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

NAMA UNIT	31 Des 17	31 Des 16	Kenaikan (Penurunan)
SETJEN	7.214.495.726	22.136.249.000	(14.921.753.274)
DITJEN KESMAS	2.726.723.950	735.696.666	1.991.027.284
DITJEN YANKES	4.976.890.245	1.394.973.864	3.581.916.381
DITJEN P2P	74.978.328.035	90.577.150.850	(15.598.822.815)
BALITBANGKES	697.491.667	-	697.491.667
BADAN PPSDM KES	-	35.133.333	(35.133.333)
JUMLAH	90.593.929.623	114.879.203.713	(24.285.274.090)

Rincian Belanja Dibayar di Muka per satker pada lampiran 5.

Uang Muka
Belanja**C.7 Uang Muka Belanja**

Uang Muka Belanja per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp9.566.508.000,00 dan Rp949.749.028,00. Uang Muka Belanja merupakan pengeluaran atas pembayaran sebagian nominal dari nilai transaksi yang telah disepakati dengan pihak ketiga, dan merupakan tanda bahwa perjanjian jual beli yang diadakan telah mengikat. Uang Muka Belanja hanya terdapat pada unit Ditjen Pelayanan Kesehatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53
Rincian Uang Muka Belanja Per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 17	31 Des 16	Kenaikan (Penurunan)
Uang Muka Belanja Barang	-	563.028	(563.028)
Uang Muka Belanja Modal	9.566.508.000	949.186.000	8.617.322.000
Jumlah	9.566.508.000	949.749.028	8.616.758.972

Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima**C.8 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp627.111.298,00 dan Rp1.723.122.231,00 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan Eselon 1 disajikan, sebagai berikut:

Tabel 54
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

NAMA UNIT	31 Des-17	31Des-16	Kenaikan (Penurunan)
DITJEN YANKES	349.462.622	77.671.231	271.791.391
DITJEN P2P	277.648.676	1.645.451.000	(1.367.802.324)
JUMLAH	627.111.298	1.723.122.231	(1.096.010.933)

Piutang
Bukan Pajak**C.9 Piutang Bukan Pajak**

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp41.694.452.251,00 dan Rp28.597.016.130,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Piutang PNBP pada Kementerian Kesehatan antara lain berasal dari piutang jasa layanan pendidikan, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55
Rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-17	31-Des-16	Kenaikan (Penurunan)
Piutang PNBP	35.966.392.035	19.429.938.308	16.536.453.727
Piutang Lainnya	5.728.060.216	9.167.077.822	(3.439.017.606)
Jumlah	41.694.452.251	28.597.016.130	13.097.436.121

Rincian Piutang Bukan Pajak per eselon 1 disajikan, sebagai berikut.

Tabel 56
Piutang Bukan Pajak Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

NAMA UNIT	31-Des-17	31-Des-16	Kenaikan (Penurunan)
SETJEN	12.467.608	164.957.216	(152.489.608)
DITJEN KEMAS	16.431.600	36.896.000	(20.464.400)
DITJEN YANKES	30.443.334.079	18.275.896.384	12.167.437.695
DITJEN P2P	5.077.729.242	2.615.179.411	2.462.549.831
DITJEN FARMALKES	2.582.627.183	4.757.416.972	(2.174.789.789)
BALITBANGKES	91.056.839	212.912.600	(121.855.761)
BADAN PPSDM KES	3.470.805.700	2.533.757.547	937.048.153
JUMLAH	41.694.452.251	28.597.016.130	13.097.436.121

*Penyisihan
Piutang
Tidak
Tertagih -
Piutang
Bukan
Pajak*

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar (Rp5.475.319.552,00) dan (Rp1.712.825.512,00). Penyisihan Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 57
**Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2017 dan 2016**

(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-17	31-Des-16	Kenaikan (Penurunan)
Penyisihan Piutang tidak tertagih - Piutang PNB	(4.211.301.822)	(1.597.089.475)	(2.614.212.347)
Penyisihan Piutang tidak tertagih - Piutang Lainnya	(1.264.017.730)	(115.736.037)	(1.148.281.693)
Jumlah	(5.475.319.552)	(1.712.825.512)	(3.762.494.040)

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per eselon 1 disajikan, sebagai berikut:

Tabel 58
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Bukan Pajak per Eselon 1

(dalam rupiah)

NAMA UNIT	31-Des-17	31-Des-16	Kenaikan (Penurunan)
SETJEN	(62.338)	(823.514)	761.176
DITJEN KEMAS	(82.158)	(184.480)	102.322
DITJEN YANKES	(1.871.073.771)	(1.468.255.859)	(402.817.912)
DITJEN P2P	(3.573.378.924)	(206.041.322)	(3.367.337.602)
DITJEN FARMALKES	(12.913.136)	(23.787.085)	10.873.949
BALITBANGKES	(455.284)	(1.064.563)	609.279
BADAN PPSDM KES	(17.353.941)	(12.668.689)	(4.685.252)
JUMLAH	(5.475.319.552)	(1.712.825.512)	(3.762.494.040)

Bagian
Lancar
Tagihan
TP/TGR

C.11 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp1.394.732.983,00 dan Rp629.935.089,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 59
Rincian Bagian Lancar TP/TGR Per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 17	31 Des 16	Kenaikan (Penurunan)
Bagian Lancar TP	565.572.959	24.000.000	541.572.959
Bagian Lancar TGR	825.560.024	605.935.089	219.624.935
Bagian Lancar TP/TGR	3.600.000	0	3.600.000
Jumlah	1.394.732.983	629.935.089	764.797.894

Rincian TP/TGR untuk masing-masing eselon 1 disajikan, sebagai berikut:

Tabel 60
Rincian Bagian Lancar TP/TGR per Eselon 1

(dalam rupiah)

NAMA UNIT	31-Des-17	31-Des-16	Kenaikan (Penurunan)
SETJEN	486.767.860	394.281.089	92.486.771
DITJEN KESMAS	470.277.494	120.000.000	350.277.494
DITJEN YANKES	54.600.000	12.000.000	42.600.000
DITJEN P2P	206.816.029	47.500.000	159.316.029
DITJEN FARMALKES	28.728.000	28.728.000	-
BADAN PPSDM KES	147.543.600	27.426.000	120.117.600
JUMLAH	1.394.732.983	629.935.089	764.797.894

Penyisihan
Piutang
Tidak
Tertagih -
Bagian
Lancar
Tagihan
TP/TGR

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar (Rp18.834.387,00) dan (Rp50.412.175,00). Akun tersebut merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tabel 61
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-17	31-Des-16	Kenaikan (Penurunan)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP	(3.875.712)	(180.000)	(3.695.712)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TGR	(14.598.675)	(50.232.175)	35.633.500
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR	(360.000)	-	(360.000)
Jumlah	(18.834.387)	(50.412.175)	31.577.788

Rincian Penyisihan Piutang Tidak tertagih TP/TGR untuk masing-masing eselon 1 disajikan, sebagai berikut:

Tabel 62
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

NAMA UNIT	31 Des 17	31 Des 16	Kenaikan (Penurunan)
SETJEN	(2.433.840)	(1.971.405)	(462.435)
DITJEN KESMAS	(13.940.685)	(600.000)	(13.340.685)
DITJEN YANKES	(615.000)	(60.000)	(555.000)
DITJEN P2P	(963.504)	(47.500.000)	46.536.496
DITJEN FARMALKES	(143.640)	(143.640)	-
BADAN PPSDM KES	(737.718)	(137.130)	(600.588)
JUMLAH	(18.834.387)	(50.412.175)	31.577.788

*Piutang dari
Kegiatan
Operasional
BLU*

C.13 Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Piutang Kegiatan Operasional BLU merupakan hak tagih atau klaim terhadap pihak lain yang belum diselesaikan pada tanggal neraca per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp2.366.739.177.023,00 dan Rp2.009.415.810.944,00. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU yang terdapat di Kemenkes merupakan Piutang atas pelayanan kesehatan yang dikelola oleh Ditjen Pelayanan Masyarakat dan pelayanan pendidikan yang dikelola oleh Badan PPSDM Kesehatan.

Tabel 63
Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
Per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 17	31 Des 16	Kenaikan (Penurunan)
Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	2.365.865.825.804	2.008.785.546.081	357.080.279.723
Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	872.301.219	442.953.333	429.347.886
Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional	1.050.000	187.311.530	(186.261.530)
Jumlah	2.366.739.177.023	2.009.415.810.944	357.323.366.079

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU untuk masing-masing eselon 1 disajikan, sebagai berikut:

Tabel 64
Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Eselon 1

(dalam rupiah)

NAMA UNIT	31 Des 17	31 Des 16	Kenaikan (Penurunan)
DITJEN YANKES	2.365.866.875.804	2.008.920.357.611	356.946.518.193
BADAN PPSDM KES	872.301.219	495.453.333	376.847.886
JUMLAH	2.366.739.177.023	2.009.415.810.944	357.323.366.079

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per satker pada lampiran 6.

Berdasarkan tabel tersebut, terkait piutang Ditjen Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2017 terdiri dari :

1. Piutang jaminan perseorangan atau umum sebesar Rp351.437.900.782,00;
2. Piutang Jaminan Asuransi atau Perusahaan sebesar Rp82.521.964.525,00;
3. Piutang BPJS sebesar Rp1.807.143.559.294,00;

4. Piutang Jaminan Pemerintah Daerah (Jamkesda) sebesar Rp124.763.451.202,00.

Piutang Jamkesda merupakan piutang pemerintah daerah atas pelayanan rumah sakit yang diperuntukkan bagi penduduk yang dijamin oleh Pemerintah Daerah. Piutang Jamkesda antara lain terdapat pada RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang dan RSUP dr. Sardjito. Dari jumlah tersebut sebesar Rp58.308.762.646,00 merupakan hutang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada RSUP Dr Mohammad Hoesin berdasarkan Surat Pernyataan Posisi Hutang Jamsoskes Sumsel Semesta Pemprov Sumatera Selatan Tahun 2017 dari Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sumsel tanggal 14 Pebruari 2018.

Dari total piutang Jamkesda sebesar Rp124.763.451.202,00 tersebut, diantaranya sebesar Rp34.340.982.481,00 merupakan piutang macet.

Sedangkan Piutang Badan PPSDM Kesehatan terdiri dari piutang yang berasal dari SPP Mahasiswa/i Politeknik Kesehatan Kemenkes.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih -
Piutang dari
Kegiatan
Operasional
BLU*

C.14 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Operasional BLU merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU yang ditentukan oleh kualitas piutang. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Operasional BLU per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar (Rp400.120.822.790,00) dan (Rp359.456.896.438,00).

Tabel 65
Rincian Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
Per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 17	31 Des16	Kenaikan (Penurunan)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	(400.057.651.524)	(359.405.979.170)	(40.651.672.354)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	(63.166.016)	(2.214.767)	(60.951.249)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU	(5.250)	(48.702.501)	48.697.251
Jumlah	(400.120.822.790)	(359.456.896.438)	(40.663.926.352)

Rincian Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU untuk masing-masing eselon 1 disajikan, sebagai berikut:

Tabel 66
Rincian Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

NAMA UNIT	31 Des 17	31 Des16	Kenaikan (Penurunan)
DITJEN YANKES	(400.057.656.774)	(359.454.419.171)	(40.603.237.603)
BADAN PPSDM KES	(63.166.016)	(2.477.267)	(60.688.749)
JUMLAH	(400.120.822.790)	(359.456.896.438)	(40.663.926.352)

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

C.15 Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Piutang Kegiatan Non Operasional BLU merupakan hak tagih atau klaim terhadap pihak lain yang belum diselesaikan pada tanggal neraca per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp13.165.815.819,00 dan Rp4.092.738.621,00 pada Ditjen Yankes dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 67
Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU
Per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 17	31 Des16	Kenaikan (Penurunan)
Piutang Sewa Tanah - BLU	45.000.000	-	45.000.000
Piutang Sewa Gedung - BLU	962.681.860	784.274.602	178.407.258
Piutang Sewa Ruangan - BLU	700.493.679	629.876.680	70.616.999
Piutang Sewa Lainnya - BLU	30.000.000	-	30.000.000
Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	11.427.640.280	2.678.587.339	8.749.052.941
Jumlah	13.165.815.819	4.092.738.621	9.073.077.198

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

C.16 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Operasional BLU merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Non Operasional BLU yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar (Rp6.107.309.748,00) dan (Rp694.128.343,00) pada Ditjen Yankes dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 68
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari Kegiatan Non Operasional BLU
Per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 17	31 Des16	Kenaikan (Penurunan)
Penyisihan Piutang Sewa Tanah – BLU	(225.000)	-	(225.000)
Penyisihan Piutang Sewa Gedung – BLU	(356.052.473)	(299.627.660)	(56.424.813)
Penyisihan Piutang Sewa Ruangan – BLU	(245.039.085)	(238.060.911)	(6.978.174)
Penyisihan Piutang Sewa Lainnya – BLU	(150.000)	-	(150.000)
Penyisihan Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	(5.505.843.190)	(156.439.772)	(5.349.403.418)
Jumlah	(6.107.309.748)	(694.128.343)	(5.413.181.405)

Persediaan

C.17 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp3.443.123.902.754,00 dan Rp2.081.621.562.988,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 69
Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 17	31 Des16	Kenaikan (Penurunan)
Barang Konsumsi	136.028.281.908	63.422.892.333	72.605.389.575
Bahan untuk Pemeliharaan	25.988.358.395	1.928.347.786	24.060.010.609
Suku Cadang	103.980.715.161	16.356.106.539	87.624.608.622
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	9.970.600	(9.970.600)
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.264.491.345.324	768.144.967.866	496.346.377.458
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.148.232.000	1.233.580.629	(85.348.629)
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	471.129.122	151.277.167	319.851.955
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	525.783.880.509	528.665.895.086	(2.882.014.577)
Bahan Baku	100.253.652.472	55.443.083.969	44.810.568.503
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	9.281.879.393	19.079.868.279	(9.797.988.886)
Persediaan Lainnya	1.275.696.428.470	627.185.572.734	648.510.855.736
Jumlah	3.443.123.902.754	2.081.621.562.988	1.361.502.339.766

Terdapat barang Persediaan dalam kondisi rusak/usang dan tidak disajikan dalam neraca per tanggal 31 Desember 2017. Persediaan rusak sebesar Rp15.297.868.032,00 dan persediaan usang sebesar Rp25.332.400.389,00 (Rincian Persediaan rusak dan usang per satker pada lampiran 7).

Rincian Persediaan berdasarkan Eselon 1 disajikan, sebagai berikut:

Tabel 70
Persediaan Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

NAMA UNIT	31 Des 17	31 Des 16	Kenaikan (Penurunan)
SETJEN	15.101.426.982	24.847.722.969	(9.746.295.987)
ITJEN	179.714.380	51.005.098	128.709.282
DITJEN KESMAS	172.208.002.948	123.164.787.729	49.043.215.219
DITJEN YANKES	1.038.866.419.106	158.222.859.035	880.643.560.071
DITJEN P2P	2.071.455.909.433	1.568.930.025.369	502.525.884.064
DITJEN FARMALKES	111.825.812.943	184.308.230.398	(72.482.417.455)
BALITBANGKES	5.321.136.316	5.020.566.437	300.569.879
BADAN PPSDM KES	28.165.480.646	17.076.365.953	11.089.114.693
JUMLAH	3.443.123.902.754	2.081.621.562.988	1.361.502.339.766

Rincian Persediaan per satker pada lampiran 8.

Terdapat perbedaan total nilai Persediaan SAIBA sebesar Rp3.443.123.902.754,00 dan SIMAK-BMN sebesar Rp3.519.757.698.550,00. Nilai Persediaan pada SAIBA lebih rendah sebesar Rp76.633.795.796,00. Selisih tersebut merupakan barang persediaan pengadaan satker pusat yang sudah diusulkan pemindahtanganan sehingga dikeluarkan dari neraca Laporan Keuangan tetapi masih dicatat dalam SIMAK-BMN.

*Persediaan
BLU*

C.18 Persediaan BLU

Persediaan pada Satker BLU berupa barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp811.944.539.615,00.

Rincian Persediaan BLU berdasarkan Eselon 1, sebagai berikut :

Tabel 71
Persediaan BLU Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

NAMA UNIT	31 Des 17	31 Des 16	Kenaikan (Penurunan)
DITJEN YANKES	-	799.358.461.102	(799.358.461.102)
BADAN PPSDM KES	-	12.586.078.513	(12.586.078.513)
JUMLAH	-	811.944.539.615	(811.944.539.615)

Tidak terdapat nilai persediaan BLU dikarenakan pada *Update* Aplikasi SAIBA 4.1, Saldo Akun Persediaan BLU telah direklas menjadi Akun Persediaan.

ASET TETAP

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp38.797.668.708.393,00 dan Rp39.769.461.961.778,00. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, sebagai berikut :

Tabel 72
Rincian Aset Tetap (BMN) 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Akun	Nama Akun	31 Desember 2017	31 Desember 2016	%
1311	Tanah	15.781.343.836.355	3.815.223.275.869	313,64
1313	Tanah BLU	-	11.854.080.738.081	(100,00)
1321	Peralatan dan Mesin	30.298.593.008.907	17.307.412.435.510	75,06
1323	Peralatan dan Mesin BLU	-	11.878.424.542.927	(100,00)
1331	Gedung dan Bangunan	14.264.231.925.068	5.253.077.149.711	171,54
1333	Gedung dan Bangunan BLU	-	7.802.461.537.570	(100,00)
1341	Jalan, Irigasi dan Jaringan	675.062.859.576	177.359.729.434	280,62
1343	Jalan,Irigasi, dan Jaringan BLU	-	438.244.547.193	(100,00)
1351	Aset Tetap Lainnya	253.351.060.234	164.392.448.316	54,11
1352	Aset Tetap Lainnya BLU	-	80.909.518.463	(100,00)
1361	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.379.500.085.896	1.802.252.509.888	87,52
1362	Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU	-	1.685.746.111.723	(100,00)
1371	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(25.854.414.067.643)	(22.490.122.582.907)	14,96
Jumlah Aset Tetap		38.797.668.708.393	39.769.461.961.778	(2,44)

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp971.793.253.385,00 atau turun sebesar 2,44%.

Secara rinci saldo masing-masing akun Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

Tanah

C.19 Tanah

Tanah yang dimiliki Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp15.781.343.836.355,00 dan Rp3.815.223.275.869,00.

Tanah BLU

C.20 Tanah BLU

Tanah BLU yang dimiliki Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp11.854.080.738.081,00.

Mutasi total Aset Tetap Tanah Kementerian Kesehatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 73
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Nilai Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Awal SAIBA		15.669.304.013.950
Penambahan		
100	Penambahan Saldo Awal	73.986.460.000
101	Pembelian	10.520.145.100
102	Transfer Masuk	39.685.100.000
103	Hibah (Masuk)	406.471.325
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	7.096.878.797
107	Reklasifikasi Masuk	7.758.700.500
120	Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	15.539.225.000
121	Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	897.523.725
202	Pengembangan Nilai Aset	2.608.976.854
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	20.333.440.000
	TOTAL	178.832.921.301
Pengurangan		
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(111.974.571)
208	Pengembangan Melalui KDP	2.619.679.900
302	Transfer Keluar	(39.685.100.000)
304	Reklasifikasi Keluar	(7.758.700.500)
305	Koreksi Pencatatan	(20.959.480.000)
321	Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	(897.523.725)
	TOTAL	(66.793.098.896)
Saldo Akhir SAIBA		15.781.343.836.355
Saldo Akhir SIMAK		60.706.090.122.775
Selisih		(44.924.746.286.420)

Terdapat selisih antara SAIBA dengan SIMAK-BMN sebesar (Rp44.924.746.286.420,00) yang disebabkan hasil revaluasi BMN akan disajikan pada Laporan Keuangan K/L setelah semua objek revaluasi di K/L Pemerintahan Pusat selesai dinilai kembali.

Peralatan dan Mesin

C.21 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp30.298.593.008.907,00 dan Rp17.307.412.435.510,00.

Peralatan dan Mesin BLU

C.22 Peralatan dan Mesin BLU

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin BLU per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp11.878.424.542.927,00.

Mutasi total Peralatan dan Mesin Kementerian Kesehatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 74
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Awal SAIBA		29.185.836.978.437
Penambahan		
100	Penambahan Saldo Awal	28.622.030.730
101	Pembelian	1.592.162.385.322
102	Transfer Masuk	68.004.152.284
103	Hibah (Masuk)	18.186.667.310
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	136.297.984.892
106	Pembatalan Penghapusan	130.301.000
107	Reklasifikasi Masuk	153.623.878.395
112	Perolehan Lainnya	6.736.851.652
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	520.523.413.819
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	38.925.000
202	Pengembangan Nilai Aset	12.449.417.734
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	20.919.387.845
	TOTAL	2.557.695.395.983
Pengurangan		
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(1.986.083.260)
208	Pengembangan Melalui KDP	2.541.133.638
301	Penghapusan	(2.681.049.087)
302	Transfer Keluar	(77.964.081.882)
303	Hibah (Keluar)	(1.002.415.455.172)
304	Reklasifikasi Keluar	(106.009.916.789)
305	Koreksi Pencatatan	(1.183.044.391)
306	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(1.835.544.180)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(253.405.324.390)
	TOTAL	(1.444.939.365.513)
Saldo Akhir SAIBA		30.298.593.008.907
Saldo Akhir SIMAK		30.298.593.008.907
Selisih		-

*Gedung dan
Bangunan*

C.23 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp14.264.231.925.068,00 dan Rp5.253.077.149.711,00.

*Gedung dan
Bangunan
BLU*

C.24 Gedung dan Bangunan BLU

Gedung dan bangunan BLU per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp0,00 dan Rp7.802.461.537.570,00.

Mutasi total Gedung dan Bangunan Kementerian Kesehatan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 75
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Saldo Awal SAIBA		13.055.538.687.281
Penambahan		
100	Penambahan Saldo Awal	4.439.061.200
101	Pembelian	2.718.747.419
102	Transfer Masuk	72.049.187.788
103	Hibah (Masuk)	6.097.049.000
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.005.415.714.703
107	Reklasifikasi Masuk	451.643.830.935
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	4.478.930.118
120	Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	74.514.271.552
121	Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	56.246.695.119
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T	129.710.077.555
202	Pengembangan Nilai Aset	71.203.524.918
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	361.185.329.077
TOTAL		2.239.702.419.384
Pengurangan		
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(13.969.736.800)
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	895.631.500
208	Pengembangan Melalui KDP	177.846.261.794
301	Penghapusan	(1.301.165.100)
302	Transfer Keluar	(72.049.187.788)
303	Hibah (Keluar)	(199.878.138.132)
304	Reklasifikasi Keluar	(486.830.274.813)
305	Koreksi Pencatatan	(362.195.267.999)
321	Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	(58.712.009.358)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(14.815.294.901)
TOTAL		(1.031.009.181.597)
Saldo Akhir SAIBA		14.264.231.925.068
Saldo Akhir SIMAK		14.841.215.178.411
Selisih		(576.983.253.343)

Terdapat selisih antara SAIBA dengan SIMAK-BMN sebesar (Rp576.983.253.343,00) yang disebabkan karena hasil revaluasi akan disajikan pada Laporan Keuangan K/L setelah seluruh objek revaluasi di seluruh K/L Pemerintahan Pusat selesai dinilai kembali.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp675.062.859.576,00 dan Rp177.359.729.434,00.

Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU

C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU

Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp438.244.547.193,00.

Mutasi total Jalan, Irigasi dan Bangunan Kementerian Kesehatan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 76
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

Saldo Awal SAIBA		615.604.276.627
Penambahan		
100	Penambahan Saldo Awal	51.620.220
101	Pembelian	6.672.607.274
102	Transfer Masuk	897.184.300
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	24.798.745.204
107	Reklasifikasi Masuk	6.950.085.640
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	186.076.761
120	Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	10.389.172.000
121	Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	6.542.710.775
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T	1.970.796.100
202	Pengembangan Nilai Aset	3.794.742.960
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	237.776.052
TOTAL		62.491.517.286
Pengurangan		
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(143.326.633)
208	Pengembangan Melalui KDP	12.127.506.527
301	Penghapusan	(2.000.000)
302	Transfer Keluar	(897.184.300)
303	Hibah (Keluar)	(11.064.292.878)
304	Reklasifikasi Keluar	(865.099.892)
305	Koreksi Pencatatan	(135.281.100)
321	Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	(1.211.537.395)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(841.718.666)
TOTAL		(3.032.934.337)
Saldo Akhir SAIBA		675.062.859.576
Saldo Akhir SIMAK		583.984.154.196
Selisih		91.078.705.380

Terdapat selisih antara SAIBA dengan SIMAK-BMN sebesar Rp91.078.705.380,00 yang disebabkan karena hasil revaluasi akan disajikan pada Laporan Keuangan setelah seluruh objek revaluasi di seluruh K/L Pemerintahan Pusat selesai dinilai kembali.

Aset Tetap Lainnya

C.27 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp253.351.060.234,00 dan Rp164.392.448.316,00.

Aset Tetap Lainnya BLU

C.28 Aset Tetap Lainnya BLU

Aset Tetap Lainnya BLU merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp0,00 dan Rp80.909.518.463,00.

Mutasi total Aset Tetap Lainnya Kementerian Kesehatan tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 77
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Awal SAIBA		245.301.966.779
Penambahan		
100	Penambahan Saldo Awal	2.355.384.000
101	Pembelian	11.373.315.647
102	Transfer Masuk	961.497.708
103	Hibah (Masuk)	15.030.200
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	4.826.990.300
107	Reklasifikasi Masuk	1.459.223.700
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T	5.065.947.201
	TOTAL	26.057.388.756
Pengurangan		
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(42.745.320)
302	Transfer Keluar	(2.639.767.708)
303	Hibah (Keluar)	(5.065.947.201)
304	Reklasifikasi Keluar	(2.042.372.860)
305	Koreksi Pencatatan	(7.534.741.072)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(682.721.140)
	TOTAL	(18.008.295.301)
Saldo Akhir SAIBA		253.351.060.234
Saldo Akhir SIMAK		253.351.060.234
Selisih		-

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
(KDP)

C.29 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo KDP per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp3.379.500.085.896,00 dan Rp1.802.252.509.888,00.

KDP BLU

C.30 KDP BLU

Saldo KDP BLU per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.685.746.111.723,00.

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap

C.31 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing (Rp25.854.414.067.643,00) dan (Rp22.490.122.582.907,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan KDP.

Tabel 78
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	30.298.593.008.907	(22.794.222.198.080)	7.504.370.810.827
2	Gedung dan Bangunan	14.264.231.925.068	(2.744.288.397.671)	11.519.943.527.397
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	675.062.859.576	(308.745.534.426)	366.317.325.150
4	Aset Tetap Lainnya	253.351.060.234	(7.157.937.466)	246.193.122.768
	Akumulasi Penyusutan	45.491.238.853.785	(25.854.414.067.643)	19.636.824.786.142

PIUTANG JANGKA PANJANG

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp7.390.847.640,00 dan Rp2.254.230.316,00. Rincian Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, sebagai berikut :

Tabel 79
Daftar Piutang Jangka Panjang Tahun 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Akun	Nama Akun	31 Des 2017	31 Des 2016	%
1521	Piutang Tagihan TP/TGR	7.228.460.378	1.813.179.303	298,66
1563	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	(172.208.207)	(62.008.956)	177,72
	Piutang Tagihan TP/TGR (<i>Netto</i>)	7.056.252.171	1.751.170.347	302,94
1522	Piutang Tagihan TP/TGR BLU	1.677.890.220	248.013.500	576,53
1564	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR BLU	(1.444.347.918)	(5.206.698)	27.640,19
	Piutang Tagihan TP/TGR BLU (<i>Netto</i>)	233.542.302	242.806.802	(3,82)
1551	Piutang Jangka Panjang lainnya	101.560.972	261.560.972	(61,17)
1569	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(507.805)	(1.307.805)	(61,17)
	Piutang Jangka Panjang lainnya (<i>Netto</i>)	101.053.167	260.253.167	(61,17)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		7.390.847.640	2.254.230.316	227,87

Saldo Piutang Jangka Panjang 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp5.136.617.324,00 atau meningkat sebesar 227,87%.

Secara rinci saldo masing-masing akun Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

*Piutang
Tagihan
TP/TGR*

C.32 Piutang Tagihan TP/TGR

Nilai Piutang Tagihan TP/TGR Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp7.228.460.378,00 dan Rp1.813.179.303,00. Tagihan TP adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan TGR adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian lebih lanjut terkait Piutang Tagihan TP/TGR sebagai berikut :

Tabel 80
Tagihan TP/TGR Tahun 2017 dan 2016 Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

No.	Eselon 1	31-Des-17	31-Des-16	Kenaikan (Penurunan)
1	SETJEN	361.646.781	294.331.191	67.315.590
2	DITJEN KESMAS	583.467.133	563.063.900	20.403.233
3	DITJEN YANKES	102.570.000	56.200.000	46.370.000
4	DITJEN P2P	1.037.087.108	737.444.791	299.642.317
5	DITJEN FARMALKES	45.521.000	74.249.000	(28.728.000)
6	BADAN PPSDM KES	5.098.168.356	87.890.421	5.010.277.935
Jumlah		7.228.460.378	1.813.179.303	5.415.281.075

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Tagihan
TP/TGR

C.33 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah (Rp172.208.207,00) dan (Rp62.008.956,00). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan TP/TGR merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan TP/TGR dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tabel 81
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan TP/TGR Tahun 2017 dan 2016
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

No.	Eselon 1	31-Des-17	31-Des-16	Kenaikan (Penurunan)
1	SETJEN	(66.174.269)	(1.876.438)	(64.297.831)
2	DITJEN KESMAS	(54.629.294)	(42.316.820)	(12.312.474)
3	DITJEN YANKES	(5.002.250)	(281.000)	(4.721.250)
4	DITJEN P2P	(20.683.947)	(16.724.001)	(3.959.946)
5	DITJEN FARMALKES	(227.605)	(371.245)	143.640
6	BADAN PPSDM KES	(25.490.842)	(439.452)	(25.051.390)
Jumlah		(172.208.207)	(62.008.956)	(110.199.251)

Nilai Tagihan TP/TGR (*Netto*) Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp7.056.252.171,00 dan Rp1.751.170.347,00. Rincian lebih lanjut terkait Tagihan Tuntutan TP/TGR (*Nettto*) :

Tabel 82
Tagihan TP/TGR Tahun 2017 dan 2016 Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

No.	Eselon 1	31-Des-17	31-Des-16	Kenaikan (Penurunan)
1	SETJEN	295.472.512	292.454.753	3.017.759
2	DITJEN KESMAS	528.837.839	520.747.080	8.090.759
3	DITJEN YANKES	97.567.750	55.919.000	41.648.750
4	DITJEN P2P	1.016.403.161	720.720.790	295.682.371
5	DITJEN FARMALKES	45.293.395	73.877.755	(28.584.360)
6	BADAN PPSDM KES	5.072.677.514	87.450.969	4.985.226.545
Jumlah		7.056.252.171	1.751.170.347	5.305.081.824

Piutang
Tagihan
TP/TGR BLU

C.34 Piutang Tagihan TP/TGR BLU

Nilai Piutang Tagihan TP/TGR BLU Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp1.677.890.220,00 dan Rp248.013.500,00 terdapat pada satker Ditjen Yankes.

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Tagihan
TP/TGR BLU

C.35 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR BLU

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR BLU Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah (Rp1.444.347.918,00) dan (Rp5.206.689,00) pada satker Ditjen Yankes.

Nilai Tagihan TP/TGR BLU (*Netto*) Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp233.542.302,00 dan Rp242.806.802,00 terdapat pada satker

Piutang
Jangka
Panjang
Lainnya

Ditjen Yankes.

C.36 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp101.560.972,00 dan Rp261.560.972,00 terdapat pada satker Ditjen Yankes.

C.37 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya

Penyisihan
Piutang
Tidak
Tertagih-

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah (Rp507.805,00) dan (Rp1.307.805,00) terdapat pada satker Ditjen Yankes.

Piutang
Jangka
Panjang
Lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto) Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp101.053.167,00 dan Rp260.253.167,00 terdapat pada satker Ditjen Yankes.

ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp327.585.328.973,00 dan Rp444.005.592.740,00. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, sebagai berikut :

Tabel 83
Daftar Aset Lainnya Tahun 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

AKUN	NAMA AKUN	31 Desember 2017	31 Desember 2016	%
1621	ATB	230.678.798.039	133.553.232.107	72,72
1622	ATB BLU	-	79.614.025.902	(100,00)
1624	ATB Dalam Pengerjaan-BLU	-	776.543.200	-
1631	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	6.680.396.861	7.878.117.509	(15,20)
1661	Aset Lain-lain	1.861.374.860.857	1.482.723.182.783	25,54
1662	Aset Lain-lain-BLU	-	234.035.417.779	(100,00)
1691	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.728.140.624.625)	(1.494.574.926.540)	15,63
	JUMLAH ASET LAINNYA	370.593.431.132	444.005.592.740	(16,53)

Saldo Aset Lainnya 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp73.412.161.608,00 atau menurun sebesar 16,53%.

Secara rinci saldo masing-masing akun Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

Aset Tak
Berwujud
(ATB)

C.38 Aset Tak Berwujud (ATB)

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp230.678.798.039,00 dan Rp133.553.232.107,00.

Tabel 84
Rincian Aset Tak Berwujud Tahun 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

No	URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016	%
1	Goodwill	-	-	-
2	Hak Cipta	30.087.995.788,00	21.828.216.288,00	37,84
3	Paten	5.650.250.000,00	4.960.100.000,00	13,91
4	Software	181.063.329.722,00	86.445.704.607,00	109,45
5	Lisensi	8.078.499.038,00	1.856.579.800,00	335,13
6	Hasil Kajian/Penelitian	2.091.959.299,00	-	-
7	Aset Tak Berwujud Lainnya	3.706.764.192,00	18.462.631.412,00	(79,92)
		230.678.798.039,00	133.553.232.107,00	72,72

ATB BLU

C.39 ATB BLU

Nilai perolehan ATB BLU per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp0,00 dan Rp79.614.025.902,00.

ATB Dalam Pengerjaan BLU

C.40 ATB Dalam Pengerjaan BLU

Nilai perolehan ATB Dalam Pengerjaan BLU per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp0,00 dan Rp776.543.200,00.

ATB merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Mutasi ATB pada Kementerian Kesehatan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 85
Rincian Mutasi ATB TA 2017

(dalam rupiah)

Saldo Awal SAIBA		213.943.801.209
Penambahan		
100	Penambahan Saldo Awal	149.000.000
101	Pembelian	16.982.636.585
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	996.984.850
107	Reklasifikasi Masuk	21.932.330.420
202	Pengembangan Nilai Aset	4.292.194.609
208	Pengembangan Melalui KDP	5.500.720.000
	TOTAL	49.853.866.464
Pengurangan		
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	1.257.392.627
304	Reklasifikasi Keluar	(21.678.688.880)
305	Koreksi Pencatatan	(1.407.239.823)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(10.513.790.358)
502	Perolehan/Penambahan KDP	413.717.300
503	Pengembangan KDP	5.307.444.350
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(6.497.704.850)
	TOTAL	(33.118.869.634)
Saldo Akhir SAIBA		230.678.798.039
Saldo Akhir SIMAK		230.678.798.039
Selisih		-

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

C.41 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp6.680.396.861,00 dan Rp7.878.117.509,00. Saldo Dana yang dibatasi Penggunaannya seluruhnya berasal dari sisa saldo Dana Jamkesmas. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 86
Rincian Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya TA 2017

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 31 Des 2016	Setor s.d Des 2017	Saldo 31 Des 2017
Jamkesmas Rujukan	7.854.175.701	1.197.720.648	6.656.455.053
Jamkesmas Dasar	23.941.808	0	23.941.808
Total	7.878.117.509	1.197.720.648	6.680.396.861

Rincian Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per satker pada lampiran 9 dan 10.

Aset Lain-
Lain

C.42 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.861.374.860.857,00 dan Rp1.482.723.182.783,00. Aset Lain-lain berupa BMN yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Kesehatan serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas BLU yang dibatasi penggunaannya.

Tabel 87
Daftar Aset Lain-lain TA 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	Aset Lain-lain	889.911.051
2	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1.849.453.843.698
3	ATB yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	11.031.106.108
JUMLAH		1.861.374.860.857

Aset Lain-
Lain BLU

C.43 Aset Lain-Lain BLU

Aset Lain-lain BLU per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp0,00 dan Rp234.035.417.779,00. Aset Lain-lain berupa BMN yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Kesehatan serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas BLU yang dibatasi penggunaannya.

Total Aset Lain-lain Kementerian Kesehatan tahun 2017 adalah sebesar Rp1.861.374.860.857,00, dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi total Aset Lain-Lain yang tidak digunakan dalam pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel 88
Mutasi Aset Lain-Lain TA 2017

(dalam rupiah)

Saldo Awal SAIBA	1.716.758.600.562
Penambahan	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	106.988.832.222
Usulan Barang Hibah DK/TP (BMN yang dihentikan)	210.868.729.892
Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	4.894.405.453
TOTAL	322.751.967.567
Pengurangan	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(967.227.875)
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(130.545.826.885)
Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(293.758.848)
Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	(2.604.782.106)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(43.720.611.558)
Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(3.500.000)
TOTAL	(178.135.707.272)
Saldo Akhir SAIBA	1.861.374.860.857
Saldo Akhir SIMAK	10.683.041.428.914
Selisih	(8.821.666.568.057)

Terdapat Selisih sebesar Rp8.821.666.568.057,00 yang disebabkan oleh :

- Pada RS H. Adam Malik terdapat aset dengan nilai Rp889.911.051,00 yang merupakan aset finansial yang tidak tercatat dalam SIMAK-BMN;
- Aset/BMN hasil pengadaan satker pusat yang sudah diserahkan kepada SKPD dikeluarkan dari Neraca SAIBA tetapi masih dicatat dalam SIMAK-BMN, dan
- Aset/BMN satker DK/TP hasil pengadaan dibawah tahun 2011 yang dikeluarkan dari Neraca SAIBA tetapi masih dicatat dalam SIMAK-BMN.

*Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya*

C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar (Rp1.728.140.624.625,00) dan (Rp1.494.574.926.540,00).

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp1.627.731.242.426,00 dan Rp1.316.606.028.013,00. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, sebagai berikut :

Tabel 89
Rincian Kewajiban Jangka Pendek TA 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

AKUN	NAMA AKUN	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Kenaikan/Penurunan	%
2121	Utang kepada Pihak Ketiga	1.492.156.224.516	1.189.124.596.465	303.031.628.051	25,48
2182	Hibah Yang Belum Disahkan	17.982.585.660	18.094.784.043	(112.198.383)	(0,62)
2192	Pendapatan Diterima Dimuka	116.097.544.526	107.974.260.223	8.123.284.303	7,52
2195	Utang Muka dari KPPN	1.320.666.799	1.399.069.596	(78.402.797)	(5,60)
2199	Utang Jangka Pendek Lainnya	174.220.925	13.317.686	160.903.239	1.208,19
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.627.731.242.426	1.316.606.028.013	311.125.214.413	23,63

Saldo Kewajiban Jangka Pendek 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp311.125.214.413,00 atau meningkat sebesar 23,63%. Secara rinci saldo masing-masing akun Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

C.45 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.492.156.224.516,00 dan Rp1.189.124.596.465,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Pada Kementerian Kesehatan, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari honor kegiatan yang belum dibagikan kepada pegawai, kekurangan gaji pegawai yang belum dibayar, belanja barang yang tagihannya belum dilunasi, dan belanja modal yang masih harus dibayar.

Tabel 90
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2017

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	57.720.700.906
2	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	14.399.704.406
3	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	25.989.696.123
4	Dana Pihak Ketiga	3.873.136.711
5	Dana Pihak Ketiga Lainnya – BLU	13.480.613.328
6	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	1.368.725.205.092
7	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	7.967.167.950
JUMLAH		1.492.156.224.516

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada masing-masing eselon 1 disajikan, sebagai berikut:

Tabel 91
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2017 Per Eselon 1

(dalam rupiah)

No.	Eselon 1	31-Des-17	31-Des-16	Kenaikan (Penurunan)
1	SETJEN	42.239.254	2.237.895.000	(2.195.655.746)
2	DITJEN KESMAS	26.719.559	400.472.264	(373.752.705)
3	DITJEN YANKES	1.476.612.614.142	1.177.272.696.949	299.339.917.193
4	DITJEN P2P	1.240.408.817	1.051.620.658	188.788.159
5	DITJEN FARMALKES	12.594.347	64.137.172	(51.542.825)
6	BALITBANGKES	711.994.562	477.058.045	234.936.517
7	BADAN PPSDM KES	13.509.653.835	7.620.716.377	5.888.937.458
Jumlah		1.492.156.224.516	1.189.124.596.465	303.031.628.051

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per satker pada lampiran 11.

*Hibah Yang
Belum
Disahkan*

C.46 Hibah Yang Belum Disahkan

Hibah Yang Belum Disahkan Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp17.982.585.660,00 dan Rp18.094.784.043,00.

*Pendapatan
Diterima
Dimuka*

C.47 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp116.097.544.526,00 dan Rp107.974.260.223,00. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBPN yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

Tabel 92
Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka	53.648.122.586
2	Pendapatan Diterima di Muka BLU	54.867.963.436
3	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	7.581.458.504
JUMLAH		116.097.544.526

Tabel 93
Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2017 dan 2016 Per Eselon 1

(dalam rupiah)

No.	Eselon 1	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Kenaikan (Penurunan)
1	SETJEN	4.580.427.418	2.807.089.145	1.773.338.273
2	DITJEN KESMAS	4.779.333	4.774.500	4.833
3	DITJEN YANKES	10.109.780.757	9.492.025.713	617.755.044
4	DITJEN P2P	11.893.344	53.182.002	(41.288.658)
5	DITJEN FARMALKES	1.992.500.000	8.970.750.000	(6.978.250.000)
6	BALITBANGKES	20.561.500	-	20.561.500
7	BADAN PPSDM KES	99.377.602.174	86.646.438.863	12.731.163.311
Jumlah		116.097.544.526	107.974.260.223	8.123.284.303

Uang Muka
dari KPPN

C.48 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp1.320.666.799,00 dan Rp1.399.069.596,00, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang
Jangka
Pendek
Lainnya

C.49 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp174.220.925,00 dan Rp13.317.686,00. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya pada masing-masing eselon 1 disajikan, sebagai berikut:

Tabel 94
Utang Jangka Pendek Lainnya TA 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

No.	Eselon 1	31 Des 17	31 Des 16	Kenaikan (Penurunan)
1	DITJEN YANKES	173.539.107	13.317.686	160.221.421
2	BADAN PPSDM KES	681.818	0	681.818
Jumlah		174.220.925	13.317.686	160.903.239

Ekuitas

C.50 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp46.294.000.266.444,00 dan Rp46.710.647.659.719,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam LPE.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

D.1 PENDAPATAN

Jumlah Pendapatan pada Kementerian Kesehatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp11.855.069.212.514,00 dan Rp11.330.339.747.254,00 atau mengalami kenaikan sebesar 4,63%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 95
Pendapatan 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Eselon 1	31 Des 17	31 Des 16	%
SETJEN	13.987.526.283	20.931.590.779	(33,18)
DITJEN KESMAS	1.500.226.725	1.325.761.398	13,16
DITJEN YANKES	10.692.346.214.196	10.333.757.007.268	3,47
DITJEN P2P	332.136.078.691	292.396.437.755	13,59
DITJEN FARMALKES	48.767.424.297	27.615.431.974	76,59
BALITBANGKES	3.342.953.466	4.451.573.936	(24,90)
BADAN PPSDM KES	780.747.074.657	649.861.944.144	20,14
KONSOLIDASI KEMENKES	(17.758.285.801)	-	100,00
JUMLAH	11.855.069.212.514	11.330.339.747.254	4,63

D.2 BEBAN

Jumlah beban pada Kementerian Kesehatan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp56.554.133.616.171,00 dan Rp56.277.972.457.580,00 dengan rincian jenis beban masing-masing yaitu:

Beban Pegawai

D.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp9.106.857.216.579,00 dan Rp10.356.791.122.766,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 96
Beban Pegawai per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Eselon 1	31 Des 17	31 Des 16	%
SETJEN	966.130.510.250	2.784.012.939.327	(65,30)
ITJEN	34.281.666.412	33.096.674.095	3,58
DITJEN KESMAS	59.787.217.553	54.316.196.080	10,07
DITJEN YANKES	6.316.447.380.998	5.814.016.611.927	8,64
DITJEN P2P	441.297.869.075	422.924.695.921	4,34
DITJEN FARMALKES	29.158.072.628	28.550.415.361	2,13
BALITBANGKES	144.328.641.483	145.106.572.875	(0,54)
BADAN PPSDM KES	1.116.276.730.680	1.074.767.017.180	3,86
KONSOLIDASI KEMENKES	(850.872.500)	-	100,00
JUMLAH	9.106.857.216.579	10.356.791.122.766	(12,07)

Beban
Persediaan**D.2.2 Beban Persediaan**

Beban Persediaan pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4.149.399.232.164,00 dan Rp4.265.156.978.310,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang persediaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perkantoran. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dan menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 97
Beban Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 17	31 Des 16	%
Beban Persediaan konsumsi	504.121.020.963	182.305.532.400	176,53
Beban Persediaan amunisi	5.000	-	100,00
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	32.974.100	105.073.100	(68,62)
Beban Persediaan bahan baku	188.075.933.934	99.813.135.967	88,43
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	9.794.922.876	183.275.116.458	(94,66)
Beban Persediaan Lainnya	3.447.374.375.291	351.887.981.062	879,68
Beban Persediaan BLU Pelayanan Kesehatan	-	3.419.965.012.231	(100,00)
Beban Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan	-	27.805.127.092	(100,00)
JUMLAH	4.149.399.232.164	4.265.156.978.310	(2,71)

Tabel 98
Beban Persediaan Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon 1	31 Des 17	31 Des 16	%
SETJEN	23.543.925.009	30.513.581.937	(22,84)
ITJEN	623.232.263	1.873.899.451	(66,74)
DITJEN KESMAS	12.762.257.923	88.968.399.970	(85,66)
DITJEN YANKES	3.732.907.386.722	3.435.863.444.340	8,65
DITJEN P2P	258.256.030.800	519.608.096.597	(50,30)
DITJEN FARMALKES	3.929.194.653	7.771.221.923	(49,44)
BALITBANGKES	58.924.541.976	120.529.992.085	(51,11)
BADAN PPSDM KES	58.452.662.818	60.028.342.007	(2,62)
JUMLAH	4.149.399.232.164	4.265.156.978.310	(2,71)

Beban
Barang
dan Jasa**D.2.3 Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.533.431.492.495,00 dan Rp5.649.890.539.577,00. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dan menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 99
Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 17	31 Des 16	%
Beban Keperluan Perkantoran	265.305.940.991	280.734.824.237	(5,50)
Beban Pengadaan Bahan Makanan	15.838.212.292	41.011.628.741	(61,38)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	13.593.247.347	17.762.505.620	(23,47)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.404.575.073	8.701.017.782	(14,90)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	175.904.663.973	120.655.369.085	45,79
Beban Barang Operasional Lainnya	75.047.393.613	149.407.657.616	(49,77)
Beban Bahan	380.003.021.381	391.585.004.898	(2,96)
Beban Honor Output Kegiatan	240.480.844.262	249.257.635.600	(3,52)
Beban dalam Rangka Refund Dana PHLN	-	2.226.502	(100,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	954.334.281.719	887.825.840.446	7,49
Beban Langganan Listrik	225.692.895.344	266.626.853.504	(15,35)
Beban Langganan Telepon	12.127.076.205	15.837.130.625	(23,43)
Beban Langganan Air	16.421.949.784	25.026.560.706	(34,38)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	18.294.502.131	17.766.804.697	2,97
Beban Jasa Pos dan Giro	1.968.855.841	1.783.960.412	10,36
Beban Jasa Konsultan	49.192.112.864	61.897.810.580	(20,53)
Beban Sewa	117.684.257.191	102.883.847.718	14,39
Beban Jasa Profesi	187.008.672.837	206.514.287.088	(9,45)
Beban Jasa Lainnya	762.138.001.363	512.606.810.021	48,68
Beban Barang	919.407.999.432	1.117.764.083.540	(17,75)
Beban Jasa	360.221.207.800	401.881.365.509	(10,37)
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	732.866.822.133	769.704.764.192	(4,79)
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	-	2.476.000	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	2.492.158.919	1.704.642.893	46,20
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	2.800.000	34.496.034	(91,88)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU	-	900.765.395	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomtabel ATB - BLU	-	10.170.136	(100,00)
JUMLAH	5.533.431.492.495	5.649.890.539.577	(2,06)

Tabel 100
Beban Barang dan Jasa Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon 1	31 Des 17	31 Des 16	%
SETJEN	272.108.485.968	359.288.176.729	(24,26)
ITJEN	8.431.256.892	7.433.269.368	13,43
DITJEN KESMAS	516.477.833.403	345.064.376.259	49,68
DITJEN YANKES	2.337.703.598.489	2.825.873.929.251	(17,28)
DITJEN P2P	678.126.187.130	537.328.127.609	26,20
DITJEN FARMALKES	67.804.720.896	69.401.638.489	(2,30)
BALITBANGKES	106.908.865.557	133.288.315.429	(19,79)
BADAN PPSDM KES	1.562.776.067.461	1.372.212.706.443	13,89
KONSOLIDASI KEMENKES	(16.905.523.301)	-	100,00
JUMLAH	5.533.431.492.495	5.649.890.539.577	(2,06)

Beban
Pemeliharaan

D.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.304.455.423.423,00 dan Rp1.036.014.871.240,00. Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dan menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 101
Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 17	31 Des 16	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	123.824.892.607	181.359.685.134	(31,72)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	3.276.891.346	9.525.318.341	(65,60)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	147.063.417.733	195.545.462.150	(24,79)
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	580.338.710	733.009.005	(20,83)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.017.664.150	11.145.097.232	(28,06)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	19.382.440	-	100,00
Beban Pemeliharaan Irigasi	163.128.200	118.560.000	37,59
Beban Pemeliharaan Jaringan	4.766.872.018	6.042.111.077	(21,11)
Beban Pemeliharaan Lainnya	1.444.778.223	1.459.167.340	(0,99)
Beban Pemeliharaan	458.504.273.206	343.037.022.412	33,66
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	52.318.122.713	34.009.097.822	53,84
Beban Persediaan suku cadang	504.475.662.077	253.040.340.727	99,37
JUMLAH	1.304.455.423.423	1.036.014.871.240	25,91

Tabel 102
Beban Pemeliharaan Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon 1	31-Des-17	31-Des-16	%
SETJEN	20.846.285.665	31.277.708.937	(33,35)
ITJEN	1.004.804.294	1.692.605.590	(40,64)
DITJEN KESMAS	6.187.623.470	6.287.102.192	(1,58)
DITJEN YANKES	1.079.932.545.251	781.917.722.812	38,11
DITJEN P2P	58.187.435.717	67.359.006.012	(13,62)
DITJEN FARMALKES	2.586.910.870	1.830.330.000	41,34
BALITBANGKES	18.318.803.763	19.825.251.017	(7,60)
BADAN PPSDM KES	117.391.014.393	125.825.144.680	(6,70)
JUMLAH	1.304.455.423.423	1.036.014.871.240	25,91

Beban
Perjalanan
Dinas

D.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.631.640.957.184,00 dan Rp2.839.797.760.514,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dan menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 103
Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-17	31-Des-16	%
Beban Perjalanan Biasa	913.799.943.027	942.166.121.797	(3,01)
Beban Perjalanan Tetap	645.325.477	1.013.667.587	(36,34)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	176.575.026.647	137.288.308.134	28,62
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	618.785.857.994	768.104.122.398	(19,44)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	652.733.902.889	777.638.331.251	(16,06)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	177.270.224.103	134.959.640.106	31,35
Beban Perjalanan Tetap - Luar Negeri	204.743.000	269.557.518	(24,04)
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	13.695.303.243	14.640.291.434	(6,45)
Beban Perjalanan	77.930.630.804	63.717.720.289	22,31
JUMLAH	2.631.640.957.184	2.839.797.760.514	(7,33)

Tabel 104
Beban Perjalanan Dinas Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon 1	31-Des-17	31-Des-16	%
SETJEN	377.057.772.482	441.210.360.146	(14,54)
ITJEN	44.627.056.873	48.507.499.379	(8,00)
DITJEN KESMAS	318.033.582.739	514.450.495.838	(38,18)
DITJEN YANKES	244.510.883.106	262.124.578.776	(6,72)
DITJEN P2P	751.355.843.112	739.860.678.157	1,55
DITJEN FARMALKES	100.275.569.560	144.975.164.253	(30,83)
BALITBANGKES	256.630.908.473	261.573.668.776	(1,89)
BADAN PPSDM KES	539.151.230.839	427.095.315.189	26,24
KONSOLIDASI KEMENKES	(1.890.000)	-	100,00
JUMLAH	2.631.640.957.184	2.839.797.760.514	(7,33)

*Beban
Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat*

D.2.6 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4.377.754.001.316,00 dan Rp2.964.106.922.061,00. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dan menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 105
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-17	31-Des-16	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	10.614.318.725	3.726.074.792	184,87
Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	442.973.629	6.107.546	7.152,89
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	4.366.696.708.962	2.908.956.723.027	50,11
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	51.418.016.696	(100,00)
JUMLAH	4.377.754.001.316	2.964.106.922.061	47,69

Tabel 106
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon 1	31-Des-17	31-Des-16	%
SETJEN	4.403.022.914	261.196.091	1.585,72
DITJEN KESMAS	770.326.937.451	650.019.105.163	18,51
DITJEN YANKES	20.053.785.369	399.791.575	4.916,06
DITJEN P2P	1.143.467.194.966	916.552.458.528	24,76
DITJEN FARMALKES	2.439.305.031.116	1.392.488.383.330	75,18
BALITBANGKES	8.970.500	2.629.396.374	(99,66)
BADAN PPSDM KES	189.059.000	1.756.591.000	(89,24)
JUMLAH	4.377.754.001.316	2.964.106.922.061	47,69

Beban
Bantuan
Sosial

D.2.7 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp25.418.433.302.000,00 dan Rp24.814.347.603.125,00 yang terdapat pada unit Eselon 1 Sekretariat Jenderal.

Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi

D.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp3.979.505.775.907,00 dan Rp4.275.703.136.645,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk ATB. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dan menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 107
Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-17	31-Des-16	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.351.686.955.979	2.527.840.460.978	32,59
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin – BLU	-	1.218.989.638.739	(100,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	492.772.341.941	120.309.197.572	309,59
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU	-	210.631.741.127	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	15.879.848.493	2.068.654.005	667,64
Beban Penyusutan Irigasi	3.160.718.973	1.378.466.066	129,29
Beban Penyusutan Jaringan	20.890.927.703	4.011.659.597	420,76
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	-	19.757.052.926	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	273.271.444	581.772.763	(53,03)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU	-	108.290.361	(100,00)
Beban Amortisasi Hak Cipta	184.905.606	60.479.139	205,73
Beban Amortisasi Paten	570.788.453	496.010.000	15,08
Beban Amortisasi Software	24.769.600.327	14.822.908.132	67,10
Beban Amortisasi Lisensi	751.000.101	181.914.928	312,83
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	-	41.305.000	(100,00)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	129.154.269	23.467.674	450,35
Beban Amortisasi Software-Badan Layanan Umum	-	9.514.852.697	(100,00)
Beban Amortisasi-Hak Cipta BLU	-	16.150.452	(100,00)
Beban Amortisasi-Paten BLU	-	37.222.143	(100,00)
Beban Amortisasi-Aset Tak Berwujud Lainnya-BLU	-	668.626.606	(100,00)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan – BLU	-	130.000	(100,00)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	68.436.262.618	139.319.606.371	(50,88)
Beban Penyusutan Aset Lain-lain BLU	-	827.148.819	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan BLU	-	4.016.380.550	(100,00)
JUMLAH	3.979.505.775.907	4.275.703.136.645	(6,93)

Tabel 108
Beban Penyusutan dan Amortisasi Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon 1	31-Des-17	31-Des-16	%
SETJEN	64.021.636.354	64.944.130.618	(1,42)
ITJEN	3.172.017.102	2.898.364.845	9,44
DITJEN KESMAS	22.782.190.031	47.295.077.616	(51,83)
DITJEN YANKES	3.389.298.753.266	3.579.302.040.782	(5,31)
DITJEN P2P	181.582.701.735	189.749.986.654	(4,30)
DITJEN FARMALKES	7.090.921.648	7.654.042.240	(7,36)
BALITBANGKES	56.323.716.610	52.006.426.814	8,30
BADAN PPSDM KES	370.631.205.477	331.853.067.076	11,69
KONSOLIDASI KEMENKES	(115.397.366.316)	-	100,00
JUMLAH	3.979.505.775.907	4.275.703.136.645	(6,93)

Beban
Penyisihan
Piutang
Tak
Tertagih

D.2.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp52.656.215.103,00 dan Rp76.163.523.342,00. Beban penyisihan piutang tak tertagih adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi piutang yang tidak tertagih atas nilai suatu piutang yang dalam periode tahun anggaran 2017 adalah terkait Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – TP/TGR.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dan menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 109
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-17	31-Des-16	%
Beban Penyisihan Piutang PNPB	2.616.963.350	716.100.467	265,45
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	1.148.281.693	59.060.873	1.844,23
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	14.796.624	(318.651)	(4.743,52)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR BLU	-	324.778	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	41.942.854.884	75.064.972.917	(44,12)
Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	60.951.249	1.322.041	4.510,39
Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	28.798.878	(34.299.509)	(183,96)
Beban Penyisihan Piutang Sewa Tanah BLU	225.000	-	100,00
Beban Penyisihan Piutang Sewa Gedung BLU	56.424.813	201.379.986	(71,98)
Beban Penyisihan Piutang Sewa Ruangan BLU	6.978.174	10.436.335	(33,14)
Beban Penyisihan Piutang Sewa Lainnya BLU	150.000	-	100,00
Beban Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	5.230.124.379	121.863.076	4.191,80
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR	110.769.839	17.290.199	540,65
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR BLU	1.439.696.220	4.083.025	35.160,53
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(800.000)	1.307.805	(161,17)
JUMLAH	52.656.215.103	76.163.523.342	(30,86)

Tabel 110
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon 1	31-Des-17	31-Des-16	%
SETJEN	63.999.090	2.577.979	2,382,53
DITJEN KESMAS	25.550.837	18.675.122	36,82
DITJEN YANKES	49.115.005.013	76.257.130.395	(35,59)
DITJEN P2P	3.372.261.052	(97.274.365)	(3.566,75)
DITJEN FARMALKES	(11.017.589)	(26.974.265)	(59,16)
BALITBANGKES	(609.279)	639.824	(195,23)
BADAN PPSDM KES	91.025.979	8.748.652	940,46
JUMLAH	52.656.215.103	76.163.523.342	(30,86)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

D.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya rutin dan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas, merupakan selisih lebih/kurang dari hasil pendapatan operasional dan beban operasional. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar (Rp44.699.064.403.657,00) dan (Rp44.947.632.710.326,00) adalah sebagai berikut:

Tabel 111
Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Operasional per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-17	31-Des-16	%
Jumlah Pendapatan Operasional	11.855.069.212.514	11.330.339.747.254	4,63
Jumlah Beban Operasional	56.554.133.616.171	56.277.972.457.580	0,49
Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional	(44.699.064.403.657)	(44.947.632.710.326)	(0,55)

Tabel 112
Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon I	31-Des-17	31-Des-16	%
SETJEN	(27.132.621.413.449)	(28.504.926.684.110)	(4,81)
ITJEN	(92.140.033.836)	(95.502.312.728)	(3,52)
DITJEN KESMAS	(1.704.882.966.682)	(1.705.093.666.842)	(0,01)
DITJEN YANKES	(6.477.623.124.018)	(6.441.998.242.590)	0,55
DITJEN P2P	(3.183.509.444.896)	(3.100.889.337.358)	2,66
DITJEN FARMALKES	(2.601.371.979.485)	(1.625.028.789.357)	60,08
BALITBANGKES	(638.100.885.617)	(730.508.689.258)	(12,65)
BADAN PPSDM KES	(2.984.211.921.990)	(2.743.684.988.083)	8,77
KONSOLIDASI KEMENKES	115.397.366.316	-	100,00
JUMLAH	(44.699.064.403.657)	(44.947.632.710.326)	(0,55)

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit
Pelepasan
Aset Non
Lancar

D.4 SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR

Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar (Rp225.530.045.285,00) dan (Rp256.093.851.879,00), diperoleh dari hasil perhitungan yaitu pendapatan pelepasan aset non lancar dikurangi beban atas pelepasan aset non lancar, yaitu:

Pendapatan
Pelepasan
Aset Non
Lancar

D.4.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar adalah pendapatan yang dihasilkan dari penjualan aset non lancar karena hasil penjualan lebih besar daripada nilai bukannya. Pendapatan pelepasan aset non lancar untuk pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp5.920.820.287,00 dan Rp4.075.760.361,00. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 113
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon 1	31 Des 17	31 Des 16	%
SETJEN	379.413.131	65.100.000	482,82
ITJEN	155.679.089	22.500.000	591,91
DITJEN KESMAS	149.326.000	8.800.000	1.596,89
DITJEN YANKES	2.341.571.323	2.153.208.298	8,75
DITJEN P2P	1.096.745.999	588.867.954	86,25
DITJEN FARMALKES	16.500.000	73.399.000	(77,52)
BALITBANGKES	157.920.000	113.392.000	39,27
BADAN PPSDM KES	1.623.664.745	1.050.493.109	54,56
JUMLAH	5.920.820.287	4.075.760.361	45,27

Beban
Pelepasan
Aset Non
Lancar

D.4.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar adalah kerugian yang dihasilkan dari penjualan aset non lancar karena hasil penjualan lebih kecil daripada nilai bukannya. Beban Pelepasan Aset Non Lancar pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp231.450.865.572,00 dan Rp260.169.612.240,00. Beban Pelepasan Aset Non Lancar menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 114
Beban Pelepasan Aset Non Lancar Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon 1	31-Des-17	31-Des-16	%
SETJEN	3.617.828.058	105.701.459	3.322,69
ITJEN	17.516.675	-	100,00
DITJEN KESMAS	38.501.402.833	37.125.806.912	3,71
DITJEN YANKES	143.734.552.136	206.817.585.714	(30,50)
DITJEN P2P	38.706.106.213	10.934.686.397	253,98
DITJEN FARMALKES	31.721.250	875.797.797	(96,38)
BALITBANGKES	3.678.572	275.909.531	(98,67)
BADAN PPSDM KES	6.151.659.835	4.034.124.430	52,49
KONSOLIDASI KEMENKES	686.400.000	-	100,00
JUMLAH	231.450.865.572	260.169.612.240	(11,04)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

D.5 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp261.425.548.065,00 dan Rp206.697.694.279,00, diperoleh dari perhitungan yaitu pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya dikurangi beban dari kegiatan non operasional lainnya, yaitu:

Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

D.5.1 Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah penerimaan-penerimaan dari kegiatan non operasional Kementerian Kesehatan, seperti penerimaan kembali belanja-belanja dari Tahun Anggaran Yang Lalu, yang pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp992.527.143.000,00 dan Rp534.722.242.871,00. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 115
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon 1	31-Des-17	31-Des-16	%
SETJEN	62.489.166.594	4.878.049.849	1.181,03
ITJEN	218.810.625	29.432.382	643,43
DITJEN KESMAS	2.453.671.467	11.119.491.103	(77,93)
DITJEN YANKES	831.431.793.370	290.503.010.859	186,20
DITJEN P2P	26.177.793.137	65.952.238.375	(60,31)
DITJEN FARMALKES	40.457.232.029	96.884.524.840	(58,24)
BALITBANGKES	1.029.992.624	4.703.397.991	(78,10)
BADAN PPSDM KES	28.268.683.154	60.652.097.472	(53,39)
JUMLAH	992.527.143.000	534.722.242.871	85,62

Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

D.5.2 Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah kerugian dari kegiatan non operasional Kementerian Kesehatan, antara lain merupakan beban penyesuaian nilai persediaan dan kerugian persediaan rusak/usang. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp731.101.594.935,00 dan Rp328.024.548.592,00.

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 116
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon 1	31-Des-17	31-Des-16	%
SETJEN	1.467.486.785	675.819.053	117,14
ITJEN	208.434.314	26.101.028	698,57
DITJEN KESMAS	121.242.788	9.878.502.106	(98,77)
DITJEN YANKES	673.587.093.953	200.931.100.921	235,23
DITJEN P2P	39.169.791.972	44.104.267.338	(11,19)
DITJEN FARMALKES	13.924.243.467	59.114.794.772	(76,45)
BALITBANGKES	1.183.976.924	10.028.978.657	(88,19)
BADAN PPSDM KES	1.439.324.732	3.264.984.717	(55,92)
JUMLAH	731.101.594.935	328.024.548.592	122,88

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

D.6 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas, yang dalam hal ini adalah selisih dari hasil pelepasan aset non lancar dan kegiatan non operasional lainnya. Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp35.895.502.780,00 dan (Rp49.936.157.600,00) adalah sebagai berikut:

Tabel 117
Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-17	31-Des-16	%
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(225.530.045.285)	(256.093.851.879)	(11,93)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	261.425.548.065	206.697.694.279	26,48
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	35.895.502.780	(49.396.157.600)	(172,67)

Tabel 118
Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon 1	31-Des-17	31-Des-16	%
SETJEN	57.783.264.882	4.161.629.337	1.288,48
ITJEN	148.538.725	25.831.354	475,03
DITJEN KESMAS	(36.019.648.154)	(35.876.017.915)	0,40
DITJEN YANKES	16.451.718.604	(115.092.467.478)	(114,29)
DITJEN P2P	(50.601.359.049)	11.502.152.594	(539,93)
DITJEN FARMALKES	26.517.767.312	36.967.331.271	(28,27)
BALITBANGKES	257.128	(5.488.098.197)	(100,00)
BADAN PPSDM KES	22.301.363.332	54.403.481.434	(59,01)
KONSOLIDASI KEMENKES	(686.400.000)	-	100,00
JUMLAH	35.895.502.780	(49.396.157.600)	(172,67)

Surplus/Defisit LO

D.7 SURPLUS/DEFISIT LO

Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan dari surplus/defisit kegiatan operasional dan surplus/defisit kegiatan non operasional. Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar (Rp44.663.168.900.877,00) dan (Rp44.997.028.867.926,00) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 119
Surplus/Defisit Laporan Operasional 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-17	31-Des-16	%
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(44.699.064.403.657)	(44.947.632.710.326)	(0,55)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	35.895.502.780	(49.396.157.600)	(172,67)
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(44.663.168.900.877)	(44.997.028.867.926)	(0,74)

Tabel 120
Rincian Surplus/Defisit Laporan Operasional Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon 1	31-Des-17	31-Des-16	%
SETJEN	(27.074.838.148.567)	(28.500.765.054.773)	(5,00)
ITJEN	(91.991.495.111)	(95.476.481.374)	(3,65)
DITJEN KESMAS	(1.740.902.614.836)	(1.740.969.684.757)	(0,00)
DITJEN YANKES	(6.461.171.405.414)	(6.557.090.710.068)	(1,46)
DITJEN P2P	(3.234.110.803.945)	(3.089.387.184.764)	4,68
DITJEN FARMALKES	(2.574.854.212.173)	(1.588.061.458.086)	62,14
BALITBANGKES	(638.100.628.489)	(735.996.787.455)	(13,30)
BADAN PPSDM KES	(2.961.910.558.658)	(2.689.281.506.649)	10,14
KONSOLIDASI KEMENKES	114.710.966.316	-	100,00
JUMLAH	(44.663.168.900.877)	(44.997.028.867.926)	(0,74)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*Ekuitas Awal***E.1 EKUITAS AWAL**

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp46.710.647.659.719,00 dan Rp44.161.709.887.849,00.

*Surplus/Defisit LO***E.2 SURPLUS/DEFISIT LO**

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar (Rp44.663.168.900.877,00) dan (Rp44.997.028.867.926,00). Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan dari defisit kegiatan operasional dan surplus kegiatan non operasional.

Tabel 121
Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2017 dan 2016
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon 1	31-Des-17	31-Des-16	%
SETJEN	(27.074.838.148.567)	(28.500.765.054.773)	(5,00)
ITJEN	(91.991.495.111)	(95.476.481.374)	(3,65)
DITJEN KESMAS	(1.740.902.614.836)	(1.740.969.684.757)	(0,00)
DITJEN YANKES	(6.461.171.405.414)	(6.557.090.710.068)	(1,46)
DITJEN P2P	(3.234.110.803.945)	(3.089.387.184.764)	4,68
DITJEN FARMALKES	(2.574.854.212.173)	(1.588.061.458.086)	62,14
BALITBANGKES	(638.100.628.489)	(735.996.787.455)	(13,30)
BADAN PPSDM KES	(2.961.910.558.658)	(2.689.281.506.649)	10,14
KONSOLIDASI KEMENKES	114.710.966.316	-	100,00
JUMLAH	(44.663.168.900.877)	(44.997.028.867.926)	(0,74)

*Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas***E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS**

Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp307.676.167.991,00 dan Rp796.698.134.526,00. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas merupakan penjumlahan dari koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset, koreksi nilai aset non revaluasi dan koreksi lain-lain.

*Koreksi Nilai Persediaan***E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp112.869.821.788,00 dan Rp192.970.413.971,00.

Koreksi Nilai Persediaan menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 122
Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Nama Unit	31-Des-17	31-Des-16	%
SETJEN	189.904.011	-	100,00
DITJEN KESMAS	-	12.709.620	(100,00)
DITJEN YANKES	19.453.550.566	131.701.043.824	(85,23)
DITJEN P2P	92.569.021.074	61.167.084.127	51,34
BALITBANGKES	-	89.576.400	(100,00)
BADAN PPSDM KES	657.346.137	-	100,00
Jumlah	112.869.821.788	192.970.413.971	(41,51)

Penyebab Koreksi Nilai Persediaan pada tahun 2017 antara lain:

- a) Setjen : Terdapat penyesuaian pada nilai Persediaan yang terjadi pada tahun sebelumnya dan dilakukan koreksi pada tahun berjalan;
- b) Ditjen Yankes : Penginputan kembali saldo awal pada aplikasi persediaan (dari yang sebelumnya gelondongan menjadi rinci per item). Hal tersebut antara lain terjadi pada RS Kanker Dharmais dan RSJ DR. Radjiman Wediodiningrat Lawang;
- c) Ditjen P2P : Terdapat koreksi pencatatan Persediaan karena masih terdapat persediaan yang belum diinput pada Aplikasi Persediaan;
- d) Badan PPSDM Kes : penginputan kembali saldo awal pada aplikasi persediaan. Hal tersebut antara lain terjadi pada Poltekkes Bandung, Poltekkes Tanjung Karang, Poltekkes Denpasar, dan Poltekkes Gorontalo.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan per satker pada lampiran 12.

*Selisih
Revaluasi
Aset Tetap*

E.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp588.643.559.999,00, dengan rincian menurut unit Eselon 1 sebagai berikut:

Tabel 123
Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Nama Unit	31 Des 17	31 Des 16	%
SETJEN	2.831.671.343.319	588.643.559.999	381,05
DITJEN KESMAS	10.172.855.982	-	100,00
DITJEN YANKES	32.620.539.563.425	-	100,00
DITJEN P2P	387.024.469.610	-	100,00
BALITBANGKES	132.727.967.192	-	100,00
BADAN PPSDM KES	11.543.124.199.416	-	100,00
KONSOLIDASI KEMENKES	(47.525.260.398.944)	-	100,00
Jumlah	-	588.643.559.999	(100,00)

Sesuai dengan kebijakan penyusunan LKPP dan LKKL tahun 2017 *audited* bahwa hasil revaluasi BMN pada tahun 2017 tidak disajikan dalam LKKL tahun 2017.

*Koreksi Nilai
Aset Tetap
Non
Revaluasi*

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp111.403.404.640,00 dan (Rp10.483.933.859,00). Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi ini berasal dari transaksi Koreksi Nilai Aset Tetap yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 124
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2017 dan 2016
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Nama Unit	31 Des 17	31 Des 16	%
SETJEN	(4.109.004.543)	1.239.559.368	(431,49)
ITJEN	(76.987.500)	(71.627.557)	7,48
DITJEN KESMAS	(119.557.675)	28.670.694.877	(100,42)
DITJEN YANKES	(21.189.539.361)	(72.218.603.887)	(70,66)
DITJEN P2P	19.066.650.315	17.853.210.569	6,80
DITJEN FARMALKES	(1.026.094.561)	1.162.773.110	(188,25)
BALITBANGKES	809.820.875	4.510.395.465	(82,05)
BADAN PPSDM KES	118.048.117.090	8.369.664.196	1.310,43
Jumlah	111.403.404.640	(10.483.933.859)	(1.162,61)

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per satker pada lampiran 13.

Penyebab terjadinya Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi antara lain disebabkan oleh adanya:

1. Reklasifikasi masuk dan keluar atas Aset Tetap/ATB;
2. Koreksi atas pencatatan nilai Aset Tetap dan Penyusutannya;
3. Reklasifikasi masuk dan keluar atas Aset Tetap Renovasi.

*Koreksi Nilai
Aset Lainnya
Non
Revaluasi*

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar (Rp15.791.754.043,00) dan (Rp91.813.839.928,00). Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi ini berasal dari transaksi Koreksi Nilai Aset Lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 125
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2017 dan 2016
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Nama Unit	31 Des 17	31 Des 16	%
SETJEN	(427.773.389)	(20.393.332.699)	(97,90)
ITJEN	-	(1.876.890.429)	(100,00)
DITJEN KESMAS	-	(150.149.750)	(100,00)
DITJEN YANKES	(5.585.780.649)	(43.422.595.942)	(87,14)
DITJEN P2P	111.750.000	(5.727.826.284)	(101,95)
DITJEN FARMALKES	(207.933.668)	(9.280.191.539)	(97,76)
BALITBANGKES	(17.424.598)	(2.217.760.005)	(99,21)
BADAN PPSDM KES	(9.664.591.739)	(8.745.093.280)	10,51
Jumlah	(15.791.754.043)	(91.813.839.928)	(82,80)

Rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi per satker pada lampiran 14.

Penyebab terjadinya Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi antara lain disebabkan oleh adanya reklasifikasi masuk dan keluar atas ATB/Aset Lain-lain.

*Koreksi Lain-
lain*

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp99.194.695.606,00 dan Rp117.381.934.343,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait BMN, antara lain koreksi atas

kas, pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Tabel 126
Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2017 dan 2016
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Nama Unit	31-Des-17	31-Des-16	%
SETJEN	(1.746.493.900)	(59.931.259.638)	(97,09)
DITJEN KESMAS	(25.293)	(1.576.309.756)	(100,00)
DITJEN YANKES	203.688.962.093	201.388.177.568	1,14
DITJEN P2P	(102.538.158.466)	(180.362.260)	56.751,23
DITJEN FARMALKES	-	3.713.658.636	(100,00)
BALITBANGKES	(9.392.278)	581.996.704	(101,61)
BADAN PPSDM KES	(200.196.550)	(26.613.966.911)	(99,25)
Jumlah	99.194.695.606	117.381.934.343	(15,49)

Rincian Koreksi Lain-lain per satker pada lampiran 15.

Penyebab Koreksi Lain-lain TA 2017 antara lain disebabkan oleh:

1. Setjen : Adanya koreksi Beban Pegawai berupa uang makan tahun 2016 yang belum disajikan sebagai utang pada tahun 2016;
2. Ditjen Yankes : Koreksi akibat adanya penyesuaian pada akun-akun yang terjadi pada tahun sebelumnya dan dilakukan koreksi pada tahun berjalan;
3. Ditjen P2P : Koreksi atas beban jasa atas Hibah Langsung Barang dan Jasa (MPHL BJS) tahun 2016 yang disahkan di tahun 2017 pada Sakter Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan zoonotik dan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
4. Badan PPSDM Kes : Koreksi akibat adanya penyesuaian pada akun-akun yang terjadi pada tahun sebelumnya dan dilakukan koreksi pada tahun berjalan.

*Transaksi
Antar Entitas*

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp43.938.845.339.611,00 dan Rp46.749.268.505.270,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN yang mencakup ditagihkan kepada dan diterima dari entitas lain, transfer masuk dan keluar, serta pengesahan dan pengembalian hibah langsung. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 127
Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-17	31-Des-16	%
Ditagihkan ke Entitas Lain	42.971.525.630.081	46.445.876.814.539	(7,48)
Diterima dari Entitas Lain	(930.196.917.754)	(887.498.790.803)	4,81
Sub Jumlah	42.041.328.712.327	45.558.378.023.736	(7,72)
Transfer Masuk	1.035.429.902.087	1.533.964.157.390	(32,50)
Transfer Keluar	(1.028.785.742.093)	(1.501.449.710.922)	(31,48)
Sub Jumlah	6.644.159.994	32.514.446.468	(79,57)
Pengesahan Hibah Langsung	1.898.746.755.075	1.174.421.108.253	61,68
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(7.874.287.785)	(16.045.073.187)	(50,92)
Sub Jumlah	1.890.872.467.290	1.158.376.035.066	63,23
JUMLAH TOTAL	43.938.845.339.611	46.749.268.505.270	(6,01)

Rincian Transaksi Antar Entitas Menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 128
Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2017 dan 2016
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Nama Unit	31-Des-17	31-Des-16	%
SETJEN	27.030.624.089.696	28.550.853.943.934	(5,32)
ITJEN	91.747.615.121	95.543.511.804	(3,97)
DITJEN KESMAS	1.733.180.300.307	1.715.082.086.067	1,06
DITJEN YANKES	4.842.342.174.087	6.217.957.253.154	(22,12)
DITJEN P2P	3.818.991.212.475	4.272.022.140.370	(10,60)
DITJEN FARMALKES	2.541.635.743.806	1.649.864.889.996	54,05
BALITBANGKES	642.942.054.068	727.024.324.411	(11,57)
BADAN PPSDM KES	3.237.382.150.051	3.520.920.355.534	(8,05)
Jumlah	43.938.845.339.611	46.749.268.505.270	(6,01)

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2017, DDEL sebesar (Rp930.196.917.754,00) sedangkan DKEL sebesar Rp42.971.525.630.081,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.035.429.902.087,00. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar (Rp1.028.785.742.093,00).

Selisih Transfer Masuk dan Transfer Keluar (TM/TK) secara keseluruhan sebesar Rp6.644.159.994,00, dimana Transfer Masuk lebih besar dibandingkan Transfer Keluar. Dari selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Aset yang diserahkan ke Kementerian/Lembaga lain dengan nilai buku sebesar Rp10.721.784.649,00; dengan rincian Kementerian Negara/Lembaga sebagai berikut:

Tabel 129
Rincian Kementerian Negara/Lembaga Penerima Aset
dari Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2017

No.	Kementerian Negara/Lembaga	Nilai Buku
1	Kementerian Agama	22.073.100
2	Kementerian Sosial	0
3	Kementerian Pariwisata	49.700.000
4	Badan Intelijen Negara	49.700.000
5	BP POM	10.380.211.549
6	Badan Koordinasi Penanaman Modal	56.800.000
7	Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional	56.800.000
8	Kementerian Perdagangan	49.700.000
9	BNPT	56.800.000
	Total	10.721.784.649

- Adanya Transfer Masuk berupa Kas Hibah dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada satker Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit senilai Rp17.336.866.825,00;

- Adanya perbedaan kode barang, kesalahan pencatatan kode satker, dan penyesuaian harga atas barang yang ditransfer akibat terdapatnya perolehan barang sejenis di bulan berjalan senilai Rp29.077.818,00.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.898.746.755.075,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp7.874.287.785,00.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung TA 2017 per satker terdapat pada lampiran 16.

*Ekuitas
Akhir*

E.5 EKUITAS AKHIR

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp46.294.000.266.444,00 dan Rp46.710.647.659.719,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan satker BLU ke dalam laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-469/MK.5/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Penundaan Penerapan Ketentuan Paragraf 26 dan Paragraf 82 PSAP 13 sampai dengan penyusunan laporan keuangan BLU Tahun 2018;
2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1670.1/MK.5/2018 tanggal 14 Februari 2018 Hal Penerapan Ketentuan Paragraf 26 dan Paragraf 86 PSAP 13;
3. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-1722/PB/2018 tanggal 15 Februari hal Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Penerapan Ketentuan Paragraf 26 dan Paragraf 82 PSAP 13.

Berdasarkan kebijakan tersebut maka:

1. Satker BLU agar mengidentifikasi bagian pendapatan BLU yang menjadi hak mitra KSO dan memastikan penerapan asas *netto* dalam pengakuan pendapatan BLU yang berasal dari perjanjian KSO tersebut (mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO);
2. Dalam hal Satker BLU telah mengesahkan pendapatan BLU yang berasal dari perjanjian KSO sebesar 100% (termasuk bagian pendapatan yang menjadi hak mitra KSO), satker BLU agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Mengidentifikasi bagian pendapatan yang menjadi hak mitra KSO dalam pengakuan pendapatan BLU yang berasal dari perjanjian KSO dengan menyusun kertas kerja sesuai format sebagaimana lampiran surat tersebut;
 - b. Melakukan koreksi pendapatan dan belanja/beban BLU yang disajikan di LRA dan LO tahun 2017 berdasarkan kertas kerja di atas, dengan mengajukan SP3B - BLU ke KPPN mitra kerja. Koreksi pada SP3B BLU tersebut dicantumkan sebesar nilai negatif pendapatan dan belanja dengan jumlah yang sama;
 - c. Pengajuan SP3B - BLU ke KPPN mitra kerja dilakukan pada tanggal 15 sampai dengan 20 Februari 2018, untuk selanjutnya diterbitkan SP2B - BLU oleh KPPN mitra kerja paling lambat tanggal 21 Februari 2018;
 - d. Setelah menerima SP2B BLU, satker agar memproses pada aplikasi SAIBA dan mengunggah kembali ke aplikasi e-Rekon & LK sesuai jadwal penyusunan LKKL Tahun 2017;
3. Dalam hal satker BLU telah mengesahkan pendapatan BLU yang berasal dari perjanjian KSO sebesar bagian pendapatan BLU saja (tidak termasuk bagian pendapatan yang menjadi hak mitra KSO), satker BLU tidak perlu melakukan koreksi pendapatan dan belanja/beban BLU yang disajikan di

LRA dan LO Tahun 2017.

Pada Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan TA 2017 *Audited* seluruh satuan kerja BLU sudah menerapkan kebijakan tersebut di atas dengan kondisi sebagai berikut:

1. Sebanyak 15 satker telah mengesahkan pendapatan BLU yang berasal dari perjanjian KSO sebesar bagian pendapatan BLU saja (tidak termasuk bagian pendapatan yang menjadi hak mitra KSO) sehingga satker BLU tidak perlu melakukan koreksi pendapatan dan belanja/beban BLU yang disajikan di LRA dan LO Tahun 2017;
2. Sebanyak 7 (tujuh) satker telah melakukan koreksi pendapatan dan belanja/beban BLU yang disajikan di LRA dan LO tahun 2017 berdasarkan kertas kerja di atas, dengan mengajukan SP3B - BLU ke KPPN mitra kerja. Koreksi pada SP3B BLU tersebut dicantumkan sebesar nilai negatif pendapatan dan belanja dengan jumlah yang sama;
3. Sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) satker tidak terdapat KSO.

F.2. PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.2.1 Penilaian Kembali Barang Milik Negara (Revaluasi)

Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, Pemerintah melakukan Penilaian Kembali (Revaluasi) BMN berupa aset tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan atas BMN berupa Aset Tetap :

- a. Tanah
- b. Gedung dan bangunan; dan
- c. Jalan, irigasi dan jaringan yang meliputi:
 - 1) Jalan dan jembatan, dan
 - 2) Bangunan air

Pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian Kembali BMN juga dilaksanakan terhadap Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018. Sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-761/MK.06/2017 tanggal 14 September 2017 hal Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan setelah pencaangan pada tanggal 29 Agustus 2017.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan DJKN Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah.

Untuk Kementerian Kesehatan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN mulai tahun 2017 dan selesai tahun 2018 Hasil Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, sebanyak 208 satuan kerja target yang harus diselesaikan dan sebanyak 197 Satuan Kerja yang sudah selesai melakukan Penilaian Kembali BMN dengan total nilai kenaikan/(penurunan) nilai BMN sebesar Rp47.525.260.398.944,00 yang berasal dari selisih nilai buku tercatat (administrasi) dan nilai wajar hasil penilaian dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah

Revaluasi atas tanah dilaksanakan pada semester II tahun 2017 dengan koreksi nilai tim penertiban aset sebesar Rp44.924.746.286.420,00 yang terdapat pada:

Tabel 130
Koreksi Nilai (Revaluasi) atas Tanah

(dalam rupiah)

NO.	ESELON I	JUMLAH
1	SETJEN	2.583.176.704.769
2	DITJEN KESMAS	20.317.665.300
3	DITJEN YANKES	30.872.901.103.331
4	DITJEN P2P	315.429.158.601
5	BALITBANGKES	75.366.899.000
6	BADAN PPSDM KES	11.057.554.755.419
	JUMLAH	44.924.746.286.420

2. Gedung dan Bangunan

Revaluasi atas Gedung dan Bangunan dilaksanakan pada semester II tahun 2017 dengan koreksi nilai tim penertiban aset sebesar Rp576.983.253.343,00 yang terdapat pada:

Tabel 131
Koreksi Nilai (Revaluasi) atas Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

NO.	ESELON I	JUMLAH
1	SETJEN	139.445.414.452
2	DITJEN KESMAS	(17.434.233.422)
3	DITJEN YANKES	328.973.559.682
4	DITJEN P2P	22.759.472.040
5	BALITBANGKES	30.346.642.150
6	BADAN PPSDM KES	72.892.398.441
	JUMLAH	576.983.253.343

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Revaluasi atas Jalan, Jaringan, Irigasi dilaksanakan pada semester II tahun 2017 dengan koreksi nilai tim penertiban aset sebesar (Rp91.078.705.380,00) yang terdapat pada:

Tabel 132
Koreksi Nilai (Revaluasi) atas Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

NO.	ESELON I	JUMLAH
1	SETJEN	378.943.000
2	DITJEN YANKES	(15.991.084.002)
3	DITJEN P2P	(1.190.215.603)
4	BALITBANGKES	595.982.055
5	BADAN PPSDM KES	(74.872.330.830)
	JUMLAH	(91.078.705.380)

Hasil revaluasi akan disajikan pada Laporan Keuangan setelah seluruh objek revaluasi di seluruh K/L Pemerintah Pusat selesai dinilai kembali.

4. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Revaluasi atas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dilaksanakan pada semester II tahun 2017 dengan koreksi nilai tim penertiban aset sebesar Rp1.931.116.183.306,00 yang terdapat pada:

Tabel 133
Koreksi Nilai (Revaluasi) atas
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

NO.	ESELON I	JUMLAH
1	SETJEN	107.671.959.348
2	DITJEN KESMAS	7.289.424.104
3	DITJEN YANKES	1.343.861.574.784
4	DITJEN P2P	48.330.735.837
5	BALITBANGKES	25.351.905.279
6	BADAN PPSDM KES	398.610.583.954
	JUMLAH	1.931.116.183.306

5. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Revaluasi atas Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan dilaksanakan pada semester II tahun 2017 dengan koreksi nilai tim penertiban aset sebesar Rp138.201.185.255,00 yang terdapat pada:

Tabel 134
Koreksi Nilai (Revaluasi) atas
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

NO.	ESELON I	JUMLAH
1	SETJEN	998.321.750
2	DITJEN YANKES	47.119.788.630
3	DITJEN P2P	414.520.735
4	BALITBANGKES	1.066.538.708
5	BADAN PPSDM KES	88.602.015.432
	JUMLAH	138.201.185.255

6. Aset Lain-Lain

Dari total nilai kenaikan/(penurunan) nilai BMN di Kementerian Kesehatan sebesar Rp47.525.260.398.944,00 terdapat transaksi lanjutan atas BMN yang sudah dilakukan penilaian kembali yaitu berupa penghapusan dan hibah keluar sebesar Rp45.292.196.000,00 sehingga total koreksi nilai tim penertiban aset yang dikeluarkan dari Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan sebesar Rp47.479.968.202.944,00.

Adapun rincian nilai transaksi lanjutan berupa penghapusan dan hibah keluar aset setelah revaluasi adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah sebesar Rp43.594.588.000,00 pada Ditjen Yankes.

b. Gedung dan Bangunan

Tabel 135
Koreksi Nilai (Revaluasi) atas
Gedung dan Bangunan pada Aset Lain-lain
(dalam rupiah)

NO.	ESELON I	JUMLAH
1	DITJEN YANKES	80.033.000
2	DITJEN P2P	1.304.462.000
3	BADAN PPSDM KES	336.777.000
JUMLAH		1.721.272.000

c. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar (Rp23.664.000,00) pada Ditjen P2P.

Hasil revaluasi akan disajikan pada Laporan Keuangan setelah seluruh objek revaluasi di seluruh K/L Pemerintah Pusat selesai dinilai kembali.

F.2.2. Pengelolaan Aset Flu Burung Ditjen Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan

- a. BMN berupa fasilitas produksi vaksin flu burung dicatat pada satuan kerja Sekretariat Ditjen PP dan PL. BMN tersebut diperoleh melalui 2 tahap pembangunan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Tahap Pertama

Pekerjaan Pembangunan Fasilitas, Riset dan Alih Teknologi Produksi Vaksin Flu Burung dengan nilai aset sebesar Rp718.800.551.000,00. Aset ini diperoleh melalui paket pekerjaan *multi years* dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dianggarkan melalui dua Bagian Anggaran (BA), yaitu :

- a) Pada tahun 2008 dan 2009 dianggarkan melalui BA 999 Kementerian Keuangan senilai Rp442.781.139.416,00. Nilai tersebut mulai dicatat dan dilaporkan dalam SIMAK-BMN Sekretariat Ditjen PP dan PL pada tahun 2011 dalam akun KDP berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Kesehatan Nomor BAST-

4/AG/2011 tanggal 4 Februari 2011 dan Nomor BAST-30/AG/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

- b) Pada tahun 2010 penyelesaian pekerjaan tersebut dilanjutkan melalui BA 024 Kementerian Kesehatan melalui DIPA Sekretariat Ditjen PP dan PL senilai Rp276.019.411.584,00.
- c) Pencatatan aset yang diperoleh dari Pembangunan Fasilitas, Riset dan Alih Teknologi Produksi Vaksin Flu Burung senilai Rp718.800.551.000,00 mengalami perubahan pada tahun 2012 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Aset Pembangunan Fasilitas, Riset dan Alih Teknologi Produksi Vaksin Flu Burung yang berada di Universitas Airlangga Surabaya senilai Rp122.502.235.460,00 direklasifikasi dari akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menjadi aset definitif peralatan dan mesin. Saat ini aset tersebut telah diserahkan dari Kementerian Kesehatan kepada Universitas Airlangga Surabaya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor PL.03.01/III/1330/2012 tanggal 31 Juli 2012 antara Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Persetujuan alih status penggunaan BMN tersebut dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih dalam proses di Kementerian Keuangan.

- (2) Aset yang berasal dari Pembangunan Fasilitas, Riset dan Alih Teknologi Produksi Vaksin Flu Burung senilai Rp596.298.315.540,00 yang berada di Bio Farma Bandung tetap dicatat dalam akun KDP karena belum dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya.

2) Tahap Kedua

Pembangunan Sarana Prasarana *System Connecting* Fasilitas Produksi dan *Chicken Breeding* Riset dan Teknologi Produksi Vaksin Flu Burung senilai Rp196.541.029.300,00 sesuai SP2D yang dibayarkan pada tahun 2010 dengan sumber dana berasal dari BA 024 Kementerian Kesehatan DIPA Sekretariat Ditjen P2P. Aset tersebut dicatat dalam SIMAK-BMN Sekretariat Ditjen PP dan PL dalam akun KDP. Pencatatan aset tersebut masih dalam akun KDP karena belum dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya.

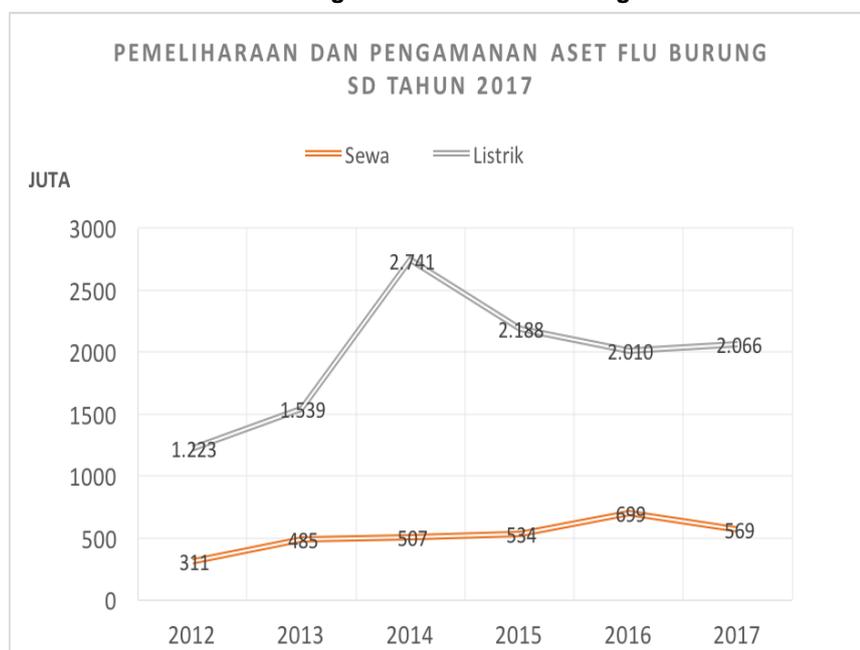
- b. Proses uji fungsi untuk kedua perolehan BMN di atas belum dapat dilaksanakan karena BMN tersebut dalam status disita (*police line*) oleh Bareskrim POLRI.
- c. Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Ditjen PP dan PL terkait Hasil Pemeriksaan BPK RI adalah sebagai berikut :

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen Flu Burung TA 2012 atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat P2ML telah mengirimkan surat Nomor PL.00.01/III.6/2012 tanggal 14 Agustus 2012 perihal Perintah Tindak Lanjut LHP BPK RI Nomor 10/HP/XIX/06/2012 tanggal 5 Juni 2012 yang ditujukan kepada Direktur PT Anugrah Nusantara berisi undangan kepada Direktur PT Anugrah Nusantara untuk hadir dalam rapat tindak lanjut LHP BPK RI tentang pengkajian pemutusan kontrak dan pencairan Bank Garansi ke Kas Negara.
- 2) Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung (PPML) selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat PPML telah mengirimkan surat Nomor PS.04.01/III.6/1857/2012 tanggal 14 September 2012 perihal Perintah Tindak Lanjut LHP BPK RI Nomor 34/S/VIII/06/2012 tanggal 6 Juni 2012 yang ditujukan kepada Direktur PT Anugrah Nusantara berisi permintaan kepada PT Anugrah Nusantara untuk segera mencairkan Bank Garansi dan disetorkan ke Kas Negara.
- 3) Sekretaris Ditjen PP dan PL atas nama Direktur Jenderal PP dan PL telah mengirimkan surat Nomor PS.03.02/I.3/66/2013 tanggal 4 Januari 2013 perihal Permohonan Informasi Bank Garansi yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Khusus berisi permohonan informasi atas keberadaan Bank Garansi PT Anugrah Nusantara.
- 4) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. telah membalas surat tersebut melalui surat Nomor B.87-KCK/ADK/02/2013 tanggal 4 Februari 2013 perihal Bank Garansi atas nama PT Anugrah Nusantara berisi penjelasan bahwa Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Fasilitas Produksi Riset dan Alih Teknologi Vaksin Flu Burung atas nama PT Anugrah Nusantara telah berakhir pada 31 Desember 2010 dan batas tanggal berakhirnya masa klaim telah terlampaui tanpa adanya klaim dari Penerima Jaminan/Tanggungan (Kementerian Kesehatan), sehingga atas Bank Garansi tersebut telah dilakukan cancellation dan dana yang digunakan untuk menjamin Bank Garansi tersebut secara otomatis telah kembali kepada Pihak yang Dijamin (PT Anugrah Nusantara).
- 5) Sekretaris Ditjen PP dan PL atas nama Direktur Jenderal PP dan PL telah mengirimkan surat Nomor PS.04.02/I.3/D.1/1073/2013 tanggal 27 Maret 2013 perihal Undangan Rapat LHP BPK RI No. 34/S/VIII/06/2012 tanggal 6 Juni 2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Anugrah Nusantara dengan agenda penyelesaian rekomendasi LHP BPK Nomor 34/S/VIII/06/2012 tanggal 6 Juni 2012.
- 6) Sekretaris Ditjen PP dan PL telah mengirimkan surat Nomor PS.03.02/I.3/855/2014 tanggal 26 Februari 2014 perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara atas LHP BPK RI Nomor

34/S/VIII/06/2012 tanggal 5 Juni 2012 yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan berisi Penyerahan Pengurusan Piutang Negara untuk diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

- 7) Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan telah membalas surat tersebut melalui surat Nomor KU.01.03/I/954/2014 tanggal 23 April 2014 perihal Penyerahan Piutang Negara atas LHP BPK RI Nomor 34/S/VIII/06/2012 tanggal 5 Juni 2012 berisi jawaban bahwa penyerahan pengurusan piutang Negara belum dapat diteruskan ke Panitia Urusan Piutang Negara Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan karena:
- Kasus ini masih dalam proses hukum/penyidikan oleh Bareskrim POLRI, sehingga harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - Besaran piutang tercantum dalam LHP BPK RI masih disebutkan sebagai indikasi kerugian Negara sehingga belum jelas nilai piutangnya.
- d. Upaya pengamanan dan pemeliharaan aset flu burung yang telah dilakukan adalah dengan menganggarkan biaya listrik dan sewa gudang penyimpanan aset flu burung melalui DIPA Sekretariat Ditjen P2P. Biaya pembayaran listrik dan sewa gudang penyimpanan aset flu burung dari tahun 2015 sd tahun 2017 terinci sebagai berikut:

Grafik 3
Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Flu Burung s.d. TA 2017



- e. Terhadap aset Flu Burung di Universitas Airlangga yang sedang diusulkan pengalihan status BMN menjadi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkas pengajuannya dikembalikan oleh

Kementerian Keuangan karena adanya perubahan organisasi Universitas Airlangga yang tadinya berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Upaya mengajukan kembali alih status kepada Kementerian Keuangan saat ini baru sampai pada proses Penetapan Status Penggunaan alat tersebut, baik yang bernilai di atas 100 juta rupiah yang merupakan kewenangan Pengelola Barang, maupun yang bernilai sampai dengan 100 juta yang telah dilimpahkan kepada Pengguna Barang.

- f. Tahun 2017 proses hukum atas kasus flu burung sudah selesai di pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Sehingga aset flu burung yang berada dalam *police line* di PT Biofarma Bandung dan di Universitas Airlangga Surabaya telah diserahkan kembali ke Direktorat Jenderal P2P melalui Berita Acara Penyerahan Kembali Barang Bukti dari Bareskrim POLRI kepada Ditjen P2P. Atas dasar tersebut maka Ditjen P2P melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Aset Flu Burung di Universitas Airlangga Surabaya

Aset yang berada di Universitas Airlangga Surabaya senilai Rp122.502.235.460,00 telah menjadi aset definitif dan tercatat dalam SIMAK BMN Satuan Kerja Sekretariat Ditjen P2P. Sebagai tindak lanjut penyelesaian aset tersebut maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengundang Kementerian Kesehatan dalam rapat tanggal 29 November 2017 yang menyimpulkan bahwa penyelesaian aset Flu Burung Universitas Airlangga akan ditempuh melalui proses alih status ke Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). BPK akan mengkoordinasikan proses alih status tersebut dengan pihak Kemenristek Dikti. Kementerian Kesehatan agar menyiapkan persyaratan dokumen untuk alih status, serta bersurat ke Kemenristek Dikti untuk menindaklanjuti proses tersebut. Sebagai tindak lanjut, maka Ditjen P2P mengajukan proses Penetapan Status Penggunaan atas aset Flu Burung di Universitas Airlangga secara berjenjang kepada DJKN.

2) Aset Flu Burung di PT Biofarma Bandung

Aset yang berada di PT Biofarma Bandung senilai Rp792.839.344.840,00 berdasarkan rekomendasi BPK pada tahun 2012 dicatat pada SIMAK BMN Satuan Kerja Sekretariat Ditjen P2P sebagai KDP. Pencatatan tersebut tidak mengalami perubahan sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017. Dalam upaya penyelesaian KDP tersebut, Ditjen P2P telah bersurat ke DJKN melalui surat Direktur Jenderal P2P Nomor KN.02.07/I/3204/2017 tanggal 18 Desember 2017 hal Penyelesaian terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Flu Burung. Sampai dengan periode penyusunan Laporan Keuangan 31 Desember 2017, surat tersebut belum dibalas secara tertulis oleh DJKN.

F. 2.3 Data Tuntutan Hukum Pada Kementerian Kesehatan

Data Tuntutan Hukum kepada Kementerian Kesehatan, diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2017, Kementerian Kesehatan menghadapi Tuntutan Hukum sebanyak 26 buah kasus (rincian pada lampiran 17). Adapun posisi tuntutan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sudah selesai = 9
- b. Menunggu Putusan Banding = 5
- c. Menunggu Putusan Kasasi = 7
- d. Menunggu proses pengajuan PK = 5

F.3. PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menguasai lahan milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berlokasi di Jalan Hang Jebat III. Lahan tersebut seharusnya sejak tahun 1977 diserahkan kembali kepada Kemenkes, akan tetapi PKBI tidak pernah mengembalikan tanah tersebut tetapi berusaha untuk memilikinya dengan cara mengurus sertifikat ke BPN. BPN menolak, karena tanah tersebut tercatat di SHP milik Kemenkes.

Pada tahun 2017, PKBI bersurat kepada Presiden untuk memiliki lahan tersebut akan tetapi hasil pembahasan rapat di Sekretris Kabinet disampaikan bahwa untuk tanah yang ditempati PKBI adalah milik Kemenkes, sehingga Pemda Provinsi DKI agar membantu mengembalikan tanah tersebut kepada Kemenkes.

Selanjutnya Kemenkes telah melakukan upaya penertiban sesuai Peraturan Gubernur 207 tahun 2016 tentang Penertiban Pemakain /Penguasaan Tanah tanpa Izin yang Berhak. Penertiban sudah dilakukan oleh Kemnekes sampai tahap pemberian SP3 tinggal eksekusi, akan tetapi ketika akan dilakukan eksekusi, Gubernur DKI Jakarta saat ini diminta untuk menunda pelaksanaan eksekusi tersebut. Saat ini PKBI menggugat Kemenkes di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. Masih terdapat 2 (dua) satuan kerja yang menginput persediaan secara global dikarenakan proses bridging aplikasi persediaan internal dengan aplikasi persediaan nasional belum berhasil, yaitu RSUP Persahabatan dan RSUP H. Adam Malik Medan.
3. Di tahun 2017 Perpustakaan Nasional memberikan paket buku dan rak buku dengan menggunakan akun belanja 526 masing-masing senilai Rp59.933.000,00 dan memberikan kepada 32 satker vertikal dan 8 RSUD di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan. Satker-satker vertikal penerima transfer masuk dari Perpustakaan belum mencatat transaksi tersebut dikarenakan dokumen sumber berupa BAST yang diberikan berasal dari pihak ke tiga dan hanya berguna untuk pencairan dana oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Perpustakaan akan menerbitkan BAST *transfer in out* secara resmi kepada seluruh satker penerima di Semester I 2018. Berikut ini satker vertical yang menerima paket tersebut:

- a) RSUP H. Adam Malik Medan
 - b) RS Stroke Nasional Bukit Tinggi
 - c) RSUP Dr. M. Djamil Padang
 - d) RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang
 - e) RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang
 - f) RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta
 - g) RSUP Persahabatan Jakarta
 - h) RSUP Fatmawati Jakarta
 - i) RS Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta
 - j) RS Kanker Dharmais Jakarta
 - k) RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta
 - l) RS Penyakit Infeksi Prof. DR. Sulianto Saroso Jakarta
 - m) RS Ketergantungan Obat Jakarta
 - n) RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta
 - o) RS Pusat Otak Nasional Jakarta
 - p) RS Dr. Sitanala Tangerang
 - q) RS Dr. H Marzoeki Mahdi Bogor
 - r) RS Dr. M. Goenawan Partowidigdo Bogor
 - s) RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung
 - t) RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung
 - u) RS Mata Cicendo Bandung
 - v) RSUP Dr. Kariadi Semarang
 - w) RS Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga
 - x) RS Jiwa Prof. Dr. Soeroyo Magelang
 - y) RS Ortopedi Prof. Dr. Soeharso Surakarta
 - z) RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro
 - aa) RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
 - bb) RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
 - cc) RSUP Sanglah Denpasar
 - dd) RSUP Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar
 - ee) RS DR. Tadjuddin Chalid Makassar
 - ff) RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
4. Terkait poin 3, terdapat juga hibah dari Perpusnas kepada beberapa Satker Poltekkes Malang, Poltekkes Banjarmasin, Poltekkes Ternate, Poltekkes Palangkaraya, Poltekkes Palembang dan Poltekkes Surabaya. Namun BAST yang diterima oleh satker adalah antara penyedia dengan pihak Poltekkes, sehingga dinilai tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar dalam pencatatan ke dalam aplikasi SIMAK BMN.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017

No.	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
1	024.01.250003	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	16.740.000
2	024.01.401734	Pusat Analisis Determinan Kesehatan	66.154.000
3	024.03.249007	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	136.000
4	024.04.015404	Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI	4.361.000
5	024.04.257847	Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi	123.230.000
6	024.04.415618	Rumah Sakit Umum Dr M Jamil Padang	751.236.600
7	024.05.219013	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	1.700.000
8	024.05.416139	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado	17.968.000
9	024.05.415907	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang	5.083.000
10	024.05.621928	BTKL& PP Kelas I Manado	77.991.199
11	024.12.249011	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	33.974.000
12	024.12.630870	Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan	222.093.000
Jumlah			1.320.666.799

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017

No.	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
1	024.04.035659	Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Surakarta	770.000
2	024.04.325155	Rsup Raratotok Buyat	4.311.700
3	024.04.552687	Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta	62.251.000
4	024.04.552713	Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya	96.655.000
5	024.04.621953	Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar	13.730.000
7	024.11.416160	Pusat Penelitian Dan Pengembangan Biomedis Dan Teknologi Dasar Kesehatan	140.000
8	024.12.648500	Puskat Mutu	40.820.000
TOTAL			218.677.700

Rincian Kas BLU Per 31 Desember 2017

No.	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
1	024.04.015514	Rs Pusat Otak Nasional	124.224.717.106
2	024.04.257847	Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi	15.156.812.642
3	024.04.258462	Rumah Sakit Kusta Makassar	3.969.645.470
4	024.04.415381	Balai Kesehatan Paru Masyarakat (Bkpm) Bandung	3.400.741.215
5	024.04.415397	Balai Besar Kesehatan Paru Masy. Surakarta	6.285.613.215
6	024.04.415401	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Sulsel	245.325.243
7	024.04.415423	Rumah Sakit Umum Dr Cipto Mangun Kusumo Jakarta	86.716.305.488
8	024.04.415432	Rumah Sakit Fatmawati Jakarta	39.175.892.911
9	024.04.415448	Rumah Sakit Umum Persahabatan	20.285.085.563
10	024.04.415454	Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta	22.735.661.382
11	024.04.415460	Balai Laboratorium Kesehatan Jakarta	8.339.035.571
12	024.04.415479	Rumah Sakit Umum Dr Hasan Sadikin Bandung	39.614.860.430
13	024.04.415485	Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung	10.000.161.762
14	024.04.415491	Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung	14.203.458.766
15	024.04.415505	Rumah Sakit Dr. Marzuki Mahdi Bogor	2.185.794.504
16	024.04.415511	Rs Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua	1.707.773.829
17	024.04.415520	Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang	1.824.173.361
18	024.04.415536	Rsu Dr Kariadi Semarang	261.314.592.119
19	024.04.415542	Rs Jiwa Prof. Dr. Soeroyo Magelang	9.734.503.694
20	024.04.415551	Rs Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga	22.451.717.577
21	024.04.415567	Rs Orthopaedi Prof. Dr.R. Soeharso Surakarta	140.391.947.997
22	024.04.415573	Rsu Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro	8.269.703.181
23	024.04.415582	Rumah Sakit Umum Dr Sardjito Yogyakarta	135.972.666.186
24	024.04.415598	Rsj Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	53.607.735.847
25	024.04.415602	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya	10.842.395.582
26	024.04.415618	Rumah Sakit Umum Dr M Jamil Padang	17.131.211.444
27	024.04.415624	Rsup Dr. Mohammad Hoesin Palembang	79.774.031.801
28	024.04.415630	Rumah Sakit Kusta Dr.Rivai Abdullah Palembang	2.863.754.398
29	024.04.415649	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang	7.287.060.380
30	024.04.415655	Balai Laboratorium Kesehatan Makassar	1.685.535.258
31	024.04.415661	Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar	51.015.240.228
32	024.04.415670	Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta	3.384.484.924
33	024.04.415706	Rspi Prof.Dr.Sulianti Saroso Jakarta	15.151.974.508
34	024.04.520611	Rumah Sakit Anak Dan Bersalin Harapan Kita Jakarta	31.785.961.410
35	024.04.520628	Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta	367.526.885.781
36	024.04.532214	Rumah Sakit Umum H. Adam Malik Medan	34.597.587.138
37	024.04.538815	Rumah Sakit Umum Manado	19.549.621.220
38	024.04.538857	Balai Kesehatan Mata Masyarakat Sulsel	39.189.717.105
39	024.04.548886	RSUP Dr Wahidin Sudiro-Husodo Makassar	105.590.669.218
40	024.04.548890	Rumah Sakit Kanker "Dharmais" Jakarta	161.443.277.982
41	024.12.632111	Politeknik Kesehatan Medan	25.083.839.169
42	024.12.632153	Politeknik Kesehatan Bengkulu	8.744.866.040
43	024.12.632174	Politeknik Kesehatan Tanjungkarang	11.857.464.040
44	024.12.632200	Politeknik Kesehatan Jakarta li	27.330.585.681
45	024.12.632217	Politeknik Kesehatan Jakarta lii	10.031.596.008
46	024.12.632221	Politeknik Kesehatan Bandung	23.260.382.564
47	024.12.632242	Politeknik Kesehatan Semarang	34.528.616.634
48	024.12.632259	Politeknik Kesehatan Surakarta	49.085.957.559
49	024.12.632263	Politeknik Kesehatan Jogjakarta	9.093.135.267
50	024.12.632291	Politeknik Kesehatan Pontianak	17.802.047.100
51	024.12.632348	Politeknik Kesehatan Makassar	32.676.362.032
52	024.12.637567	Politeknik Kesehatan Malang	3.303.290.980
53	024.12.637588	Politeknik Kesehatan Surabaya	10.014.965.249
Total			2.243.446.441.759

Rincian Investasi Jangka Pendek BLU Per 31 Desember 2017

No.	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
1	024.04.415381	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT (BKPM) BANDUNG	3.600.000.000
2	024.04.415491	RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG	70.000.000.000
3	024.04.415505	RUMAH SAKIT DR. MARZUKI MAHDI BOGOR	47.915.000.000
4	024.04.415511	RS PARU DR.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA	33.400.000.000
5	024.04.415520	RUMAH SAKIT KUSTA SITANALA TANGERANG	10.000.000.000
6	024.04.415573	RSU PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO (04)	135.000.000.000
7	024.04.415670	RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA	5.000.000.000
8	024.04.520611	RUMAH SAKIT ANAK DAN BERSALIN HARAPAN KITA JAKARTA	20.000.000.000
9	024.12.632174	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG	10.447.208.204
10	024.12.632221	POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG	15.000.000.000
11	024.12.637567	POLITEKNIK KESEHATAN MALANG	21.105.000.000
Total			371.467.208.204

Rincian Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2017

No.	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
1	024.01.258531	Pusat Kesehatan Haji	7.214.495.726
2	024.03.049004	Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta	14.500.000
3	024.03.319006	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	89.512.500
4	024.03.119012	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	117.990.000
5	024.03.139004	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	122.500.000
6	024.03.149010	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	157.500.000
7	024.03.069001	Dinas Kesehatan Provinsi Aceh	197.600.000
8	024.03.159011	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	213.750.000
9	024.03.129006	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	798.965.200
10	024.03.059006	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	1.014.406.250
11	024.04.548890	Rumah Sakit Kanker "Dharmais" Jakarta	312.454
12	024.04.415491	Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung	1.857.535
13	024.04.415573	Rsu Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro (04)	26.426.400
14	024.04.415582	Rumah Sakit Umum Dr Sardjito Yogyakarta	28.959.184
15	024.04.415567	Rs Orthopaedi Prof. Dr.R. Soeharso Surakarta	40.011.000
16	024.04.257847	Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi	49.994.521
17	024.04.415536	Rsu Dr Kariadi Semarang	67.796.471
18	024.04.250158	Dinas Kesehatan Kab. Jayapura	970.000.000
19	024.04.520628	Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta	3.791.532.680
20	024.05.415819	Kantor Kesehatan Pelabuhan Sampit	1.333.332
21	024.05.415887	Kantor Kesehatan Pelabuhan Mataram	4.675.380
22	024.05.621932	Btkl Dan Pemberantasan Penyakit Menular Ambon	6.500.000
23	024.05.415721	Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang	7.736.723
24	024.05.415799	Kantor Kesehatan Pelabuhan Panjang	10.083.333
25	024.05.415913	Kantor Kesehatan Pelabuhan Pakanbaru	16.911.875
26	024.05.415893	Kantor Kesehatan Pelabuhan Banda Aceh	17.500.000
27	024.05.415800	Kantor Kesehatan Pelabuhan Pulang Pisau	46.648.161
28	024.05.465833	Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung	74.866.939.231
29	024.11.416161	Balai Litbang Biomedis Papua	697.491.667
Total			90.593.929.623

Rincian Piutang Operasional BLU Per 31 Desember 2017

No.	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
1	024.04.015514	RS PUSAT OTAK NASIONAL	25.541.169.237
2	024.04.257847	RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL BUKITTINGGI	7.407.182.305
3	024.04.258462	RUMAH SAKIT KUSTA MAKASSAR	5.186.215.400
4	024.04.415381	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT (BKPM) BANDUNG	1.730.781.500
5	024.04.415397	BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASY. SURAKARTA	1.007.290.514
6	024.04.415401	BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SULSEL	610.046.650
7	024.04.415423	RUMAH SAKIT UMUM DR CIPTO MANGUN KUSUMO JAKARTA	304.048.269.916
8	024.04.415432	RUMAH SAKIT FATMAWATI JAKARTA	103.501.173.768
9	024.04.415448	RUMAH SAKIT UMUM PERSAHABATAN	109.391.880.804
10	024.04.415454	RUMAH SAKIT JIWA DR. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA	3.027.912.565
11	024.04.415460	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN JAKARTA	496.183.000
12	024.04.415479	RUMAH SAKIT UMUM DR HASAN SADIKIN BANDUNG	237.786.942.898
13	024.04.415485	RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU BANDUNG	5.256.879.783
14	024.04.415491	RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG	21.720.450.594
15	024.04.415505	RUMAH SAKIT DR. MARZUKI MAHDI BOGOR	21.104.214.528
16	024.04.415511	RS PARU DR.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA	3.004.971.100
17	024.04.415520	RUMAH SAKIT KUSTA SITANALA TANGERANG	2.569.282.225
18	024.04.415536	RSU DR KARIADI SEMARANG	310.565.676.478
19	024.04.415542	RS JIWA PROF. DR. SOEROYO MAGELANG	13.260.744.333
20	024.04.415551	RS PARU DR. ARIO WIRAWAN SALATIGA (04)	2.995.113.790
21	024.04.415567	RS ORTHOPAEDI PROF. DR.R. SOEHARSO SURAKARTA	40.200.301.726
22	024.04.415573	RSU PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO (04)	35.817.995.713
23	024.04.415582	RUMAH SAKIT UMUM DR SARDJITO YOGYAKARTA	191.956.110.138
24	024.04.415598	RSJ DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG	9.100.995.521
25	024.04.415602	BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA	13.150.000
26	024.04.415618	RUMAH SAKIT UMUM DR M JAMIL PADANG	87.982.868.193
27	024.04.415624	RSUP DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG	146.565.510.837
28	024.04.415630	RUMAH SAKIT KUSTA DR.RIVAI ABDULLAH PALEMBANG	10.214.749.147
29	024.04.415649	BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN PALEMBANG	441.844.500
30	024.04.415655	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR	964.402.400
31	024.04.415661	RUMAH SAKIT UMUM SANGLAH DENPASAR	159.792.469.137
32	024.04.415670	RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA	595.999.522
33	024.04.415706	RSPI PROF.DR.SULIANTI SAROSO JAKARTA	7.331.695.874
34	024.04.520611	RUMAH SAKIT ANAK DAN BERSALIN HARAPAN KITA JAKARTA	27.615.089.103
35	024.04.520628	RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA	64.416.017.536
36	024.04.532214	RUMAH SAKIT UMUM H. ADAM MALIK MEDAN	110.479.344.507
37	024.04.538815	RUMAH SAKIT UMUM MANADO	103.782.986.052
38	024.04.538857	BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT SULSEL	5.701.562.800
39	024.04.548886	RUMAH SAKIT UMUM DR WAHIDIN SUDIRO-HUSODO MAKASSAR	130.618.559.144
40	024.04.548890	RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS" JAKARTA	52.062.842.566
41	024.12.632111	POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN	196.170.000
42	024.12.632153	POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU	745.205
43	024.12.632200	POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II	188.898.000
44	024.12.632217	POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III	92.550.014
45	024.12.632221	POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG	275.205.000
46	024.12.637567	POLITEKNIK KESEHATAN MALANG	40.433.000
47	024.12.637588	POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA	78.300.000
Total			2.366.739.177.023

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2017

No.	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
1	024.01.401734	Pusat Analisis Determinan Kesehatan	87.359.400
2	024.01.465946	Biro Hukum Dan Organisasi	3.692.000
3	024.01.466059	Biro Kepegawaian	145.626.800
4	024.01.465921	Biro Keuangan Dan Bmn	35.714.250
5	024.01.465915	Biro Perencanaan Dan Anggaran	38.350.900
6	024.01.465930	Biro Umum	250.879.240
7	024.01.210010	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	3.657.500
8	024.01.258530	Pusat Data Dan Informasi Kesehatan	164.694.032
9	024.01.648428	Pusat Kerja Sama Luar Negeri	3.574.500
10	024.01.258531	Pusat Kesehatan Haji	7.523.031.109
11	024.01.477136	Pusat Komunikasi Publik	34.334.015
12	024.01.466040	Pusat Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan	162.992.000
13	024.01.625922	Pusat Penanggulangan Krisis	4.315.021.836
14	024.01.439505	Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia	2.332.499.400
15	024.02.415366	Kantor Inspektorat Jenderal	179.714.380
16	024.03.401735	Direktorat Kesehatan Keluarga	1.069.615.473
17	024.03.401737	Direktorat Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	4.263.401.189
18	024.03.401736	Direktorat Kesehatan Lingkungan	116.859.028.030
19	024.03.775554	Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung	165.344.916
20	024.03.415382	Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat Makassar	52.055.850
21	024.03.039022	Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah	419.946.623
22	024.03.189000	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	20.000.000
23	024.03.069001	Dinas Kesehatan Provinsi Aceh	951.892.000
24	024.03.319006	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	123.185.000
25	024.03.050009	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	72.600.000
26	024.03.219011	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	43.421.400
27	024.03.339032	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	21.000.000
28	024.03.466034	Direktorat Bina Gizi Masyarakat	46.801.901.737
29	024.03.466467	Dit Bina Kesehatan Kerja Dan Olahraga	806.579.595
30	024.03.415383	Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat Palembang	178.973.900
31	024.03.465909	Set Ditjen Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak	359.057.235
32	024.04.401732	Direktorat Mutu Dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	6.243.050
33	024.04.401729	Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional	129.800.000
34	024.04.415397	Balai Besar Kesehatan Paru Masy. Surakarta	3.207.695.439
35	024.04.415401	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Sulsel	2.141.537.328
36	024.04.415649	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang	324.236.023
37	024.04.415602	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya	1.294.023.720
38	024.04.538840	Balai Kesehatan Mata Masyarakat Jabar (Cikampek)	3.184.128.665
39	024.04.538857	Balai Kesehatan Mata Masyarakat Sulsel	5.368.882.664
40	024.04.415381	Balai Kesehatan Paru Masyarakat (Bkpm) Bandung	2.224.695.826
41	024.04.415460	Balai Laboratorium Kesehatan Jakarta	1.278.891.145
42	024.04.415655	Balai Laboratorium Kesehatan Makassar	838.644.513
43	024.04.552687	Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta	2.545.998.941
44	024.04.621953	Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar	52.468.319
45	024.04.621949	Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan	651.496.051
46	024.04.552713	Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya	455.765.363
47	024.04.119302	Dinas Kesehatan Kab. Empat Lawang	788.304.300
48	024.04.030138	Dinas Kesehatan Kab. Semarang	307.000
49	024.04.030745	Dinas Kesehatan Kab. Tegal	1.264.800
50	024.04.180939	Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una	34.245.500
51	024.04.052053	Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek	461.750
52	024.04.199396	Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang	30.592.000
53	024.04.249330	Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan	2.177.000

No.	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
54	024.04.289220	Dinas Kesehatan Kota Ternate	1.494.000
55	024.04.340049	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat	68.500.000
56	024.04.319007	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	19.779.500
57	024.04.253005	Dinkes Kab Dogiyai	24.224.000
58	024.04.330359	Dinkes Kab Fak Fak	28.986.540
59	024.04.240736	Dinkes Kab Flores Timur	77.399.000
60	024.04.190953	Dinkes Kab Luwu	84.138.890
61	024.04.191735	Dinkes Kab Sidenreng Rappang	64.642.600
62	024.04.191042	Dinkes Kab Sinjai	22.714.780
63	024.04.191559	Dinkes Kab Takalar	18.475.380
64	024.04.251821	Dinkes Kab. Tolikara	7.895.000
65	024.04.252329	Dinkes Kab. Waropen	4.152.720
66	024.04.255159	Dinkes Kota Jayapura	1.059.128.002
67	024.04.466071	Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar	1.777.605.270
68	024.04.465791	Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan	14.429.015.657
69	024.04.465760	Dit Bina Pelayanan Penunjang Medik Dan Sarana Kes	147.334.038.886
70	024.04.155247	Loka Pengaman Fasilitas Kesehatan Banjar Baru	140.680.925
71	024.04.035659	Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta	1.252.853.911
72	024.04.415542	Rs Jiwa Prof. Dr. Soeroyo Magelang	7.101.473.650
73	024.04.165135	Rs Jiwa Samarinda (04)	78.000.000
74	024.04.150628	Rs Jiwa Tamban (04)	938.500
75	024.04.109258	Rs Kol. Abunjani Bangko	150.000
76	024.04.415567	Rs Orthopaedi Prof. Dr.R. Soeharso Surakarta	20.581.620.359
77	024.04.415551	Rs Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga (04)	4.775.215.287
78	024.04.415511	Rs Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua	5.602.456.711
79	024.04.015514	Rs Pusat Otak Nasional	16.927.410.526
80	024.04.415598	Rsj Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	2.573.135.715
81	024.04.050082	Rsj Menur	10.065.000
82	024.04.415706	Rspi Prof.Dr.Sulianti Saroso Jakarta	10.163.184.414
83	024.04.179262	Rsu Amurang	16.925.800
84	024.04.051415	Rsu Bangil (04)	3.825.410
85	024.04.150325	Rsu Datu Sanggul Rantau (04)	99.500
86	024.04.415536	Rsu Dr Kariadi Semarang	62.879.895.996
87	024.04.059574	Rsu Dr. Iskak Tulungagung	31.913.200
88	024.04.031046	Rsu Kab Kudus	120.000.000
89	024.04.139317	Rsu Landak	4.945.000
90	024.04.051367	Rsu Lawang	628.500
91	024.04.022020	Rsu Majalengka	1.435.000
92	024.04.299441	Rsu Malingping	12.000.000
93	024.04.120353	Rsu Mayjen H.M. Ryacudu	40.000
94	024.04.119249	Rsu Muara Enim	2.767.000
95	024.04.299461	Rsu Pandeglang	6.952.000
96	024.04.199536	Rsu Pangkajene Kepulauan	16.101.500
97	024.04.415573	Rsu Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro (04)	13.182.663.333
98	024.04.250130	Rsu Sentani(04)	22.920.000
99	024.04.070929	Rsu Sapirook (04)	6.000.000
100	024.04.100151	Rsu Sungai Gelam Kab Muaro Jambi	3.000.000
101	024.04.150731	Rsu Tanjung (04)	116.750
102	024.04.079493	Rsu Tanjung Balai	2.858.620
103	024.04.070831	Rsu Tarutung Kab Tapanuli Utara	49.500.000
104	024.04.249372	Rsu Umbu Rara Meha Waingapu	5.017.300
105	024.04.199446	Rsud Batara Guru Belopa	178.000
106	024.04.031337	Rsud Dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang	13.929.410
107	024.04.320438	Rsud Lapangan Lingga	6.000
108	024.04.110939	Rsud Pangkalan Balai Kab. Banyuasin	12.626.000
109	024.04.402170	Rsud Propinsi Di Sumbawa	1.821.500

No.	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
110	024.04.130463	Rsud Rubini Mempawah	78.000.000
111	024.04.115527	Rsud Siti Aisyah	5.000.000
112	024.04.415624	Rsup Dr. Mohammad Hoesin Palembang	19.620.602.235
113	024.04.325155	Rsup Ratatotok Buyat	1.943.017.135
114	024.04.520611	Rumah Sakit Anak Dan Bersalin Harapan Kita Jakarta	18.110.268.259
115	024.04.415505	Rumah Sakit Dr. Marzuki Mahdi Bogor	10.539.546.940
116	024.04.415432	Rumah Sakit Fatmawati Jakarta	21.865.211.272
117	024.04.520628	Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta	51.985.609.284
118	024.04.415454	Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta	6.055.623.684
119	024.04.548890	Rumah Sakit Kanker "Dharmais" Jakarta	39.450.630.229
120	024.04.415670	Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta	5.234.061.161
121	024.04.415630	Rumah Sakit Kusta Dr.Rivai Abdullah Palembang	2.879.929.014
122	024.04.258462	Rumah Sakit Kusta Makassar	3.661.276.771
123	024.04.415520	Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang	8.844.219.719
124	024.04.415491	Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung	14.750.741.804
125	024.04.415485	Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung	7.060.999.970
126	024.04.257847	Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi	7.373.742.071
127	024.04.415423	Rumah Sakit Umum Dr Cipto Mangun Kusumo Jakarta	92.969.677.566
128	024.04.415479	Rumah Sakit Umum Dr Hasan Sadikin Bandung	44.721.157.570
129	024.04.415618	Rumah Sakit Umum Dr M Jamil Padang	59.383.343.392
130	024.04.415582	Rumah Sakit Umum Dr Sardjito Yogyakarta	79.267.915.512
131	024.04.548886	Rumah Sakit Umum Dr Wahidin Sudiro-Husodo Makassar	31.066.012.406
132	024.04.532214	Rumah Sakit Umum H. Adam Malik Medan	61.886.404.635
133	024.04.538815	Rumah Sakit Umum Manado	10.751.365.286
134	024.04.415448	Rumah Sakit Umum Persahabatan	45.926.541.372
135	024.04.415661	Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar	56.724.008.625
136	024.04.466080	Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan	702.564.485
137	024.04.015404	Unit Pelayanan Kesehatan Ri	819.548.270
138	024.05.401733	Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Dan Napza	35.165.000
139	024.05.560127	Bbtkl Dan Pemberantasan Penyakit Menular Surabaya	721.891.030
140	024.05.559950	Bbtkl Dan Pemberantasan Penyakit Menular Jakarta	1.356.740.195
141	024.05.415686	Bbtkl Pemberantasan Penyakit Menular Yogyakarta	1.028.352.409
142	024.05.621932	Btkl Dan Pemberantasan Penyakit Menular Ambon	615.913.300
143	024.05.613146	Btkl Dan Pemberantasan Penyakit Menular Banjarbaru	2.399.001.570
144	024.05.613125	Btkl Dan Pemberantasan Penyakit Menular Batam	1.080.849.889
145	024.05.613132	Btkl Dan Pemberantasan Penyakit Menular Makassar	704.853.785
146	024.05.621928	Btkl Dan Pemberantasan Penyakit Menular Manado	1.265.329.469
147	024.05.613111	Btkl Dan Pemberantasan Penyakit Menular Medan	1.612.199.610
148	024.05.621911	Btkl Dan Pemberantasan Penyakit Menular Palembang	593.660.467
149	024.05.189002	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	81.276.250
150	024.05.290004	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	693.026.100
151	024.05.319008	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	24.177.665
152	024.05.465842	Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	44.195.667.809
153	024.05.465833	Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung	908.827.131.959
154	024.05.465889	Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular	22.690.780.243
155	024.05.465858	Dit Surveilans, Imunisasi, Karantina Kesehatan Matra	877.570.496.822
156	024.05.416010	Kantor Kesehatan Pelabuhan Ambon	1.649.451.474
157	024.05.415831	Kantor Kesehatan Pelabuhan Balikpapan	950.508.699
158	024.05.415893	Kantor Kesehatan Pelabuhan Banda Aceh	5.730.828.902
159	024.05.415981	Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin	14.057.491.048
160	024.05.415950	Kantor Kesehatan Pelabuhan Banten	5.765.846.189
161	024.05.415938	Kantor Kesehatan Pelabuhan Batam	1.141.497.186
162	024.05.513096	Kantor Kesehatan Pelabuhan Bengkulu	1.798.202.771
163	024.05.416041	Kantor Kesehatan Pelabuhan Biak	136.435.653
164	024.05.415840	Kantor Kesehatan Pelabuhan Bitung	334.533.025

No.	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
165	024.05.415737	Kantor Kesehatan Pelabuhan Cilacap	1.637.071.684
166	024.05.415712	Kantor Kesehatan Pelabuhan Cirebon	18.543.836.554
167	024.05.415871	Kantor Kesehatan Pelabuhan Denpasar	5.678.129.714
168	024.05.415752	Kantor Kesehatan Pelabuhan Dumai	567.040.442
169	024.05.449978	Kantor Kesehatan Pelabuhan Gorontalo	384.724.402
170	024.05.416114	Kantor Kesehatan Pelabuhan Jakarta	27.628.978.998
171	024.05.415780	Kantor Kesehatan Pelabuhan Jambi	1.680.856.996
172	024.05.416032	Kantor Kesehatan Pelabuhan Jayapura	1.050.971.772
173	024.05.416001	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kendari	1.197.896.025
174	024.05.416026	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang	306.690.815
175	024.05.415743	Kantor Kesehatan Pelabuhan Lhok Seumawe	894.453.872
176	024.05.416145	Kantor Kesehatan Pelabuhan Makassar	11.806.633.939
177	024.05.416139	Kantor Kesehatan Pelabuhan Manado	494.237.287
178	024.05.416072	Kantor Kesehatan Pelabuhan Manokwari	148.426.360
179	024.05.415887	Kantor Kesehatan Pelabuhan Mataram	243.922.070
180	024.05.416088	Kantor Kesehatan Pelabuhan Medan	8.664.287.050
181	024.05.416057	Kantor Kesehatan Pelabuhan Merauke	887.759.312
182	024.05.415907	Kantor Kesehatan Pelabuhan Padang	3.178.274.023
183	024.05.415913	Kantor Kesehatan Pelabuhan Pakanbaru	2.800.115.540
184	024.05.416094	Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang	4.229.645.763
185	024.05.415862	Kantor Kesehatan Pelabuhan Palu	409.017.355
186	024.05.415944	Kantor Kesehatan Pelabuhan Pangkal Pinang	406.319.494
187	024.05.415799	Kantor Kesehatan Pelabuhan Panjang	1.912.346.506
188	024.05.415975	Kantor Kesehatan Pelabuhan Pontianak	1.306.085.138
189	024.05.415856	Kantor Kesehatan Pelabuhan Poso	153.969.980
190	024.05.415969	Kantor Kesehatan Pelabuhan Probolinggo	9.677.799.736
191	024.05.415800	Kantor Kesehatan Pelabuhan Pulang Pisau	1.821.020.523
192	024.05.449984	Kantor Kesehatan Pelabuhan Sabang	499.907.534
193	024.05.415825	Kantor Kesehatan Pelabuhan Samarinda	670.798.049
194	024.05.415819	Kantor Kesehatan Pelabuhan Sampit	232.052.543
195	024.05.415721	Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang	10.680.553.050
196	024.05.416063	Kantor Kesehatan Pelabuhan Sorong	699.346.600
197	024.05.416120	Kantor Kesehatan Pelabuhan Surabaya	23.894.037.582
198	024.05.415768	Kantor Kesehatan Pelabuhan Tambilahan	763.178.978
199	024.05.415922	Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Balai	236.420.135
200	024.05.415774	Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Pinang	253.938.510
201	024.05.416108	Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok	20.780.387.408
202	024.05.415990	Kantor Kesehatan Pelabuhan Tarakan	2.342.351.258
203	024.05.449962	Kantor Kesehatan Pelabuhan Ternate	418.385.215
204	024.05.040005	Kantor Kesehatan Pelabuhan Jogjakarta	3.892.507.552
205	024.05.465827	Set Ditjen PP Dan PL	1.320.225.150
206	024.07.401738	Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	288.122.895
207	024.07.350032	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	45.000
208	024.07.259005	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	42.000.000
209	024.07.465977	Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian	573.292.460
210	024.07.465983	Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian	5.738.125.108
211	024.07.465992	Dit Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	104.404.030.080
212	024.07.465895	Set Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan	780.197.400
213	024.11.653545	Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan	249.596.411
214	024.11.653535	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	261.805.597
215	024.11.416161	Balai Litbang Biomedis Papua	598.702.891
216	024.11.626046	Balai Litbang Gangguan Akibat Kekurangan Iodium, Magelang	106.635.997
217	024.11.416211	Bb Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu	734.105.259
218	024.11.520607	Bb Litbang Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga	27.390.146

No.	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
219	024.11.653594	Loka Biomedis Aceh	209.205.625
220	024.11.653551	Loka Litbang P2B2 Banjarnegara, Jawa Tengah	52.959.505
221	024.11.653530	Loka Litbang P2B2 Baturaja Ogan Komering Ulu, Sumsel	10.520.000
222	024.11.653547	Loka Litbang P2B2 Ciamis, Jawa Barat	6.017.860
223	024.11.653572	Loka Litbang P2B2 Donggala, Sulawesi Tengah	81.504.100
224	024.11.653568	Loka Litbang P2B2 Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	9.067.600
225	024.11.653589	Loka Litbang P2B2 Waikabubak, Sumba Barat, Ntt	81.626.000
226	024.11.416160	Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	2.667.856.336
227	024.11.416151	Sekretariat Badan Litbang Kesehatan	224.142.989
228	024.12.416233	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Cilandak Jakarta	85.286.783
229	024.12.416258	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto	1.701.200
230	024.12.325151	Balai Pelatihan Kesehatan Batam	146.542.843
231	024.12.416242	Balai Pelatihan Kesehatan Lemah Abang Bekasi	93.345.814
232	024.12.257240	Balai Pelatihan Kesehatan Makassar	23.003.324
233	024.12.416264	Balai Pelatihan Kesehatan Salaman Magelang	123.092.500
234	024.12.632221	Politeknik Kesehatan Bandung	1.239.604.565
235	024.12.632310	Politeknik Kesehatan Banjarmasin	168.707.563
236	024.12.637615	Politeknik Kesehatan Banten	893.759.533
237	024.12.632153	Politeknik Kesehatan Bengkulu	206.915.248
238	024.12.632181	Politeknik Kesehatan Denpasar	1.561.822.865
239	024.12.447560	Politeknik Kesehatan Gorontalo	242.755.680
240	024.12.632195	Politeknik Kesehatan Jakarta I	2.366.036.155
241	024.12.632200	Politeknik Kesehatan Jakarta li	1.482.300.269
242	024.12.632217	Politeknik Kesehatan Jakarta lii	1.206.300.642
243	024.12.632149	Politeknik Kesehatan Jambi	117.148.702
244	024.12.626380	Politeknik Kesehatan Jayapura Propinsi Papua	34.528.430
245	024.12.632263	Politeknik Kesehatan Jogyakarta	401.375.828
246	024.12.632306	Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur	723.510.064
247	024.12.632352	Politeknik Kesehatan Kendari	138.820.505
248	024.12.632284	Politeknik Kesehatan Kupang	1.070.631.082
249	024.12.632348	Politeknik Kesehatan Makassar	402.418.538
250	024.12.637567	Politeknik Kesehatan Malang	798.086.744
251	024.12.637600	Politeknik Kesehatan Maluku	405.345.925
252	024.12.637618	Politeknik Kesehatan Mamuju	132.446.900
253	024.12.632327	Politeknik Kesehatan Manado	734.502.420
254	024.12.632270	Politeknik Kesehatan Mataram	136.876.068
255	024.12.632111	Politeknik Kesehatan Medan	304.919.818
256	024.12.637592	Politeknik Kesehatan Nad	1.361.900.719
257	024.12.632128	Politeknik Kesehatan Padang	917.412.301
258	024.12.637571	Politeknik Kesehatan Palangkaraya	108.161.136
259	024.12.632160	Politeknik Kesehatan Palembang	838.404.888
260	024.12.632331	Politeknik Kesehatan Palu	163.169.850
261	024.12.637616	Politeknik Kesehatan Pangkal Pinang	86.475.393
262	024.12.632132	Politeknik Kesehatan Pekan Baru	127.731.740
263	024.12.632291	Politeknik Kesehatan Pontianak	68.282.000
264	024.12.632242	Politeknik Kesehatan Semarang	1.421.179.285
265	024.12.637619	Politeknik Kesehatan Sorong	16.928.885
266	024.12.637588	Politeknik Kesehatan Surabaya	1.863.746.944
267	024.12.632259	Politeknik Kesehatan Surakarta	567.016.543
268	024.12.637617	Politeknik Kesehatan Tanjung Pinang	146.278.747
269	024.12.632174	Politeknik Kesehatan Tanjungkarang	838.738.924
270	024.12.632238	Politeknik Kesehatan Tasikmalaya	289.507.331
271	024.12.637614	Politeknik Kesehatan Ternate	997.364.647
272	024.12.416227	Pusdiklat Aparatur	122.973.950
273	024.12.258490	Pusdiklat Tenaga Kesehatan	32.551.060
274	024.12.626320	Pusrengun Sdm Kesehatan	217.722.360

No.	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
275	024.12.648500	Pustanserdik	2.589.832.645
276	024.12.630870	Sekretariat Badan Ppsdm Kesehatan	148.315.290
Total			3.443.123.902.754

DAFTAR PERSEDIAAN USANG DAN RUSAK

No.	KODE SATKER	NAMA SATKER	USANG (Rp)	RUSAK (Rp)	TOTAL (Rp)
1	024.01.258531	PUSAT KESEHATAN HAJI	193.131.692		193.131.692
2	024.03.049004	DINKES PROVINSI DIY (03)		2.156.000	2.156.000
3	024.04.415432	RSUP FATMAWATI	6.034.417		6.034.417
4	024.04.415448	RSUP PERSAHABATAN	31.788.318		31.788.318
5	024.04.415454	RSJ SOEHARTO HEERDJAN	-	70.844.361	70.844.361
6	024.04.415706	RSPI PROF DR SULIANTI SAROSO	474.911.001	1.378.017	476.289.018
7	024.04.520628	RS JANTUNG HARAPAN KITA	51.865.599		51.865.599
8	024.04.415381	BBKPM BANDUNG	33.918.325	322.819.725	356.738.050
9	024.04.415479	RSUP DR. HASAN SADIKIN BANDUNG	920.206.865	15.982.641	936.189.506
10	024.04.415485	RUMAH SAKIT PARU DR.H.A.ROTINSULU	8.975.158		8.975.158
11	024.04.415491	PMN RS MATA CICENDO BANDUNG		305.800	305.800
12	024.04.415505	RS. DR. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR	195.377.105		195.377.105
13	024.04.415511	RS PARU DR. M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA BOGOR	481.189.536	264.000	481.453.536
14	024.04.538840	BKMM CIKAMPEK	17.556.550		17.556.550
15	024.04.415397	BBKPM SURAKARTA	116.795.597	288.000	117.083.597
16	024.04.415536	RSUP DR. KARIADI SEMARANG		27.630.746	27.630.746
17	024.04.415542	RSJ PROF. DR. SOEROJO MAGELANG	53.177.878	28.809.520	81.987.398
18	024.04.415551	RS PARU ARIO SALATIGA	71.019.109		71.019.109
19	024.04.415567	ORTOPEDI	13.804.970	12.249.288	26.054.258
20	024.04.415573	RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN	242.612.901	440.000	243.052.901
21	024.04.621949	BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN		44.250.000	44.250.000
22	024.04.415630	RS KUSTA DR. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG		18.543.898	18.543.898
23	024.04.325155	RSU RATATOTOK BUYAT	211.191.633		211.191.633
24	024.04.189001	DINKES PROVINSI SULAWESI TENGAH (04)	1.480.000		1.480.000
25	024.04.415655	BBLK MAKASSAR	498.519.938		498.519.938
26	024.04.229179	RSU NEGARA		7.245.000	7.245.000
27	024.04.289222	RSU SOASIO		1.174.000	1.174.000
28	024.04.415520	RUMAH SAKIT KUSTA DR. SITANALA		464.181.801	464.181.801
29	024.04.305123	RSU PANGKAL PINANG		37.240.000	37.240.000
30	024.05.559950	BBTKL-PP JAKARTA		88.202.013	88.202.013
31	024.05.465827	SEKRETARIAT DITJEN P2P	1.393.797.530	7.988.640	1.401.786.170
32	024.05.465833	DIREKTORAT P2PML		12.297.263.653	12.297.263.653
33	024.05.465842	DIREKTORAT P2PTVZ	1.048.019.760		1.048.019.760
34	024.05.465858	DIREKTORAT SKK		1.136.155.200	1.136.155.200
35	024.05.465864	DIREKTORAT PL		77.898.015	77.898.015
36	024.05.415712	KKP BANDUNG	28.822.453		28.822.453
37	024.05.415721	KKP SEMARANG		11.987.338	11.987.338
38	024.05.415737	KKP CILACAP	243.900	81.216	325.116
39	024.05.415969	KKP PROBOLINGGO	5.085.645		5.085.645
40	024.05.415743	KKP LHOKSEUMAWE	63.634.000		63.634.000
41	024.05.416088	KKP MEDAN		3.465.650	3.465.650
42	024.05.415752	KKP DUMAI	1.184.000		1.184.000
43	024.05.416094	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN PALEMBANG	2.770.910		2.770.910
44	024.05.415799	KKP PANJANG		7.936.500	7.936.500
45	024.05.415819	KKP SAMPIT	2.675.400	17.137.000	19.812.400
46	024.05.415981	KKP BANJARMASIN		109.739.650	109.739.650
47	024.05.613146	BBTKL-PP BANJARBARU	220.378.149		220.378.149
48	024.05.416139	KKP MANADO	200.424.110		200.424.110
49	024.05.415856	KKP KELAS III POSO		281.859.300	281.859.300
50	024.05.415862	KKP PALU	4.218.890		4.218.890
51	024.05.416145	KKP MAKASSAR	500.000		500.000
52	024.05.416001	KKP KENDARI	2.708.050	310.992	3.019.042
53	024.05.416010	KKP AMBON		9.471.928	9.471.928
54	024.05.415871	KKP DENPASAR	5.078.236		5.078.236
55	024.05.415887	KKP MATARAM	4.329.499		4.329.499
56	024.05.416026	KKP KUPANG	2.231.200		2.231.200
57	024.05.416032	KKP JAYAPURA	39.597.358	74.555.418	114.152.776
58	024.05.416041	KKP BIAK		-	-
59	024.05.416057	KKP MERAUKE	457.752	39.723.250	40.181.002
60	024.05.415774	KKP TANJUNG PINANG	206.710	23.926.940	24.133.650
61	024.05.415922	KKP TANJUNG BALAI KARIMUN	408.000		408.000
62	024.05.415938	KKP BATAM		792.869	792.869

No.	KODE SATKER	NAMA SATKER	USANG (Rp)	RUSAK (Rp)	TOTAL (Rp)
63	024.05.416063	KKP SORONG	-	17.291.800	17.291.800
64	024.05.340337	DINKESKAB MAMUJU UTARA		45.000	45.000
65	024.07.465992	DIT TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKKES	17.876.820.373	593.007	17.877.413.380
66	024.11.416160	PUSAT BIOMEDIS DAN TEKNOLOGI DASAR KESEHATAN	765.521.987		765.521.987
67	024.11.416211	BALAI BESAR LITBANG TOOT TAWANGMANGU		79.000	79.000
68	024.11.626046	BALAI LITBANG GAKI MAGELANG		1.017.000	1.017.000
69	024.11.416202	PUSAT HUMANIORA, KEBIJAKAN KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		(18.144)	(18.144)
70	024.11.653530	LOKA LITBANG P2B2 BATURAJA	10.892.310	15.732.000	26.624.310
71	024.11.653568	BALAI LITBANG P2B2 TANAH BUMBU	6.114.000	18.815.000	24.929.000
72	024.11.653572	BALAI LITBANG P2B2 DONGGALA		15.000	15.000
73	024.12.632200	POLTEKKES JAKARTA II	8.639.000		8.639.000
74	024.12.258490	PUSDIKLATNAKES	12.616.450		12.616.450
75	024.12.416258	BBPK CILOTO	1.005.000		1.005.000
76	024.12.637588	POLTEKKES SURABAYA	463.125		463.125
Grand Total			25.332.400.389	15.297.868.032	40.630.268.421

SALDO DANA JAMKESMAS RUJUKAN PER 31 DESEMBER 2017

NO.	KAB/KOTA	NAMA RUMAH SAKIT	Jumlah (Rp)
1	Kota Banda Aceh	Rumkit Kesdam IM	6.485.449
2	Kota Medan	RSU Prof Boloni	17.019.100
3	Kota Medan	RS Morawa Utama	152.557.968
4	Kota Medan	RSU Ibnu Saleh	100.000.000
5	Kota Pematang Siantar	RS Aida Laguboti	62.277.398
6	Kab. Rokan Hilir	RS Agung	96.343.309
7	Kota Jambi	RS Bratanata	29.484.368
8	Kota Palembang	PPK Ginjal dan Hipertensi Widya Dharma	1.374.897.583
9	Kota Jakarta Selatan	RS Marinir Cilandak	33.672.474
10	Kota Cimahi	RSIA Melinda Hospital Bandung	100.000.000
11	Kab. Bogor	RS Bersalin Muhammadiyah	499.800.000
12	Kab. Bogor	RS Bungsu	126.289.983
13	Kota Depok	RS MH Thamrin Cileungsi Bogor	1.223.281.008
14	Kab. Ciamis	RS Mitra Keluarga Depok	4.765.400
15	Kab. Banyumas	RS Hidayah	0
16	Kab. Pati	RSK Tayu	707.168.096
17	Kab. Lembata	RSUD Bukit	127.198.729
18	Kab. Seruyan	RSUD Kuala Pembuang Seruyan	222.359
19	Kota Banjarmasin	RSAU Syamsuddin Noor	4.180.430
20	Kota Tarakan	RSAL Ilyas	21.859.700
21	Kab. Malinau	RS Bergerak Langap Kab. Malinau	125.513.399
22	Kab. Talaud	RS Bergerak Gemeh	138.234.274
23	Kab. Bolaang Mongondow	RSI Moonow	53.677.814
24	Kota Makassar	RSB Elim	3.317.915
25	Kota Makassar	RB UNHAS	112.217.451
26	Kab. Enrekang	RSUD Massenrenpulu	570.640.814
27	Kota Kendari	RS Griya Husada Bakti	139.000.000
28	Kab. Maluku Tengah	RSUD Saparua	17.100.000
29	Kab. Maluku Tenggara Barat	RS Fatima Saumlaki	80.443.078
30	Kota Ternate	RS Medika Harifalm	43.262.976
31	Kota Sorong	RS Kartini	251.510.950
32	Kab. Raja Ampat	RSUD Lapangan Marinda	315.376.230
33	Kab. Mimika	BKTIA Timika	18.656.797
34	Kab. Mappi	RSUD Mappi	100.000.000
GRAND TOTAL			6.656.455.053

SALDO DANA JAMKESMAS PADA PPK JAMPERSAL DAN DASAR PER 31 DESEMBER 2017

No.	No. Rekening	Nama	Jumlah (Rp)
1	3519-01-000194-30-0	KAB GAYO LUES	1.103.400
2	3526-01-000076-30-9	KOTA SUBULUSSALAM KESMAS PERSAL	2.822.756
3	0044-01-000638-30-2	KAB LUMAJANG KESMAS PERSAL	539.020
4	1113-01-000107-30-3	KAB PENAJAM PASER UTARA	1.600.255
5	0027-01-001316-30-7	KAB GORONTALO UTARA	14.127.800
6	0167-01-000461-30-3	KAB BANGGAI	102.917
7	5182-01-000028-30-0	KAB DONGGALA	1.838.800
8	0281-01-001075-30-9	KOTA TUAL	-2.721.802
9	1059-01-000045-30-5	KAB KEPULAUAN ARU	-360.345.750
10	0308-01-000306-30-1	KAB BIAK NUMFOR	-71.872.000
11	0311-01-000574-30-7	KAB YALIMO	4.959.000
12	0311-01-000619-30-1	KAB TOLIKARA	41.379.000
13	0311-01-000623-30-0	KAB PG JAYAWIJAYA	-970
14	0311-01-000625-30-2	KAB MAMBERAMO TENGAH	146.187.000
15	0352-01-001201-30-1	KAB MERAUKE	91.600
16	0446-01-000020-30-5	KAB PEG BINTANG	67.140.000
17	1082-01-000081-30-2	KAB JAYAPURA	817.000
18	0310-01-000952-30-7	KAB MAYBRAT	134.458.782
19	2064-01-000018-30-8	KAB SORONG	41.715.000
JUMLAH			23.941.808

RINCIAN UTANG KEPADA PIHAK KETIGA PER 31 DESEMBER 2017

NO.	KODE SATKER	NAMA SATKER	JUMLAH (Rp)
1	024.01.439505	SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA	2.715.000
2	024.01.465930	BIRO UMUM	39.524.254
3	024.03.415382	BALAI KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT MAKASSAR	18.017.559
4	024.03.415383	LOKA KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT PALEMBANG	8.702.000
5	024.04.015514	RS PUSAT OTAK NASIONAL	7.864.683.134
6	024.04.031235	RSU JEPARA	5.607.000
7	024.04.035659	LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN SURAKARTA	7.014.062
8	024.04.121008	RSUD PRINGSEWU	28.150.995
9	024.04.155247	LOKA PENGAMAN FASILITAS KESEHATAN BANJAR BARU	8.563.612
10	024.04.171217	RSU LAPANGAN SAWANG KAB SITARO	788
11	024.04.191922	RSU AJAPANGE SOPENG (04)	5.985.000
12	024.04.245152	RSUD KOTA KUPANG	18.880.000
13	024.04.251423	RSUD ASMAT	85.000
14	024.04.257847	RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL BUKITTINGGI	1.661.740.798
15	024.04.258462	RUMAH SAKIT KUSTA MAKASSAR	3.042.743.832
16	024.04.280533	DINKES KAB KEPULAUAN SULA	1.809.000
17	024.04.415381	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT (BKPM) BANDUNG	528.694.162
18	024.04.415397	BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASY. SURAKARTA	284.260.480
19	024.04.415401	BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SULSEL	44.620.100
20	024.04.415423	RUMAH SAKIT UMUM DR CIPTO MANGUN KUSUMO JAKARTA	368.975.945.012
21	024.04.415432	RUMAH SAKIT FATMAWATI JAKARTA	104.081.457.232
22	024.04.415448	RUMAH SAKIT UMUM PERSAHABATAN	43.044.366.016
23	024.04.415454	RUMAH SAKIT JIWA DR. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA	5.857.469
24	024.04.415460	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN JAKARTA	261.512.554
25	024.04.415479	RUMAH SAKIT UMUM DR HASAN SADIKIN BANDUNG	176.996.484.356
26	024.04.415485	RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU BANDUNG	2.087.755.423
27	024.04.415491	RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG	5.275.210.712
28	024.04.415505	RUMAH SAKIT DR. MARZUKI MAHDI BOGOR	432.731.664
29	024.04.415511	RS PARU DR.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA	253.728.695
30	024.04.415520	RUMAH SAKIT KUSTA SITANALA TANGERANG	415.263.412
31	024.04.415536	RSU DR KARIADI SEMARANG	15.139.554.528
32	024.04.415542	RS JIWA PROF. DR. SOEROYO MAGELANG	3.383.266.736
33	024.04.415551	RS PARU DR. ARIO WIRAWAN SALATIGA (04)	70.565.251
34	024.04.415567	RS ORTHOPAEDI PROF. DR.R. SOEHARSO SURAKARTA	2.446.178.121
35	024.04.415573	RSU PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO (04)	2.655.978.851
36	024.04.415582	RUMAH SAKIT UMUM DR SARDJITO YOGYAKARTA	145.180.369.925
37	024.04.415598	RSJ DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG	1.212.176.951
38	024.04.415602	BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA	36.873.520
39	024.04.415618	RUMAH SAKIT UMUM DR M JAMIL PADANG	27.346.625.988
40	024.04.415624	RSUP DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG	106.432.534.984
41	024.04.415630	RUMAH SAKIT KUSTA DR.RIVAI ABDULLAH PALEMBANG	89.450.993
42	024.04.415649	BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN PALEMBANG	82.506.223
43	024.04.415655	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR	548.229.073
44	024.04.415661	RUMAH SAKIT UMUM SANGLAH DENPASAR	112.061.142.872
45	024.04.415670	RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA	118.545.516
46	024.04.415706	RSPI PROF.DR.SULIANTI SAROSO JAKARTA	1.564.292.656
47	024.04.466080	SEKRETARIAT DJEN BINA UPAYA KESEHATAN	2.349.864
48	024.04.520611	RUMAH SAKIT ANAK DAN BERSALIN HARAPAN KITA JAKARTA	20.318.868.634
49	024.04.520628	RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA	77.683.451.024
50	024.04.532214	RUMAH SAKIT UMUM H. ADAM MALIK MEDAN	87.644.212.529
51	024.04.538815	RUMAH SAKIT UMUM MANADO	73.547.958.858
52	024.04.538857	BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT SULSEL	35.612.924
53	024.04.548886	RUMAH SAKIT UMUM DR WAHIDIN SUDIRO-HUSODO MAKASSAR	48.653.379.631
54	024.04.548890	RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS" JAKARTA	34.961.960.895
55	024.04.552687	BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA	4.744.133
56	024.04.552713	BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA	35.976.295
57	024.04.621949	BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN MEDAN	16.259.217

NO.	KODE SATKER	NAMA SATKER	JUMLAH (Rp)
58	024.04.621953	BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN MAKASSAR	6.397.442
59	024.05.415686	BBTKL PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR YOGYAKARTA	57.245.100
60	024.05.415712	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN CIREBON	38.623.802
61	024.05.415737	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN CILACAP	13.432.994
62	024.05.415743	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN LHOK SEUMAWA	18.512.000
63	024.05.415774	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN TANJUNG PINANG	14.186.500
64	024.05.415799	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN PANJANG	6.320.276
65	024.05.415800	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN PULANG PISAU	10.997.008
66	024.05.415831	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN BALIKPAPAN	18.694.481
67	024.05.415840	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN BITUNG	7.003.569
68	024.05.415856	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN POSO	58.750
69	024.05.415871	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN DENPASAR	56.328.393
70	024.05.415887	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN MATARAM	58.859.768
71	024.05.415907	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN PADANG	4.780.000
72	024.05.415913	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN PAKANBARU	29.000
73	024.05.415938	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN BATAM	25.435.649
74	024.05.415969	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN PROBOLINGGO	29.030.830
75	024.05.415981	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN BANJARMASIN	8.439.871
76	024.05.415990	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN TARAKAN	2.277.000
77	024.05.416041	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN BIAK	9.855.550
78	024.05.416057	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN MERAUKE	9.028.642
79	024.05.416063	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SORONG	241.920
80	024.05.416094	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN PALEMBANG	38.807.950
81	024.05.416108	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN TANJUNG PRIOK	72.224.231
82	024.05.416120	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SURABAYA	30.763.280
83	024.05.416139	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN MANADO	5.359.040
84	024.05.416145	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN MAKASSAR	64.087.350
85	024.05.449978	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN GORONTALO	12.000.000
86	024.05.465827	SET DITJEN PP DAN PL	300.168.658
87	024.05.465833	DIREKTORAT PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG	60.000.001
88	024.05.513096	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN BENGKULU	1.174.400
89	024.05.559950	BBTKL DAN PEMBARANTASAN PENYAKIT MENULAR JAKARTA	45.030.741
90	024.05.560127	BBTKL DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR SURABAYA	21.022.000
91	024.05.613111	BTKL DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR MEDAN	15.280.586
92	024.05.613125	BTKL DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR BATAM	39.307.444
93	024.05.613132	BTKL DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR MAKASSAR	39.038.586
94	024.05.613146	BTKL DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR BANJARBARU	37.019.265
95	024.05.621911	BTKL DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR PALEMBANG	18.570.146
96	024.05.621928	BTKL DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR MANADO	40.013.929
97	024.05.621932	BTKL DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR AMBON	11.160.107
98	024.07.465895	SET DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	12.594.347
99	024.11.416151	SEKRETARIAT BADAN LITBANG KESEHATAN	195.968.907
100	024.11.416160	PUSAT BIOMEDIS DAN TEKNOLOGI DASAR KESEHATAN	269.631.949
101	024.11.416161	BALAI LITBANG BIOMEDIS PAPUA	12.780.672
102	024.11.520607	BB LITBANG VEKTOR DAN RESERVOIR PENYAKIT SALATIGA	32.783.200
103	024.11.626046	BALAI LITBANG GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN IODIUM, MAGELANG	30.712.050
104	024.11.653530	LOKA LITBANG P2B2 BATURAJA OGAN KOMERING ULU, SUMSEL	159.000
105	024.11.653535	#N/A	114.177.950
106	024.11.653547	LOKA LITBANG P2B2 CIAMIS, JAWA BARAT	16.016.141
107	024.11.653551	LOKA LITBANG P2B2 BANJARNEGARA, JAWA TENGAH	18.869.420
108	024.11.653568	LOKA LITBANG P2B2 TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN	8.167.053
109	024.11.653572	LOKA LITBANG P2B2 DONGGALA, SULAWESI TENGAH	11.862.820
110	024.11.653594	LOKA BIOMEDIS ACEH	865.400
111	024.12.257240	BALAI PELATIHAN KESEHATAN MAKASSAR	38.422.900
112	024.12.325151	BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM	253.574.579
113	024.12.416233	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILANDAK JAKARTA	100.589.681
114	024.12.416242	BALAI PELATIHAN KESEHATAN LEMAH ABANG BEKASI	62.112.537
115	024.12.416258	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO	403.493.108
116	024.12.416264	BALAI PELATIHAN KESEHATAN SALAMAN MAGELANG	116.120.794

NO.	KODE SATKER	NAMA SATKER	JUMLAH (Rp)
117	024.12.447560	POLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO	50.298.244
118	024.12.626380	POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA PROPINSI PAPUA	191.986.151
119	024.12.630870	SEKRETARIAT BADAN PPSDM KESEHATAN	362.550.032
120	024.12.632111	POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN	142.866.782
121	024.12.632128	POLITEKNIK KESEHATAN PADANG	187.802.360
122	024.12.632132	POLITEKNIK KESEHATAN PEKAN BARU	52.887.478
123	024.12.632149	POLITEKNIK KESEHATAN JAMBI	33.616.092
124	024.12.632153	POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU	57.450.195
125	024.12.632160	POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG	14.360.576
126	024.12.632174	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG	83.796.759
127	024.12.632181	POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR	83.688.811
128	024.12.632195	POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I	332.728.392
129	024.12.632200	POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II	157.183.213
130	024.12.632217	POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III	158.108.646
131	024.12.632221	POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG	154.015.415
132	024.12.632238	POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA	116.410.274
133	024.12.632242	POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG	203.845.030
134	024.12.632259	POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA	113.569.021
135	024.12.632263	POLITEKNIK KESEHATAN JOGJAKARTA	33.833.450
136	024.12.632270	POLITEKNIK KESEHATAN MATARAM	357.795.831
137	024.12.632284	POLITEKNIK KESEHATAN KUPANG	84.637.255
138	024.12.632291	POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK	101.725.297
139	024.12.632306	POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR	623.759.048
140	024.12.632310	POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN	46.537.562
141	024.12.632327	POLITEKNIK KESEHATAN MANADO	140.475.171
142	024.12.632331	POLITEKNIK KESEHATAN PALU	234.632.204
143	024.12.632348	POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR	348.140.009
144	024.12.632352	POLITEKNIK KESEHATAN KENDARI	114.667.494
145	024.12.637567	POLITEKNIK KESEHATAN MALANG	69.697.572
146	024.12.637571	POLITEKNIK KESEHATAN PALANGKARAYA	7.354.627.368
147	024.12.637588	POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA	161.660.437
148	024.12.637592	POLITEKNIK KESEHATAN NAD	93.637.145
149	024.12.637600	POLITEKNIK KESEHATAN MALUKU	25.344.333
150	024.12.637614	POLITEKNIK KESEHATAN TERNATE	82.712.904
151	024.12.637615	POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN	74.033.854
152	024.12.637616	POLITEKNIK KESEHATAN PANGKAL PINANG	35.972.914
153	024.12.637617	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNG PINANG	12.903.500
154	024.12.637618	POLITEKNIK KESEHATAN MAMUJU	19.696.335
155	024.12.637619	POLITEKNIK KESEHATAN SORONG	21.687.082
JUMLAH			1.492.156.224.516

Rincian Koreksi Nilai Persediaan Tahun 2017

NO.	KODE SATKER	NAMA SATKER	JUMLAH (Rp)
1	024.01.258531	PUSAT KESEHATAN HAJI	189.304.011
2	024.01.466059	BIRO KEPEGAWAIAN	600.000
3	024.04.015514	RS PUSAT OTAK NASIONAL	10
4	024.04.415454	RUMAH SAKIT JIWA DR. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA	8
5	024.04.415598	RUMAH SAKIT JIWA DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG	1.844.627.972
6	024.04.415602	BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA	41.500.000
7	024.04.415706	RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI PROF.DR.SULIANTI SAROSO JAKARTA	19.778.010
8	024.04.520628	RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA	75
9	024.04.538815	RUMAH SAKIT UMUM MANADO	1.397.355
10	024.04.548886	RUMAH SAKIT UMUM DR WAHIDIN SUDIRO-HUSODO MAKASSAR	-9
11	024.04.548890	RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA	17.546.247.145
12	024.05.040005	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP) KELAS IV YOGYAKARTA	1.287.000.000
13	024.05.415819	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III SAMPIT	18.730.788
14	024.05.415825	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II SAMARINDA	26.048.000
15	024.05.415856	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III POSO	182.887
16	024.05.415981	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN	103.600.000
17	024.05.415990	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TARAKAN	900.900.000
18	024.05.416032	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA	9.322.115
19	024.05.416120	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SURABAYA	1.623.600
20	024.05.465833	DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG	89.018.286.864
21	024.05.465842	DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOOONOTIK	204.000.720
22	024.05.513096	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BENGKULU	998.712.000
23	024.05.559950	BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT JAKARTA	614.100
24	024.12.447560	POLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO	262.456.380
25	024.12.632111	POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN	2.248.000
26	024.12.632174	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURAN	77.325.000
27	024.12.632181	POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR	63.905.500
28	024.12.632221	POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG	251.411.257
TOTAL			112.869.821.788

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2017

NO.	KODE SATKER	NAMA SATKER	JUMLAH (Rp)
1	024.01.258531	PUSAT KESEHATAN HAJI	-3.784.809
2	024.01.401734	PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN	-519.037.000
3	024.01.465921	BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA	-7.825.437
4	024.01.465930	BIRO UMUM	-420.859.297
5	024.01.466059	BIRO KEPEGAWAIAN	-2.086.416.000
6	024.01.477136	BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT	-1.071.082.000
7	024.02.415366	KANTOR INSPEKTORAT JENDERAL	-76.987.500
8	024.03.129006	DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG	0
9	024.03.149010	DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	11.900.000
10	024.03.401736	DIREKTORAT KESEHATAN LINGKUNGAN	-3.934.000
11	024.03.465909	SEKRETARIAT DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	-97.973.675
12	024.03.466420	DIREKTORAT JENDERAL BINA KESEHATAN MASYARAKAT (SCHS-UE)	-29.550.000
13	024.04.015514	RS PUSAT OTAK NASIONAL	120.015.148
14	024.04.029495	DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON	1.502.060.560
15	024.04.105153	RSUD RADEN MATTATHER	2
16	024.04.139338	RSU DR. SOEDARSO PONTIANAK	-2.355.729.188
17	024.04.155247	LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (LPFK) BANJARBARU	10.479.535
18	024.04.189001	DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	18.000.000
19	024.04.195229	DINAS KESEHATAN KOTA PARE-PARE	-384.712.721
20	024.04.257847	RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL BUKITTINGGI	-66.930.760
21	024.04.280408	RSUD LABUHA	372.159.900
22	024.04.340313	RSU MAMUJU UTARA	3.408.909.204
23	024.04.415381	BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BANDUNG	-1.210.844.273
24	024.04.415423	RUMAH SAKIT UMUM DR CIPTO MANGUN KUSUMO JAKARTA	-48.711.138.999
25	024.04.415432	RUMAH SAKIT FATMAWATI JAKARTA	-282.606.475
26	024.04.415448	RUMAH SAKIT UMUM PERSAHABATAN	34.205.650.474
27	024.04.415454	RUMAH SAKIT Jiwa DR. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA	3.771.769.257
28	024.04.415479	RUMAH SAKIT UMUM DR HASAN SADIKIN BANDUNG	-167.223.873
29	024.04.415485	RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU BANDUNG	2.173.831.852
30	024.04.415491	RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG	-9.107.181.548
31	024.04.415505	RUMAH SAKIT DR. MARZUKI MAHDI BOGOR	373.614.542
32	024.04.415520	RUMAH SAKIT KUSTA SITANALA TANGERANG	-408.706.104
33	024.04.415536	RSU DR KARIADI SEMARANG	652.822.850
34	024.04.415542	RS Jiwa Prof. Dr. Soeroyo Magelang	23.146.226
35	024.04.415567	RS ORTHOPAEDI Prof. Dr.R. Soeharso Surakarta	-197.566.489
36	024.04.415573	RSU PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO	-699.892.396
37	024.04.415582	RUMAH SAKIT UMUM DR SARDJITO YOGYAKARTA	-1.770.149.437
38	024.04.415598	RUMAH SAKIT Jiwa DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG	16.687.500
39	024.04.415602	BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA	-49.557.446
40	024.04.415618	RUMAH SAKIT UMUM DR M JAMIL PADANG	-4.274.469.237
41	024.04.415624	RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG	-2.797.524.044
42	024.04.415630	RUMAH SAKIT KUSTA DR.RIVAI ABDULLAH PALEMBANG	-315.434.483
43	024.04.415661	RUMAH SAKIT UMUM SANGLAH DENPASAR	31.383.748
44	024.04.415670	RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA	-53.822.479
45	024.04.415706	RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI Prof.Dr.Sulianti Saroso Jakarta	687.824.000
46	024.04.465791	DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN RUJUKAN	3.029.002.079
47	024.04.466080	SEKRETARIAT DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	-358.710.000
48	024.04.532214	RUMAH SAKIT UMUM H. ADAM MALIK MEDAN	137.516.671
49	024.04.538857	BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN (UJUNG PANDANG)	51.828.000
50	024.04.548886	RUMAH SAKIT UMUM DR WAHIDIN SUDIRO-HUSODO MAKASSAR	100.000

NO.	KODE SATKER	NAMA SATKER	JUMLAH (Rp)
51	024.04.548890	RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA	1.336.843.043
52	024.04.621953	BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN MAKASSAR	99.016.000
53	024.05.040005	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP) KELAS IV YOGYAKARTA	18.289.100
54	024.05.040358	DINAS KESEHATAN KAB. GUNUNGKIDUL	-41.282.990
55	024.05.139292	DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU	-44.547.751
56	024.05.401733	DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN JIWA DAN NAPZA	37.759.374
57	024.05.415686	BALAI BESAR TEHNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA	-5.435.446
58	024.05.415712	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG	249.288.477
59	024.05.415737	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II CILACAP	-74.047.500
60	024.05.415768	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TEMBILAHAN	215.604.985
61	024.05.415774	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNG PINANG	1.836.983
62	024.05.415799	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PANJANG	481.532.000
63	024.05.415862	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PALU	-385.051.572
64	024.05.415871	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I DENPASAR	-380.000
65	024.05.415887	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM	-102.757.736
66	024.05.415893	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BANDA ACEH	178.582.997
67	024.05.415907	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG	-35.350.875
68	024.05.415913	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PEKANBARU	-6.795.522
69	024.05.415944	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PANGKAL PINANG	-31.667.988
70	024.05.415969	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PROBOLINGGO	200.389.985
71	024.05.415981	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN	2.079.534.981
72	024.05.416001	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II KENDARI	-111.648.100
73	024.05.416063	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III SORONG	1.316.759.000
74	024.05.416088	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MEDAN	104.730.714
75	024.05.416094	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PALEMBANG	-11.930.174
76	024.05.416108	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK	-7.299.376
77	024.05.416114	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA	-2.792.045.449
78	024.05.416120	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SURABAYA	507.212.000
79	024.05.416139	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MANADO	-187.604.572
80	024.05.449984	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III SABANG	254.839.995
81	024.05.465827	SEKRETARIAT DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	2.193.724.961
82	024.05.465833	DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG	14.169.820.462
83	024.05.465889	DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	-90
84	024.05.559950	BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT JAKARTA	3.064.000
85	024.05.560127	BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT SURABAYA	776.043.082
86	024.05.613132	BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MAKASSAR	93.157.000
87	024.05.621932	BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELS II AMBON	22.325.360
88	024.07.401738	DIREKTORAT PENILAIAN ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA	-121.603.589
89	024.07.401739	DIREKTORAT PENGAWASAN ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH	-70.534.050
90	024.07.465895	SEKRETARIAT DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	-92.006.000
91	024.07.465977	DIREKTORAT PELAYANAN KEFARMASIAN	-148.426.787
92	024.07.465983	DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN	-534.449.135
93	024.07.465992	DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN	-59.075.000

NO.	KODE SATKER	NAMA SATKER	JUMLAH (Rp)
94	024.11.416151	SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN	-777.950.171
95	024.11.653530	LOKA LITBANG P2B2 BATURAJA OGAN KOMERING ULU, SUMATERA SELATAN	122.645.187
96	024.11.653535	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN PELAYANAN KESEHATAN	905.470.000
97	024.11.653545	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUMANIORA DAN MANAJEMEN KESEHATAN	555.240.774
98	024.11.653551	BALAI LITBANG P2B2 BANJARNEGARA, JAWA TENGAH	30.129.370
99	024.11.653568	BALAI LITBANG P2B2 TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN	-25.714.285
100	024.12.257240	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN MAKASSAR	566.478.030
101	024.12.258490	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN	3.146.880
102	024.12.325151	BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM	-36.926.384
103	024.12.416233	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BPPK) JAKARTA	18.192.779.333
104	024.12.416242	BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG	30.034.050
105	024.12.416258	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO	11.731.784
106	024.12.447560	POLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO	99.859.001
107	024.12.626380	POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA PROPINSI PAPUA	2.254.380.000
108	024.12.630870	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN	-19.718.392.872
109	024.12.632111	POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN	5.162.757.779
110	024.12.632128	POLITEKNIK KESEHATAN PADANG	17.689.063.000
111	024.12.632132	POLITEKNIK KESEHATAN PEKAN BARU	287.729.904
112	024.12.632149	POLITEKNIK KESEHATAN JAMBI	327.613.146
113	024.12.632153	POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU	-70.822.856
114	024.12.632160	POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG	1.287.908.000
115	024.12.632174	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG	536.070.544
116	024.12.632181	POLITEKNIK KESEHATAN PENSAR	366.966.323
117	024.12.632195	POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I	-16.691.817.608
118	024.12.632200	POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II	-275.507.473
119	024.12.632217	POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III	2.310.723.601
120	024.12.632221	POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG	3.991.169.562
121	024.12.632238	POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA	3.002.984.576
122	024.12.632242	POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG	582.204.236
123	024.12.632259	POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA	6.380.596
124	024.12.632263	POLITEKNIK KESEHATAN JOGYAKARTA	251.846.830
125	024.12.632270	POLITEKNIK KESEHATAN MATARAM	68.835.313.142
126	024.12.632284	POLITEKNIK KESEHATAN KUPANG	-367.305.808
127	024.12.632291	POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK	14.568.634.573
128	024.12.632306	POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR	1.298.148.412
129	024.12.632327	POLITEKNIK KESEHATAN MANADO	9.585.878
130	024.12.632331	POLITEKNIK KESEHATAN PALU	525.000
131	024.12.632348	POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR	601.361.738
132	024.12.632352	POLITEKNIK KESEHATAN KENDARI	185.281.824
133	024.12.637567	POLITEKNIK KESEHATAN MALANG	-727.805.124
134	024.12.637571	POLITEKNIK KESEHATAN PALANGKARAYA	513.282.458
135	024.12.637588	POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA	4.567.024.599
136	024.12.637592	POLTEKES KEMENKES ACEH	7.060.111.411
137	024.12.637614	POLITEKNIK KESEHATAN TERNATE	470.299.677
138	024.12.637615	POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN	114.380.050
139	024.12.637616	POLITEKNIK KESEHATAN PANGKAL PINANG	4.326.473
140	024.12.637617	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNG PINANG	666.936.600
141	024.12.637618	POLITEKNIK KESEHATAN MAMUJU	1.148.500
142	024.12.637619	POLITEKNIK KESEHATAN SORONG	9.207.705
143	024.12.648500	PUSAT STANDARDISASI, SERTIFIKASIDAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN	69.300.000
TOTAL			111.403.404.640

Rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi Tahun 2017

No.	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
1	024.01.401734	PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN	20.000
2	024.01.477136	BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT	-427.793.389
3	024.04.015514	RS PUSAT OTAK NASIONAL	-49.060.000
4	024.04.415479	RUMAH SAKIT UMUM DR HASAN SADIKIN BANDUNG	760.000
5	024.04.415624	RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG	-1.221.592.627
6	024.04.520611	RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA	-1.482.984.875
7	024.04.532214	RUMAH SAKIT UMUM H. ADAM MALIK MEDAN	-2.879.032.610
8	024.04.552713	BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA	46.129.463
9	024.05.401733	DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN JIWA DAN NAPZA	111.750.000
10	024.07.465977	DIREKTORAT PELAYANAN KEFARMASIAN	-207.933.668
11	024.11.416151	SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN	-9.060.848
12	024.11.653535	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN PELAYANAN KESEHATAN	-8.363.750
13	024.12.416258	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO	11.042.955
14	024.12.626320	PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN	-631.537.943
15	024.12.630870	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN	-8.974.455.700
16	024.12.632111	POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN	-7.456.625
17	024.12.632128	POLITEKNIK KESEHATAN PADANG	-750.000
18	024.12.632352	POLITEKNIK KESEHATAN KENDARI	-194.500.000
19	024.12.637567	POLITEKNIK KESEHATAN MALANG	191.000.574
20	024.12.637592	POLTEKES KEMENKES ACEH	-24.275.000
21	024.12.637617	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNG PINANG	-33.660.000
TOTAL			-15.791.754.043

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2017

NO.	KODE SATKER	NAMA SATKER	JUMLAH (Rp)
1	024.01.465930	BIRO UMUM	-1.746.493.900
2	024.03.099496	DINAS KESEHATAN KAB. ROKAN HULU	-25.293
3	024.04.015514	RS PUSAT OTAK NASIONAL	1.440
4	024.04.109288	DINAS KESEHATAN KOTA SUNGAI PENUH	-1
5	024.04.129249	RSUD DEMANG SEPULAU RAYA	-1.820
6	024.04.299001	DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN	10.000.000
7	024.04.415397	BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SURAKARTA	-3.068.000
8	024.04.415423	RUMAH SAKIT UMUM DR CIPTO MANGUN KUSUMO JAKARTA	67.245.303.865
9	024.04.415505	RUMAH SAKIT DR. MARZUKI MAHDI BOGOR	-10.000
10	024.04.415536	RSU DR KARIADI SEMARANG	-1.070.270.850
11	024.04.415582	RUMAH SAKIT UMUM DR SARDJITO YOGYAKARTA	114.148.330.106
12	024.04.415598	RUMAH SAKIT JIWA DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG	5.751.784
13	024.04.415602	BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA	37.719.718
14	024.04.415655	BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR	236.637.215
15	024.04.415661	RUMAH SAKIT UMUM SANGLAH DENPASAR	605.317.150
16	024.04.465791	DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN RUJUKAN	7.102.579.062
17	024.04.466080	SEKRETARIAT DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	-1.197.720.648
18	024.04.538815	RUMAH SAKIT UMUM MANADO	16.230.628.425
19	024.04.548886	RUMAH SAKIT UMUM DR WAHIDIN SUDIRO-HUSODO MAKASSAR	335.146.797
20	024.04.621953	BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN MAKASSAR	2.617.850
21	024.05.415840	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BITUNG	9.500.000
22	024.05.415871	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I DENPASAR	625.612.000
23	024.05.415893	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BANDA ACEH	6.500.552
24	024.05.415938	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I BATAM	1.617.794.563
25	024.05.415950	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANTEN	-3.088.200
26	024.05.415981	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN	1.256.000
27	024.05.416032	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA	272.220.487
28	024.05.449984	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III SABANG	1
29	024.05.465833	DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG	2.306.932.110
30	024.05.465842	DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZONOTIK	-91.534.249.892
31	024.05.465889	DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	-15.840.636.087
32	024.11.653547	LOKA LITBANG P2B2 CIAMIS, JAWA BARAT	-9.392.278
33	024.12.632160	POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG	-23.379
34	024.12.632200	POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II	-193.564.001
35	024.12.637571	POLITEKNIK KESEHATAN PALANGKARAYA	22.640.830
36	024.12.637588	POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA	-2.250.000
37	024.12.637600	POLITEKNIK KESEHATAN MALUKU	-9.000.000
38	024.12.637619	POLITEKNIK KESEHATAN SORONG	-18.000.000
TOTAL			99.194.695.606

RINCIAN PENGESAHAN DAN PENGEMBALIAN HIBAH LANGSUNG TAHUN 2017

No.	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1	Biro Komunikasi dan Pelayanan	Jasa	LN	78.850.100
2	Pusat Data dan Informasi	Uang	LN	32.516.971.981
3	Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat	Uang	LN	116.687.380
4	Direktorat Gizi Masyarakat	Uang	LN	607.488.084
		Jasa	LN	67.327.281.464
5	Direktorat Kesehatan Keluarga	Uang	LN	6.561.797.000
		Jasa	LN	71.460.750.775
6	Direktorat Kesehatan Lingkungan	Uang	LN	19.405.420
7	Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Uang	LN	174.605.000
		Barang	LN	5.295.981.290
		Jasa	LN	19.601.358.571
8	Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar	Jasa	LN	15.169.864.228
9	Direktorat P2PML	Uang	LN	586.801.738.175
		Barang	LN	81.628.384.374
		Barang	DN	9.958.620.560
		Jasa	LN	1.368.701.103
10	Direktorat SKK	Uang	LN	22.155.353.278
		Barang	LN	3.039.926.974
		Barang	DN	1.085.700.000
		Jasa	LN	4.234.426.445
11	Direktorat P2PTVZ	Uang	LN	101.470.445.335
		Barang	LN	228.756.121.585
		Jasa	LN	101.839.743.856
12	Direktorat P2PTM	Uang	LN	2.327.602.065
		Barang	LN	157.000.000
		Jasa	LN	26.017.564.007
13	Direktorat P2MKJN	Jasa	LN	2.898.074.268
14	Kantor Kesehatan Pelabuhan Pangkal Pinang	Barang	DN	17.234.980
15	Dit Tata Kelola Oblik & Perbekkes	Uang	LN	464.222.348.421
16	Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	Uang	LN	1.042.464.000
17	Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat	Uang	LN	5.704.858.201
18	Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan	Uang	LN	2.043.030.450
19	B2P2 Vektor dan Reservoir Penyakit	Uang	LN	1.288.562.310
20	Pusdik SDM Kesehatan	Jasa	LN	147.852.000
		Jasa	LN	230.394.000
21	PUSRENGUN SDM KES	Jasa	LN	13.168.938.250
		Jasa	LN	218.608.700
22	Poltekkes Kaltim	Barang	DN	17.928.554.445
23	Poltekkes Mamuju	Barang	DN	1.396.000
		Barang	DN	600.000
		Barang	DN	1.700.000
24	Poltekkes Palembang	Barang	DN	11.500.000
		Barang	DN	8.900.000
		Barang	DN	1.170.000
		Barang	DN	9.600.000
25	Poilteknik Kesehatan Mataram	Barang	DN	28.600.000
Total Pengesahan				1.898.746.755.075
Pengesahan Pengembalian Hibah				(7.874.287.785)
Jumlah				1.890.872.467.290

DAFTAR KASUS HUKUM DAN PERMASALAHAN BAGIAN ADVOKASI HUKUM 2017

(dalam rupiah)

No.	Penanganan Masalah dan Kasus Hukum terkait Kepegawaian, Asset, Pelayanan Kesehatan serta Judicial Review			Jumlah Tuntutan		Keterangan	
	Nomor Perkara	Uraian Perkara	Para Pihak	Materil	Immateril		
1	589/Pdt.G/2014/PN.Jkt. Pst		Gugatan sengketa kepemilikan tanah di jl. Sumatera No. 50 Gondangdia Jakarta Pusat (Puskesmas Gondangdia)	PENGGUGAT : PT. Aditarina Arispratama TERGUGAT : 1. Menteri Kesehatan 2. Gubernur DKI Jakarta 3. BPN Jakarta Pusat	Rp3.450.000.000,00 ditambah bunga 6% setiap tahun. Tanah seluas 1.220 m ²	0	Dalam proses pemeriksaan tingkat Kasasi
2	66/PDT.G/2011/PN.Mks	Juli 2011	Terkait dengan Hak Milik Penggugat I sertifikat hak milik No.24962/2009 seluas 1.566 M2 atas nama H. Muh. Yusuf, BA dan Hj. Halimahdn Sertifikat hak pakai No. 24963/2009 atas nama Nuru. C seluas 1.414 M2 yang saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II (Kementerian Kesehatan) berdasarkan akta jual beli No.802/II/3/BK/1984 tanggal 19 September 1984 dan Akta Jual Beli NO.801/III/3/BK/1984 yang dibeli dari Tergugat I (saudara Suahaemi Hamid) yang telah bersertifikat No.20002/1998 seluas lebih kurang 2.980 M2.	PENGGUGAT : 1. H, Muh. Yusuf, BA 2. Nuru C TERGUGAT : 1. Suahaemi Hamid 2. Kementerian Kesehatan RI 3. Kanwil BPN Sulsel Cq,BPN Kota Makasar (sebagai Turut Tergugat)	Rp4.000.000.000,00	0	Dalam proses pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali Mengajukan Kontra Memori PK pada Desember 2015
3	158/PDT.G/2010/PN.Jkt. Pst	Februari 2010	Permasalahan penguasaan tanah dan rumah sengketa Jalan Teuku Cik Ditiro No.6B Rt.008/02 Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng Jakarta Pusat	PENGGUGAT : Mamat Sugandi TERGUGAT : 1. Depkes Cq.Sekjen Cq,Biro Keuangan dan Perlengkapan 2. Suwarsih Warsita Tjarwa 3. Rini Indriani Sarjadedjaja 4. Notaris Netty Maria Machdar	Rp1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Dalam proses pemeriksaan tingkat Kasasi
4	78/PLW/2012/PN. BGR	Juni 2012	Perlawanan terhadap penetapan Pengadilan Negeri Bogor No. 09/PDT/EKS/PN.BGR tanggal 11 Oktober 2012, atas penetapan pelaksanaan eksekusi tanah milik Kementerian Kesehatan yang dikuasai oleh Pengurus BGC	PENGGUGAT : PT. Trhyosa TERGUGAT : Menteri Kesehatan	penghapusan tanah seluas 2.500 m ²		Adanya perdamaian antara Para Pihak SELESAI
5	02/PDT.G/2012/PN.KBJ	Maret 2012	Gugatan terhadap Dugaan Malpraktek di Rumah Sakit Kabanjahe yang memberikan pelayanan kesehatan yang buruk terhadap anak Penggugat yang mengakibatkan anak Penggugat Meninggal dunia	PENGGUGAT : Soni Husni Ginting TERGUGAT : 1. dr.Sri Alemina BR Ginting, Sp.A 2. Rumah Sakit Umum Kabanjahe 3. Rumah Sakit Umum Serasi 4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Kesehatan RI	1.200.000,00	5.000.000.000,00	Dalam proses pemeriksaan tingkat Kasasi
6	669/PDT.G/2012/PN.MD N	Desember 2012	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Atas tidak dilaksanakannya pemberian hak berupa pembayaran gaji dan Tunjangan PNS Bulan Agustus 2001 s/d Juni 2011 atas nama Betty Frida Situmeang	PENGGUGAT : Betty Frida Situmeang TERGUGAT : 1. Dirut RSUP H Adam Malik 2. Bendaharawan Gaji RSUP H Adam Malik TURUT TERGUGAT : 1. Menteri Kesehatan 2. Kepala KPPN I Medan 3. Menteri Keuangan 4. Kepala BKN	490.569.800,00	1.000.000.000,00	Dalam proses pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali Mengajukan PK pada 26 Mei 2017

No.	Penanganan Masalah dan Kasus Hukum terkait Kepegawaian, Asset, Pelayanan Kesehatan serta Judicial Review			Jumlah Tuntutan		Keterangan	
	Nomor Perkara	Uraian Perkara	Para Pihak	Materil	Immateril		
7	74/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst	Maret 2013	Gugatan perbuatan melawan hukum atas kepengurusan koperasi RSCM	PENGGUGAT : Dr. Drg. Andi Jimmy M, dkk TERGUGAT : Deden Muhamad Sophian, dkk (Karyawan RSCM)	20.205.248.170,00	0	Dalam proses pemeriksaan tingkat Kasasi
8	41/PDT.G/2013/PN.PKR		Paket pengadaan pembangunan gedung ruang kelas di Poltekkes Palangkaraya	PENGGUGAT : PT.Menara Agung Pusaka TERGUGAT : 1. PPK Poltekkes Palangkaraya TA.2012 2. KPA Poltekkes Palangkaraya TA.2012	209.735.399.469,00	50.000.000.000,00	Telah ada Putusan PK dari MA dengan Kemenkes berada di posisi yang kalah. Namun, sampai dengan saat ini Kemenkes belum menerima Salinan Putusan resmi. Telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Secara Suka Rela Nomor : 07/BA.Pdt.Eks/2016/PN.Pik Jo. Nomor : 41/Pdt.G/2013/PN.PI.R. tertanggal 13 Desember 2017 dengan salah satu klausul yaitu pembayaran putusan pengadilan dilaksanakan melalui KPPN Palangka Raya, yang saat ini telah diterbitkan SPM Nomor : 00696/LS/lnkrah/2017 tanggal 13 Desember 2017 dan pelaksanaan putusan akan dinyatakan selesai setelah diterbitkannya SP2D.
9	05/Pdt.G/2015/PN.Pkp		Gugatan Wanprestasi di Poltekkes Pangkal Pinang	PENGGUGAT : PT. Nindya Karya TERGUGAT : 1. Pemerintah RI Cq. PPK Poltekkes Pangkal Pinang 2. PT. Dwi Eltis Konsultan	12.817.824.347,57,00	10.000.000.000,00	Dalam proses pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali
10	658/PDT.G/2013/PN.Jkt.Sel	Desember 2013	Gugatan PMH terkait paket jasa konstruksi pembangunan rumah sakit bergerak dan rumah sakit pratama yang dilaksanakan oleh Ditje. BUKR Tahun Anggaran 2012	PENGGUGAT : 1. PT. Betania Prima 2. PT. Rima Kasih TERGUGAT : 1. Dirjen BUK 2. BPKP	97.352.978.575,00	20.000.000.000,00	Sedang dalam proses Upaya Luar Biasa (Peninjauan Kembali) di Mahkamah Agung Mengajukan PK Agustus 2016
11	435/PDT.G/2013/PN.Jkt.Pst	Oktober 2013	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap sengketa kepemilikan tanah di Jl. Kimia No. 12 Jakarta Pusat antara RSCM dengan Sdr. Moenzir Hoesein	PENGGUGAT : Moenzir Hoesein TERGUGAT : 1. Kementerian Kesehatan 2. Dirjen BUK 3. Direktur Utama RSCM 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	tanah/bangunan seluas 200 m ²		Dalam proses pemeriksaan tingkat Kasasi Kemenkes mengajukan kasasi pada Mei 2017
12	165/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst	Mei 2015	Perbuatan Melawan Hukum terkait tanah dan bangunan di Jl. Salemba Raya No. 35 Jakarta Pusat dan Jl. Pasar Minangkabau Setiabudi Jakarta Selatan	PENGGUGAT : Sandiawan Djatmadipura Bin Adang Saleh Djatmadipura TERGUGAT : 1. Perhimpunan St. Carolus 2. Dir. RS St. Carolus TURUT TERGUGAT : 1. BPN Jakarta Pusat 2. Pemprov DKI Jakarta 3. Depkes RI	51.000.000.000,00	100.000.000.000,00	Dalam proses pemeriksaan tingkat Banding

No.	Penanganan Masalah dan Kasus Hukum terkait Kepegawaian, Asset, Pelayanan Kesehatan serta Judicial Review			Jumlah Tuntutan		Keterangan	
	Nomor Perkara	Uraian Perkara	Para Pihak	Materil	Immateril		
13	577/PDT.G/2011/PN.Jkt. Brt		Gugatan terhadap Dugaan Malpraktek di Rumah Sakit Anak Bunda (RSAB) Harapan Kita -	Penggugat : Sri Hayati, SH - Tergugat : 1. dr.Fajar Subroto, Sp.A 2. dr.Hermin W. Moeryono, Sp.A 3. Rumah Sakit Anak Bunda (RSAB) Harapan Kita	239.434.488,00	5.000.000.000,00	Amar Putusan : PN = KEMKES KALAH PT = KEMKES KALAH MA = KEMKES KALAH Lembaga Peradilan : PN Jakarta Barat
14	243/PDT.G/2012/PN.JK T.SLT	April 2012	Pengadaan alat kesehatan RESONANCE (MRI) Low Tesla Tahun Anggaran 2009	PENGGUGAT : PT.Bhakti Wira Husada TERGUGAT : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kes Rujukan Tahun anggaran 2009 pada Ditjen BUK	2.000.000.000,00	10.000.000.000,00	Dalam proses pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali Mengajukan PK pada 26 Sept 2017
15	415/PDT.G/2013/PN.Jkt. Pst		Gugatan PMH atas dihentikannya aktivitas tenaga medis di RSCM sebagai dokter spesialis maupun sebagai pengajar di FK UI	Penggugat : dr. Tantani Sugiman, Sp. An Tergugat : 1. RSUPN Cipto Mangunkusumo 2. Dekan FK UI 3. Kepala Dep. Anastesi 4. Ketua Dep. Anastesi FK UI	1.353.000.000,00	1.000.000.000,00	Amar Putusan : PN = KEMKES MENANG PT = KEMKES MENANG MA = KEMKES MENANG Lembaga Peradilan : PN Jakarta Pusat
16	06/Pdt.G/2016/PN.Cjr		Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait pembangunan gedung BBPK Ciloto	PENGGUGAT : Lasmono TERGUGAT : Kepala BPPK Ciloto TURUT TERGUGAT : 1. Kantah Kab. Cianjur 2. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	tanah seluas 500 m ²		Putusan PN Bandung pada 9 Februari 2017 Saat ini dalam pemeriksaan tingkat Kasasi
17	50/Pdt.G/2016/PN.Jap		Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait pekerjaan pemeliharaan gedung/halaman kantor Poltekkes Jayapura	PENGGUGAT : Yulius Nussy TERGUGAT : 1. Direktur Poltekkes Jayapura 2. Pemerintah RI cq. Menteri Kesehatan RI cq. Kepala Badan PPSDM Kesehatan	5.500.000.000,00 dwangsom 1.000.000,- per hari	500.000.000,00	Dalam proses pemeriksaan tingkat Banding
18	67/Pdt.G/2016/PN.Pdg	Juni 2016	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait tidak diizinkannya Penggugat untuk memberikan pelayanan dan tindakan medis kepada pasien di RSUP Dr. M. Djamil Padang	PENGGUGAT : dr. Noverial, SpOT TERGUGAT : Pemerintah RI cq Kementerian Kesehatan	480.000.000,00 ditambah 10.000.000,00 per bulan	500.000.000.000,00	Putusan PN Padang pada 24 Januari 2017 Putusan PT Padang pada 7 April 2017 Saat ini dalam pemeriksaan tingkat Kasasi
19	431/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Sel		Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait pengadaan Safety Box Limbah Medis Tajam	PENGGUGAT : PT Dirgantara Yudha Artha TERGUGAT : PT Medibest Indonesia TURUT TERGUGAT : 1. Kepala LKPP 2. Pemerintah RI cq. Kementerian Kesehatan RI cq. PPK Direktorat tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	denda keterlambatan 506.178.000,00, kerugian bunga 957.088.325,70, kerugian potensi keuntungan 947.232.000,00	10.000.000.000,00	Putusan pada 7 Juni 2017 KEMENKES tidak melakukan upaya hukum (SELESAI)
20	302/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Tim	Agustus 2016	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penggunaan vaksin palsu kepada anak Penggugat oleh RS Harapan Bunda	PENGGUGAT : Maruli Tua Silaban, ST TERGUGAT : 1. dr. Muhidin (RS Harapan Bunda) 2. RS Harapan Bunda 3. BPOM 4. Kementerian Kesehatan	687.600.000,- uang paksa 1.000.000,00 per hari	1.000.000.000,00	Putusan pada 20 April 2017 SELESAI MENANG
21	375/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Pst	Juli 2016	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas dugaan malpraktik di RSCM	PENGGUGAT : Rusnel Siringoringo TERGUGAT: Pemerintah RI cq. Menkes RI cq. Dirut RSUPN DR. Cipto Mangunkusumo	50.000.000,- dwangsom 1.000.000,00 per hari	5.000.000.000,00	Putusan PN Jakarta Pusat pada 2 Maret 2017 Saat ini dalam pemeriksaan tingkat Banding

No.	Penanganan Masalah dan Kasus Hukum terkait Kepegawaian, Asset, Pelayanan Kesehatan serta Judicial Review				Jumlah Tuntutan		Keterangan
	Nomor Perkara	Uraian Perkara	Para Pihak	Materil	Immateril		
22	707/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel	Oktober 2016	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian atas permasalahan bank garansi	PENGGUGAT : PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) TERGUGAT : 1. Negara RI cq. Pemerintah RI qq. Kemenkes RI qq. Ditjen BUK 2. PT. Bank DKI TURUT TERGUGAT : 1. PT. Betania Prima 2. PT. Rema Kasih	17.000.000.000,- dwangsom 500.000,00 per hari	1.000.000.000,00	Putusan Sela PN Jakarta Selatan pada 29 Mei 2017 Saat ini dalam pemeriksaan tingkat Banding
23	527/Pdt.G/2016/PN.Bks	Oktober 2016	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penggunaan vaksin palsu kepada anak Para Penggugat di RS St. Elisabeth bekasi	PENGGUGAT : Dhany Taopik, dkk TERGUGAT : 1. RS St. Elisabeth Bekasi 2. CV. Azka Medical 3. dr. Antonius Yudianto 4. dr. Fianna Heronique N, Sp.A 5. dr. Abdul Haris Thayeb, Sp.A 6. Kementerian Kesehatan RI 7. Kepala BPOM 8. IDI	50.301.822 dwangsom 10.000.000,00 per hari	50.000.000.000,00	Putusan Sela PN Bekasi pada 17 Mei 2017 SELESAI MENANG
24	304/Pdt.G/2016/PN.Mks	November 2016	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait kepemilikan tanah Persil No. 12 S II Kohir No. 530 C1 seluas 0,65 Ha yang terletak di Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar	PENGGUGAT : Muh. Mochtar Sese TERGUGAT : 1. Suhaemi Hamid 2. Departemen Kesehatan RI 3. Kanwil BPN Sulsel cq. BPN Kota Makassar	1.300.000.000,- tanah seluas 0.65 Ha	0	Putusan PN Makassar pada 20 Juni 2017 SELESAI MENANG
25	38/Pdt.G/2016/PN.Bna	November 2016	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait dugaan malpraktik di RSIA Banda Aceh dan RSUD Zainal Abidin Banda Aceh yang menyebabkan istri dan anak Penggugat meninggal dunia	PENGGUGAT : Muslim Puteh TERGUGAT : 1. dr. Ulfa Wijaya Kesumah, Sp.OG 2. Pemerintah Aceh qc. RSIA Banda Aceh 3. drg. Erni Ramayani 4. Pemerintah Aceh cq. RSUD Zainal Abidin Banda Aceh 5. dr. Cut Meurah Yeni, Sp.OG 6. Pemerintah Provinsi NAD 7. Dinkes Provinsi NAD 8. Dinkes Kota Banda Aceh 9. Pemerintah RI cq. Depkes RI	125.000.000,- dwangsom 5.000.000,00 per hari	5.000.000.000,00	Putusan PN Banda Aceh pada 11 Juli 2017. Dalam Proses Banding Kemenkes tidak mengajukan Banding, yang mengajukan Banding Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 pada Juli 2017
26	254/Pdt.G/2016/PN.Smn	November 2016	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait tidak terimanya Penggugat diberikan penagihan pembiayaan rumah sakit sebesar Rp159.500,- di RSUP Sardjito	PENGGUGAT : Haryanto TERGUGAT : RSUP Dr. Sardjito	150.000.000,- dwangsom 10.000.000,00 per hari	1.000.000.000,00	Putusan PN Sleman pada 11 Juli 2017 SELESAI MENANG